



PEMERINTAH KABUPATEN  
**SUKAMARA**



H. MASDUKI, S.T.  
BUPATI SUKAMARA



NUR EFENDI, S.H.  
WAKIL BUPATI SUKAMARA

# LPPD 2024

KABUPATEN SUKAMARA

Laporan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Sukamara  
Tahun 2024



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)**

**KABUPATEN SUKAMARA**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrohiim....*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;*

*Salam Sejahtera Untuk Kita Sekalian;*

*Syalom;*

*Om Swastiastu;*

*Namo Buddhaya;*

*Salam Kebajikan;*

*Tabe Salamet Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang;*

*Adil Ka'talino Bacuramin Ka'saruga, Ba'sengat Ka'jubata.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil pemerintah di daerah. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi diri melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 3 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain: capaian kinerja penyelenggaraan tugas desentralisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Sukamara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara teknis penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sampai dengan Tahun 2024, Kabupaten Sukamara telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberi gambaran hasil-hasil pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang signifikan di Kabupaten Sukamara, sehingga dapat dijadikan bahan yang akurat dan akuntabel dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah.

Disadari adanya kekurangan dalam penyusunan laporan ini, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka diharapkan adanya saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Sukamara di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Sukamara Sebagai Pintu Gerbang Bagian Barat Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024 ini mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sukamara, 27 Maret 2025

Bupati Sukamara,

  
H. MASDUKI, S.T.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1.Penjelasan Umum .....	1
1.1.2.Perencanaan Pembangunan Daerah .....	24
1.1.3.Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	91
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	94
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	94
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan .....	96
2.2.1.Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	96
2.2.2.Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	178
2.2.3.Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	203
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	207
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja .....	207
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja .....	209
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya .....	213
d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah .....	215
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai .....	217
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja .....	218
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	221
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	221
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten .....	221
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	222
4.1 Urusan Pendidikan.....	222
4.2 Urusan Kesehatan .....	226
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	232
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	235
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	238
4.6 Urusan Sosial.....	245
BAB V PENUTUP .....	249

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah.....	3
Tabel 2	Kelas Kemiringan Lahan dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara ...	4
Tabel 3	Ketinggian Wilayah dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara .....	4
Tabel 4	Sumber Daya Hutan Kabupaten Sukamara .....	6
Tabel 5	Tutupan Lahan Kabupaten Sukamara.....	7
Tabel 6	Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara, Desember 2024 .....	8
Tabel 7	Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukamara, Desember 2024 .....	9
Tabel 8	Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.....	10
Tabel 9	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.....	14
Tabel 10	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024.....	16
Tabel 11	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 .....	18
Tabel 12	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 .....	18
Tabel 13	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 .....	19
Tabel 14	Program yang dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah .....	20
Tabel 15	Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026 Kabupaten Sukamara.....	47
Tabel 16	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024.....	51
Tabel 17	Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Sukamara 2023 – 2024 .....	95
Tabel 18	Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.....	207
Tabel 19	Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 .....	209
Tabel 20	Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2023 – 2024.....	213
Tabel 21	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Dalam RPD Tahun 2024 – 2026.....	215
Tabel 22	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	218
Tabel 23	Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Target kinerja .....	218
Tabel 24	Target Capaian SPM Bidang Pendidikan .....	222
Tabel 25	Capaian SPM Bidang Pendidikan .....	222
Tabel 26	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan.....	223
Tabel 27	Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Status Kepegawaian) .....	223
Tabel 28	Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Pendidikan PNS).....	223
Tabel 29	Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Pangkat dan Golongan) .....	223
Tabel 30	Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Eselon).....	224
Tabel 31	Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Jenis Jabatan) .....	224
Tabel 32	Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Pendidikan .....	224
Tabel 33	Program dan Kegiatan pendukung SPM Pendidikan .....	225

Tabel 34	Target Capaian SPM Bidang Kesehatan.....	227
Tabel 35	Capaian SPM Bidang Kesehatan .....	228
Tabel 36	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan .....	229
Tabel 37	Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Status Kepegawaian) .....	229
Tabel 38	Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS).....	229
Tabel 39	Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Pangkat dan Golongan) .....	229
Tabel 40	Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Eselon) .....	230
Tabel 41	Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Jenis Jabatan) .....	230
Tabel 42	Struktur Organisasi Pengampu SPM Kesehatan .....	230
Tabel 43	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Kesehatan .....	231
Tabel 44	Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	232
Tabel 45	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	232
Tabel 46	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	232
Tabel 47	Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum (Berdasarkan Status Kepegawaian) .....	233
Tabel 48	Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS).....	233
Tabel 49	Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum (Berdasarkan Pangkat dan Golongan) .....	233
Tabel 50	Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum (Berdasarkan Eselon) .....	233
Tabel 51	Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum (Berdasarkan Jenis Jabatan) .....	234
Tabel 52	Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	234
Tabel 53	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Pekerjaan Umum .....	235
Tabel 54	Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	235
Tabel 55	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	236
Tabel 56	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	236
Tabel 57	Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat (Berdasarkan Status Kepegawaian) .....	236
Tabel 58	Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS).....	237
Tabel 59	Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat (Berdasarkan Pangkat dan Golongan).....	237
Tabel 60	Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat (Berdasarkan Eselon).....	237
Tabel 61	Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat (Berdasarkan Jenis Jabatan) .....	237
Tabel 62	Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Perumahan Rakyat ...	238
Tabel 63	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Perumahan Rakyat .....	238
Tabel 64	Target Capaian SPM Bidang Tramtibum.....	239
Tabel 65	Capaian SPM Bidang Tramtibum .....	239
Tabel 66	Alokasi Anggaran SPM Bidang Tramtibum .....	240
Tabel 67	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas (Berdasarkan Status Kepegawaian - Satpol PP dan Damkar) .....	240
Tabel 68	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas (Berdasarkan Status Kepegawaian – BPBD).....	240
Tabel 69	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS - Satpol PP dan Damkar) .....	240

Tabel 70	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS – BPBD).....	241
Tabel 71	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Pangkat dan Golongan - Satpol PP dan Damkar) .....	241
Tabel 72	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Pangkat dan Golongan – BPBD) .....	241
Tabel 73	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Eselon - Satpol PP dan Damkar) .....	242
Tabel 74	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Eselon – BPBD) .....	242
Tabel 75	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Jenis Jabatan – Satpol PP dan Damkar) .....	242
Tabel 76	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum (Berdasarkan Jenis Jabatan – BPBD) .....	242
Tabel 77	Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Tramtibum (Satpol PP dan Damkar) .....	242
Tabel 78	Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Tramtibum (BPBD)....	243
Tabel 79	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Tramtibum .....	244
Tabel 80	Target Capaian SPM Bidang Sosial .....	245
Tabel 81	Capaian SPM Bidang Sosial.....	246
Tabel 82	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial.....	246
Tabel 83	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial (Berdasarkan Status Kepegawaian) .....	246
Tabel 84	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS).....	246
Tabel 85	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial (Berdasarkan Pangkat dan Golongan) .....	247
Tabel 86	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial (Berdasarkan Eselon) .....	247
Tabel 87	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial (Berdasarkan Jenis Jabatan) .....	247
Tabel 88	Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Sosial .....	247
Tabel 89	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Sosial.....	248



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Sukamara.....	2
Gambar 2	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten .....	3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Penjelasan Umum**

###### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Sukamara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180). Kabupaten Sukamara merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencakup 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung.

###### **b. Data geografis Wilayah**

###### **1) Letak, Luas dan Batas Wilayah**

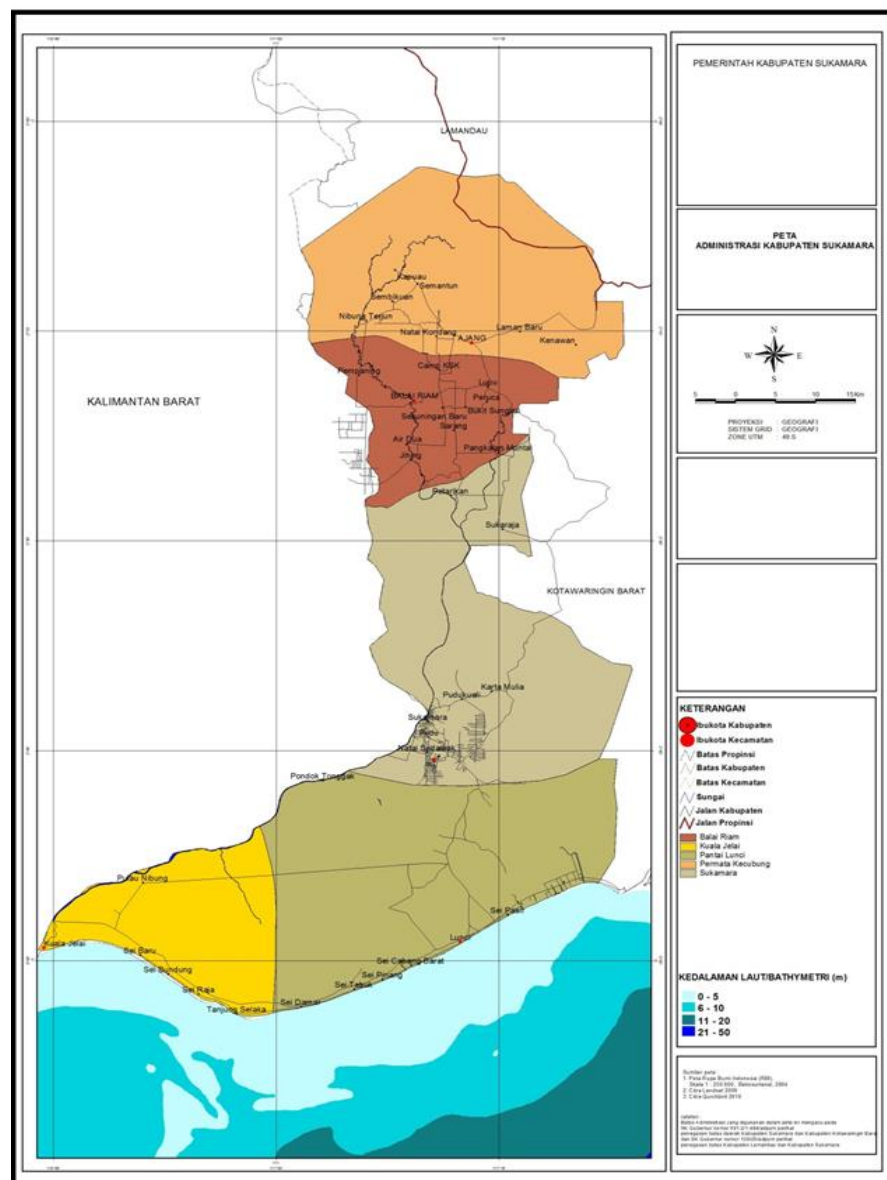
Kabupaten Sukamara memiliki luas wilayah daratan sebesar 3.827 Km<sup>2</sup> (382.700 Ha) sedangkan luas wilayah lautan adalah 55.650 Ha, yang secara keseluruhan adalah 2,49% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan merupakan daerah terkecil kedua di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kota Palangka Raya. Luas wilayah daratannya merupakan satu kesatuan daratan yang terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya. Panjang garis pantai Kabupaten Sukamara sendiri sekitar 75 Km dengan jarak terjauh Utara-Selatan wilayah Kabupaten Sukamara adalah 90,45 Km, sedangkan jarak terjauh Timur-Barat adalah 82,95 Km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sukamara berbentuk persegi panjang menyerupai bentuk sepatu *booth* memanjang Utara-Selatan dengan ujung telapak kaki di sebelah selatan menghadap Laut Jawa. Bentuk yang memanjang ini sangat berpengaruh dalam upaya pemerataan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2°19' sampai dengan 3°07' Lintang Selatan (LS) dan 110°25' sampai dengan 111°9' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) **Sebelah Utara**, berbatasan dengan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- b) **Sebelah Timur**, berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c) **Sebelah Selatan**, berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- d) **Sebelah Barat**, berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Sukamara yang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 29 (dua puluh sembilan) Desa. Dari 5 (lima) Kecamatan tersebut Kecamatan Sukamara terdiri dari 2 Kelurahan dan 6 Desa, Kecamatan Jelai terdiri dari 1 Kelurahan dan 4 Desa, Kecamatan Balai Riam terdiri dari 8 Desa, Kecamatan Pantai Lunci terdiri dari 4 Desa, serta Kecamatan Permata Kecubung terdiri dari 7 Desa. Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan pembatasan wilayah dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Sukamara**



Sumber : RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012 - 2032

Selanjutnya, ditinjau dari luas wilayah masing-masing Kecamatan, Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Pantai Lunci merupakan Kecamatan terluas, masing-masing 102.800 Ha dan 80.400 Ha, dimana luas kedua Kecamatan tersebut mencapai 47,87% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukamara, sedangkan Kecamatan Balai Riam mempunyai luas paling kecil,

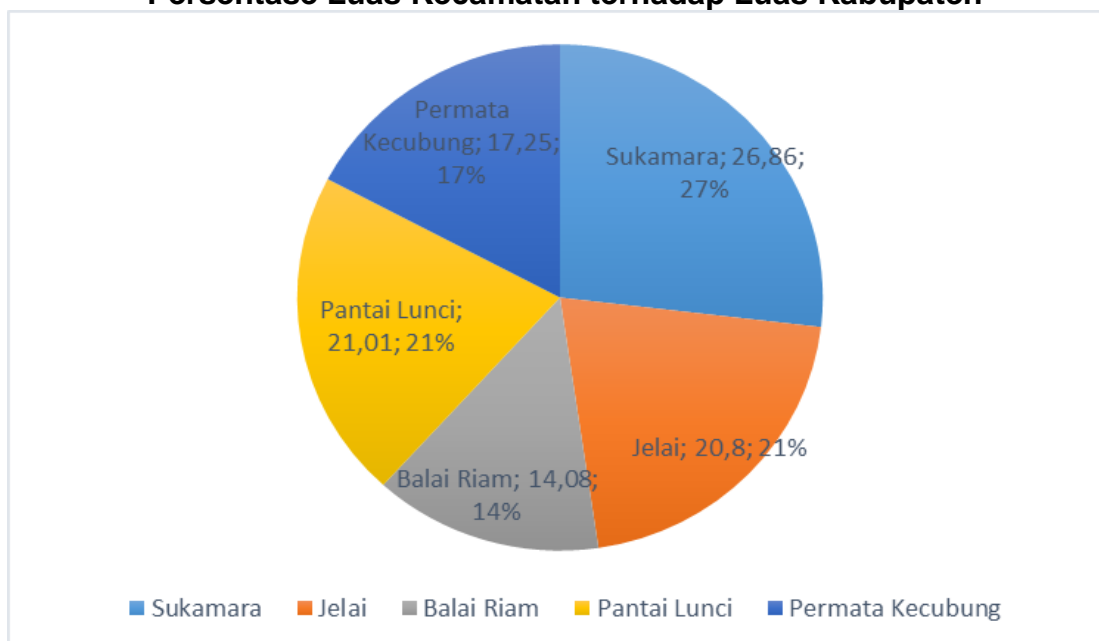
yaitu 53.900 Ha. Untuk melihat lebih jelas mengenai proporsi luas masing-masing Kecamatan terhadap luas Kabupaten Sukamara serta jumlah desa masing-masing dapat di lihat pada Tabel 1 serta Gambar 2 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )		Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
				(Km <sup>2</sup> )	(Ha)	
1	Sukamara	2	6	1.028	102.800	26,86
2	Jelai	1	4	796	79.600	20,80
3	Balai Riam	-	8	539	53.900	14,08
4	Pantai Lunci	-	4	804	80.400	21,01
5	Permata Kecubung		7	660	66.000	17,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>3.827</b>	<b>382.700</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2024

**Gambar 2**  
**Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten**



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2024

## 2) Kondisi Topografi

Kemiringan lahan dan ketinggian tempat merupakan salah satu faktor penentu kesesuaian lokasi untuk investasi/budidaya pertanian dalam arti luas. Setiap tanaman memerlukan kemiringan dan ketinggian tempat yang sesuai agar dapat berproduksi maksimal. Wilayah Kabupaten Sukamara mempunyai profil wilayah secara topografi cukup beragam, bagian selatan yaitu di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, kelas kemiringan lahannya berada pada interval 0-2% dengan klasifikasi datar. Pada bagian tengah, yaitu Kecamatan Sukamara didominasi kelas kemiringan lahan 2-15%, datar - landai. Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung mempunyai kelas kemiringan lahan yang

berada pada interval 2 - 15% dan 15-40%, dengan kelas datar - landai dan agak curam - curam. kelas kemiringan lahan dan sebarannya pada Kabupaten Sukamara dapat di lihat dalam Tabel 2 dan ketinggian lahannya pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 2**  
**Kelas Kemiringan Lahan dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara**

No	Kecamatan	Kemiringan Lahan (%)					Luas (Km <sup>2</sup> )
		0 - 2	2 - 8	8 - 15	15 - 25	> 60	
1	Jelai	32.900	1.998	-	-	-	34.880
2	Pantai Lunci	78.745	9.487	-	-	-	88.233
3	Sukamara	61.306	37.887	-	-	-	99.193
4	Balai Riam	4.484	18.652	277	150	-	23.565
5	Permata Kecubung	9.141	63/982	37.887	2.252	134	80.126
<b>Luas (Ha)</b>		<b>186.578</b>	<b>132.008</b>	<b>4.894</b>	<b>2.403</b>	<b>134</b>	<b>326.018</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032

**Tabel 3**  
**Ketinggian Wilayah dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara**

No	Kecamatan	Ketinggian Lahan (m dpl)				Luas	
		0 - 7	7 - 25	25 - 100	>100	Ha	(%)
1	Jelai	499,22	36,56	-	-	535,77	14
2	Pantai Lunci	270,79	741,57	-	-	1.012,36	26,45
3	Sukamara	356,28	770.97	-	-	1.127,25	29,46
4	Balai Riam	0	245,06	128,62	-	373,69	9,76
5	Permata Kecubung	0	92,84	685,09	-	777,93	20,33
<b>Luas (Ha)</b>		<b>1.126,28</b>	<b>971,55</b>	<b>1.729,17</b>	<b>-</b>	<b>3.827</b>	<b>-</b>
<b>(%)</b>		<b>29,43</b>	<b>25,39</b>	<b>45,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032

Pada tabel 3 di atas dapat di lihat dari segi ketinggian wilayah terhadap permukaan air laut, maka sekitar 29,43% wilayah Kabupaten Sukamara, berada pada ketinggian 0 - 7 m dpl. Daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan penggunaan lahan yang cocok adalah untuk tambak, kelapa dalam, mangrove/konservasi pantai dan sawah, yang kesemuanya tergantung pada parameter fisik dan kimia tanah masing-masing. Sedangkan daerah lainnya yang terletak pada ketinggian 7 - 100 m dpl sekitar 60% peruntukan penggunaannya cocok untuk perkebunan, pertanian tanah kering dan sawah tadah hujan.

### 3) Geologi

Berdasarkan peta geologi lembar tahun 1995, wilayah Kabupaten Sukamara terbentuk dari batuan endapan dan batuan beku yang terbentuk pada masa tersier dan kuarter. Daerah tengah dan hulu terbentuk dari batuan endapan dan batuan beku. Daerah pesisir secara geologis terbentuk dari proses endapan-endapan dari sungai serta proses pasang surut dan pengaruh laut. Secara rinci, Kabupaten Sukamara secara geologi dapat diklasifikasikan menjadi:

#### 3.1 Dataran Rendah Endapan Pantai

Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2 – 5 Km dari pantai. Terbentuk dari hasil pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan



memiliki tekstur kasar. Wilayah ini umumnya masih sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

### 3.2 Dataran Rendah Endapan Sungai

Wilayah ini terdapat di tepi sungai yang kelok-kelok (meander) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan bahkan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Wilayah ini mayoritas terletak disepanjang muara Sungai Jelai. Seperti halnya dataran rendah endapan pantai, seluruh wilayah dataran rendah termasuk dataran rendah endapan sungai, sedikit banyak masih dipengaruhi oleh siklus pasang surut air laut.

### 3.3 Lahan Gambut

Wilayah ini terletak dibelakang wilayah endapan sungai (levee), yang terbentuk akibat hutan rawa monoton yang telah mencapai klimaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (dome). Lahan gambut ini dapat dijumpai di daerah sepanjang Sungai Jelai dan Pantai Lunci.

### 3.4 Dataran Rendah Batuan Endapan Pantai

Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama disekitar Sungai Jelai dan di sebelah selatan Kota Sukamara. Dataran ini membentang dari Sukamara hingga ke Pantai Lunci. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.

### 3.5 Pegunungan/Perbukitan Batuan Intrusi Masam

Wilayah ini merupakan daerah patahan dan lipatan (fold), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh bahan endapan pasir dan liat, dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya asam.

## 4) Jenis Tanah

Untuk jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 Ordo Tanah, yaitu Histosol, Entisol, Inceptisol, Ultisol, dan Spodosol.

## 5) Hidrologi

### 5.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai ini memiliki daerah tangkapan dengan luas area kurang lebih 379.000 Ha, yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sukamara, serta sebagian berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. DAS Jelai ini mempunyai anak sungai yang tangkapan airnya berasal dari wilayah Kabupaten Sukamara yaitu Sungai Mapam. Sungai Jelai yang melintasi Kabupaten Sukamara (wilayah Kecamatan Sukamara dan Jelai) kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar rata-rata 100 meter dengan pola drainase berkelok-kelok (anastomic). Sedangkan Sungai Mapam yang muaranya tepat di depan Kota Sukamara (merupakan percabangan dari sungai utama Sungai Jelai) memiliki panjang 120 Km berhulu di wilayah Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung.

## 5.2 Kualitas Air

Secara umum kondisi air permukaan yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Sukamara berwarna coklat kemerahan, tingkat keasaman tinggi (pH rendah) dengan nilai rata-rata 6 dan berwarna keruh serta kecerahan rendah. Pada beberapa lokasi pengaruh ini mencapai sekitar 100 meter. Air ini bersumber dari kawasan rawa yang berada di bagian hulu. Pergerakan massa air permukaan sangat dipengaruhi oleh pasang surut harian. Hal ini lebih jelas terlihat, bahwa ketika surut maka aliran air permukaan relatif sangat dangkal. Warna coklat kemerahan air permukaan sangat dipengaruhi oleh keberadaan kawasan gambut yang banyak ditumbuhi dengan vegetasi berupa pakis dan paku-pakuan.

## 5.3 Air Tanah

Berdasarkan hasil studi “Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, potensi air tanah di Kabupaten Sukamara dibagi 3 zona untuk potensi air tanahnya yaitu (Sumber: Dalam Buku Rencana RT/RW Kabupaten Sukamara 2012-2032, Tahun 2011) :

Potensi air tanah sangat tinggi, umumnya terletak pada daerah sepanjang sungai besar yaitu: Sungai Jelai. Potensi air yang besar ini terletak dari bantaran sungai sampai beberapa kilometer dari bantaran sungai ke bagian Barat dan Timur;

Potensi air tanah tinggi, yang terdapat setelah daerah potensi air tanah sangat tinggi berangsur-angsur potensi air tanah berkurang sampai potensi air tanah yang tinggi; dan

Potensi air tanah rendah dimana merupakan daerah yang agak menjauhi sungai-sungai besar atau diantara dua sungai dan dataran selatan dari Pegunungan Schwar.

## 6) Sumber Daya Hutan

Kondisi sumber daya hutan yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Seluas  $\pm 15.300.000$  Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan, kawasan hutan di Kabupaten Sukamara adalah terdiri atas Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi (HPK), Kawasan Suaka Alam (KSA), Area Penggunaan Lainnya (APL), dan Tubuh Air. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya kawasan hutan di Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

**Tabel 4**  
**Sumber Daya Hutan Kabupaten Sukamara**

No	Peruntukan Kawasan	Luas (ha)
1	Hutan Produksi (HP)	137.522,01
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	21.892,69
3	Hutan Produksi Konversi (HPK)	68.692,80

No	Peruntukan Kawasan	Luas (ha)
4	Kawasan Suaka Alam (KSA)	30.952,80
5	Area Penggunaan Lainnya (APL)	68.557,31
6	Tubuh Air	459,19

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012

## 7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah wujud penggunaan lahan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya interaksi manusia dengan lahan akan terbentuk pola penggunaan dan intensitas penggunaan lahan. Identifikasi penggunaan lahan erat kaitannya dengan tingkat efisiensi pemanfaatan lahan dan kerusakan lahan. Tabel 5 berikut menampilkan informasi tentang tutupan lahan Kabupaten Sukamara:

**Tabel 5**  
**Tutupan Lahan Kabupaten Sukamara**

No	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
1	Rawa	137.984,27
2	Tanah Terbuka	59.384,41
3	Tambak/Empang	473,90
4	Perkebunan	34.817,35
5	Tegalan/Ladang	660,37
6	Semak/Belukar	8.064,16
7	Permukiman	2.359,03
8	Kebun Campuran	48.758,45
9	Tubuh Air	189,67
10	Hutan Lahan Kering	34.491,83
<b>JUMLAH</b>		<b>327.183,44</b>

Sumber: Buku Rencana RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032

## 8) Potensi Pengembangan Wilayah

Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing serta Rencana Tata Ruang Wilayah pada skala yang lebih tinggi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara adalah rencana tata ruang dari wilayah Kabupaten Sukamara yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Dengan kata lain, di dalamnya juga terdapat alokasi penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Alokasi ruang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang, membentuk hubungan yang erat antar pusat-pusat permukiman, dan terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang serasi antara kegiatan budidaya dan konservasi. Rencana tata ruang menjadi acuan dalam memberikan izin yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

Selanjutnya, rencana pola ruang Kabupaten Sukamara meliputi pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budidaya. Pola ruang kawasan lindung meliputi : 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya yang mencakup kawasan bergambut dan kawasan

resapan air; 2) kawasan perlindungan setempat yang mencakup kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau baik yang privat maupun publik; 3) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang mencakup SM Sungai Lamandau dan cagar budaya Kota Lama; 4) kawasan rawan bencana yang mencakup kawasan rawan abrasi, rawan gelombang pasang, rawan banjir serta rawan kebakaran hutan/lahan; dan 5) kawasan lindung lainnya yang mencakup kawasan terumbu karang dan kawasan hutan bakau/mangrove. Sedangkan pola ruang kawasan budidaya meliputi 1) kawasan hutan produksi; 2) kawasan hutan rakyat; 3) kawasan peruntukan pertanian; 4) kawasan peruntukan perikanan; 5) kawasan peruntukan pertambangan; 6) kawasan peruntukan industri; 7) kawasan peruntukan pariwisata; dan 8) kawasan peruntukan permukiman.

### c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara berdasarkan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jumlah KK, dan Jenis Kelamin sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara, Desember 2024**

Kecamatan/kelurahan/desa	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
	L	P	
<b>Kecamatan Sukamara</b>	<b>16.853</b>	<b>15.320</b>	<b>32.173</b>
Kelurahan Mendawai	5.653	5.396	11.049
Kelurahan Padang	3.426	3.143	6.569
Desa Natai Sedawak	1.459	1.318	2.777
Desa Pudu	980	898	1.878
Desa Kartamulia	3.455	2.909	6.364
Desa Sukaraja	350	327	677
Desa Pangkalan Muntai	1.047	926	1.973
Desa Petarikan	483	403	886
<b>Kecamatan Jelai</b>	<b>3.024</b>	<b>2.829</b>	<b>5.853</b>
Kelurahan Kuala jelai	1.943	1.871	3.814
Desa Pulau Nibung	539	470	1.009
Desa Sungai Baru	206	179	385
Desa Sungai Bundung	126	112	238
Desa Sungai Raja	210	197	407
<b>Kecamatan Balai Riam</b>	<b>6.539</b>	<b>5.991</b>	<b>12.530</b>
Desa Jihing	616	579	1.195
Desa Air Dua	294	291	585
Desa Lupu Peruca	572	503	1.075
Desa Balai Riam	981	866	1.847
Desa Pempaning	127	132	259
Desa Sekuningan Baru	1.292	1.131	2.423
Desa Bangun Jaya	1.704	1.575	3.279
Desa Bukit Sungkai	953	914	1.867
<b>Kecamatan Pantai Lunci</b>	<b>3.614</b>	<b>3.370</b>	<b>6.984</b>
Desa Sungai Damar	850	778	1.628
Desa Sungai Tabuk	452	453	905
Desa Sungai Cabang Barat	1.284	1.212	2.496
Desa Sungai Pasir	1.028	927	1.955
<b>Kecamatan Permata Kecubung</b>	<b>5.116</b>	<b>4.578</b>	<b>9.694</b>
Desa Kenawan	353	315	668
Desa Laman Baru	469	412	881
Desa Ajang	961	900	1.861
Desa Semantun	1.023	899	1.922
Desa Nibung Terjun	624	538	1.162
Desa Natai Kondang	928	842	1.770
Desa Sembikuan	758	672	1.430
<b>Jumlah</b>	<b>35.146</b>	<b>32.088</b>	<b>67.234</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kabupaten Sukamara Bulan Desember 2024

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 3 (tiga) Kelurahan dan 29 (dua puluh sembilan) Desa. Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukamara dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukamara, Desember 2024**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun Pembentukan
1.	Sukamara	Kelurahan Mendawai Kelurahan Padang Desa Natai Sedawak Desa Pudu Desa Kartamulia Desa Sukaraja Desa Pangkalan Muntai Desa Petarikan	Merupakan Kecamatan pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat, dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Balai Riam	Desa Balai Riam Desa Pempaning Desa Lupu Peruca Desa Jihing Desa Air Dua Desa Bukit Sungkai Desa Sekuningan Baru Desa Bangun Jaya	sda
3.	Jelai	Kelurahan Kuala Jelai Desa Pulau Nibung Desa Sungai Baru Desa Sungai Bundung Desa Sungai Raja	sda
4.	Permata Kecubung	Desa Ajang Desa Semantun Desa Nibung Terjun Desa Laman Baru Desa Kenawan Desa Natai Kondang Desa Sembikuan	Merupakan Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Balai Riam. Kabupaten Sukamara awalnya hanya terdiri dari 3 Kecamatan, kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung Dan Kecamatan Pantai Lunci Di Kabupaten Sukamara
5.	Pantai Lunci	Desa Sungai Cabang Barat Desa Sungai Pasir Desa Sungai Tabuk Desa Sungai Damar	sda

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara

**e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sukamara**

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara
8.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara
14.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara
19.	Dinas Perikanan	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Peraturan Bupati Sukamara Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara
20.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara
26.	Kecamatan Sukamara	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
27.	Kecamatan Balai Riam	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
28.	Kecamatan Permata Kecubung	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
29.	Kecamatan Jelai	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
30.	Kecamatan Pantai Lunci	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
31.	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara
32.	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara
33.	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara
34.	UPT Pengelolaan Sampah Kelas A	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara
35.	UPT Balai Latihan Kerja Kelas A	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara
36.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara

**f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah**

Aparatur Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 2.217 orang yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sukamara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun komposisi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	17	18	43	78
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	6	5	13	24
3.	Inspektorat Daerah	Unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	7	23	1	31
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan	11	798	33	842
5.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	7	243	32	282
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	12	20	59	91
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran	10	55	1	66
8.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	6	8	11	25
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	6	4	7	17
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi	8	7	6	21
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian	9	38	17	64
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	8	10	6	24
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	6	10	4	20
14.	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	10	2	13	25
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	6	6	10	22
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta bidang perindustrian	7	8	9	24
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	7	8	8	23
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan	4	6	4	14
19.	Dinas Perikanan	Urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan	6	9	14	29
20.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, serta bidang Pariwisata	6	8	9	23
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan	6	10	10	26
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan	23	7	23	53



No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi penunjang kepegawaian, serta fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan	6	7	13	26
24.	Rumah Sakit Umum Daerah	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	11	209	12	232
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sub urusan penanggulangan bencana	5	0	9	14
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	5	3	8	16
27.	Kecamatan Sukamara	Unsur Kewilayahan	9	0	7	16
28.	Kecamatan Balai Riam	Unsur Kewilayahan	8	0	8	16
29.	Kecamatan Permata Kecubung	Unsur Kewilayahan	9	0	9	18
30.	Kecamatan Jelai	Unsur Kewilayahan	6	0	9	15
31.	Kecamatan Pantai Lunci	Unsur Kewilayahan	8	0	66	14
32.	Kelurahan Mendawai	Unsur Kewilayahan	5	0	7	12
33.	Kelurahan Padang	Unsur Kewilayahan	5	0	3	8
34.	Kelurahan Kuala Jelai	Unsur Kewilayahan	3	0	3	6
<b>Jumlah</b>			<b>268</b>	<b>1.522</b>	<b>487</b>	<b>2.217</b>

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Tahun 2024

## g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, realisasi pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari penetapan arah kebijakan pengelolaan keuangan baik kebijakan sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan berbagai asumsi-asumsi makro dan mikro ekonomi yang dipakai saat penyusunan anggaran tahun 2024.

Secara garis besar kinerja keuangan merupakan cerminan dari kinerja kolektif dari seluruh sektor dan unit kerja entitas pelaporan. Seluruh upaya yang dilakukan pada sektor dan atau unit dalam mengelola sumber daya pada akhirnya menuju ke satu tujuan yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Sebagai cerminan sebagian akan bermuara ke laporan keuangan. Jadi kinerja keuangan mencerminkan kinerja entitas pelaporan secara keseluruhan.

### g.1 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Sukamara terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Pendapatan Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 974.864.479.986,00,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan akhir tahun 2024 realisasinya sebesar Rp. 960.794.760.852,70 atau 98,56%. Target dan realisasi pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>47.039.779.908,00</b>	<b>46.340.723.172,70</b>	<b>98,51</b>
4.1.01	Pajak Daerah	11.050.600.000,00	14.181.644.783,16	128,33
4.1.02	Retribusi Daerah	27.651.248.716,00	19.905.196.431,65	71,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.540.212.049,00	3.564.342.878,50	140,32
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.797.719.143,00	8.689.539.079,39	149,88
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>927.824.700.078,00</b>	<b>914.454.037.680,00</b>	<b>98,56</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	889.518.470.031,00	876.992.782.145,00	98,59
4.2.01.01	Dana Perimbangan	849.239.367.031,00	836.713.679.145,00	98,53
4.2.01.02	Dana insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	26.854.892.000,00	26.854.892.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	97,79
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	97,79
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00

Sumber: LRA sampai dengan 31 Desember 2024 (Unaudited)

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hingga akhir tahun 2024, dari rencana sebesar Rp

47.039.779.908,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.340.723.172,70 atau 98,51%. Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp. 11.050.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.181.644.783,16 atau 128,33%

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh SKPD, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 27.651.248.716,00 Realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp. 19.905.196.431,65 atau sebesar 71,99%.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 2.540.212.049,00 dan hingga akhir tahun 2024 dapat direalisasikan Rp. 3.564.342.878,50 atau sebesar 140,32%

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD. Direncanakan sebesar Rp. 5.797.719.143,00 hingga akhir tahun 2024, realisasinya sebesar Rp. 8.689.539.079,39 atau sebesar 149,88%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Secara keseluruhan pendapatan dari Pendapatan Transfer pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 914.454.037.680,00 dengan realisasi Rp. 927.824.700.078,00 atau sebesar 98,56%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 tidak ada dianggarkan.

## g.2 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja daerah, yaitu: 1) Belanja Operasi, 2) Belanja Modal, 3) Belanja Tidak Terduga, dan 4) Belanja Transfer. Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar 91,94% dari target yang telah ditetapkan. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.084.316.973.298,00</b>	<b>996.905.458.011,46</b>	<b>91,94</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>631.153.977.539,00</b>	<b>566.375.683.203,07</b>	<b>89,74</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	285.886.279.221,00	272.951.447.705,00	95,48
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.772.325.265,00	221.412.228.694,85	82,38
5.1.04	Belanja Subsidi	3.342.452.750,00	3.277.727.986,00	98,06
5.1.05	Belanja Hibah	70.435.879.803,00	66.042.296.317,22	93,76
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.717.040.500,00	2.691.982.500,00	99,08
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>352.411.325.817,00</b>	<b>334.778.104.866,39</b>	<b>95,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.181.419.360,00	14.161.455,00	1,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.932.360.004,00	42.328.531.433,00	88,31
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.729.700.574,00	106.407.146.676,39	94,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	188.934.811.211,00	185.110.102.402,00	97,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.558.034.668,00	843.456.000,00	54,14
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.706.900,00	99,61
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>95.751.669.942,00</b>	<b>95.751.669.942,00</b>	<b>100,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.327.669.942,00	94.327.669.942,00	100,00

Sumber: LRA sampai dengan 31 Desember 2024 (Unaudited)

Selanjutnya Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.084.316.973.298,00 dengan realisasinya sebesar Rp 996.905.458.011,46 atau 91,94%. Belanja daerah terdiri dari Belanja Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 631.153.977.539,00 dan terealisasi sebesar Rp 566.375.683.203,07 atau sebesar 89,74%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 352.411.325.817,00 dan terealisasi sebesar Rp 334.778.104.866,39 atau sebesar 95,00%. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 95.751.669.942,00 dan terealisasi sebesar Rp 95.751.669.942,00 atau sebesar 100,00%.

## g.3 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan pencairan dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal.

**Tabel 12**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>109.452.493.312,00</b>	<b>110.617.225.539,04</b>	<b>101,06</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>131.162.493.312,00</b>	<b>132.327.225.539,04</b>	<b>100,89</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114.391.050.912,00	114.201.322.276,44	99,83
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	16.771.442.400,00	18.125.903.262,60	108,08
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.710.000.000,00</b>	<b>21.710.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>109.452.493.312,00</b>	<b>110.617.225.539,04</b>	<b>101,06</b>

Sumber: LRA sampai dengan 31 Desember 2024 (Unaudited)

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 131.162.493.312,00 dengan realisasi sebesar Rp 132.327.225.539,04 (100,89%). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 21.710.000.000,00 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar yaitu Rp 21.710.000.000,00 (100,00%) yang direalisasikan untuk menambah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### g.4 Neraca Keuangan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu neraca. Neraca keuangan daerah disajikan pada Tabel 14 di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>2.739.216.146.577,22</b>	<b>2.625.220.127.794,24</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>77.049.184.982,28</b>	<b>134.474.936.295,11</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	74.510.571.698,92	114.391.538.047,08
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	65.944.543.858,40	109.486.343.742,88
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	143.179.891,00	41.360,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	70.000,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	734.921.823,91	4.078.454.361,39
1.1.01.05	Kas Dana BOS	75.684.449,21	75.684.621,21
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	13.442.537,40	129.509.822,60
1.1.01.07	Kas Lainnya	621.504.139,00	621.504.139,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	6.977.225.000,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	2.791.186.241,00	2.791.186.241,00
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	1.264.500,00	1.264.500,00
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	28.572.500,00	28.572.500,00
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000,00	12.000,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.761.337.241,00	2.761.337.241,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	2.588.405.549,04	2.590.405.549,04
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	531.409.699,04	531.409.699,04
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.056.995.850,00	2.058.995.850,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.956.867.162,11	1.956.867.162,11
1.1.06.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	997.839.384,05	997.839.384,05
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	740.677.689,84	740.677.689,84
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	218.350.088,22	218.350.088,22
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.509,00	3.509,00
1.1.07.01	Piutang Dana Perimbangan	3.509,00	3.509,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	6.267.935.260,00
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	0,00	6.267.935.260,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.879.942.677,79)	(4.881.942.677,79)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.879.942.677,79)	(4.881.942.677,79)



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	3.084.000,00
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	0,00	3.084.000,00
1.1.12	Persediaan	82.093.500,00	11.355.859.204,67
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	82.093.500,00	11.355.859.204,67
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	(931.661.164.896,50)	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	(931.661.164.896,50)	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, LKPD Tahun 2024 (Unaudited)

#### h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Program yang dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>186.040.621.495,00</b>	<b>180.283.928.050,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.385.136.219,00	106.287.909.379,00
b	Program Pengelolaan Pendidikan	76.447.735.276,00	73.880.638.671,00
c	Program Pengembangan Kurikulum	101.100.000,00	45.105.000,00
d	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	106.650.000,00	70.275.000,00
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>164.511.991.860,00</b>	<b>144.746.862.580,68</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92.439.307.821,00	80.923.412.090,68
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69.079.379.999,00	61.543.012.682,00
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.085.201.400,00	1.551.235.231,00
d	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	305.361.000,00	229.956.827,00
e	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	602.741.640,00	499.245.750,00
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>215.361.828.057,00</b>	<b>207.207.752.539,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.507.381.275,00	16.893.937.594,00
b	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	17.453.057.176,00	16.105.889.248,00
c	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.481.260.000,00	20.262.013.178,00
d	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.890.000.000,00	1.853.998.640,00
e	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.188.740.000,00	11.115.112.700,00
f	Program Penataan Bangunan Gedung	193.500.000,00	180.220.400,00
g	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	17.025.480.000,00	14.871.964.722,00
h	Program Penyelenggaraan Jalan	126.648.192.366,00	124.312.313.125,00
i	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	514.999.240,00	269.989.803,00
j	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.459.218.000,00	1.342.313.129,00
<b>4</b>	<b>Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>20.017.733.000,00</b>	<b>19.948.518.174,00</b>
a	Program Pengembangan Perumahan	109.600.000,00	109.300.000,00
b	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.617.550.000,00	1.613.883.120,00
c	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	18.290.583.000,00	18.225.335.054,00
<b>5</b>	<b>Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>19.066.944.465,00</b>	<b>16.736.637.947,21</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.453.088.255,00	12.334.854.404,56
b	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	756.227.000,00	676.503.725,00
c	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.901.725.258,00	1.705.239.449,65
d	Program Penanggulangan Bencana	2.955.903.952,00	2.020.040.368,00
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	<b>14.315.376.695,00</b>	<b>13.214.346.836,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.990.946.145,00	6.591.891.015,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
b	Program Pemberdayaan Sosial	125.000.000,00	73.146.700,00
c	Program Rehabilitasi Sosial	3.778.602.350,00	3.599.372.676,00
d	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.916.920.500,00	1.807.187.755,00
e	Program Penanganan Bencana	1.396.160.000,00	1.035.336.990,00
f	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.747.700,00	107.411.700,00
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>7.709.355.031,00</b>	<b>7.099.504.799,80</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.347.148.450,00	5.833.728.978,80
b	Program Perencanaan Tenaga Kerja	40.346.500,00	21.215.000,00
c	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	578.866.541,00	524.295.439,00
d	Program Penempatan Tenaga Kerja	540.435.788,00	534.268.972,00
e	Program Hubungan Industrial	202.557.752,00	185.996.410,00
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>	<b>5.438.511.322,00</b>	<b>5.040.911.391,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.669.621.872,00	4.384.619.933,00
b	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	492.257.200,00	431.599.075,00
c	Program Perlindungan Perempuan	63.650.600,00	61.400.000,00
d	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	136.186.400,00	94.127.100,00
e	Program Perlindungan Khusus Anak	76.795.250,00	69.165.283,00
<b>9</b>	<b>Pangan</b>	<b>15.614.726.363,00</b>	<b>14.147.938.824,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.683.125.109,00	13.367.986.788,00
b	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	6.464.600,00	6.074.000,00
c	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	877.431.134,00	736.110.870,00
d	Program Penanganan Kerawanan Pangan	28.909.020,00	20.039.260,00
e	Program Pengawasan Keamanan Pangan	18.796.500,00	17.727.906,00
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>910.047.122,00</b>	<b>691.511.814,00</b>
a	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	232.677.122,00	210.930.554,00
b	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	339.898.000,00	200.543.750,00
c	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	83.070.000,00	75.566.745,00
d	Program Penetapan Tanah Ulayat	15.562.000,00	3.940.000,00
e	Program Penatagunaan Tanah	238.840.000,00	200.530.765,00
<b>11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>14.033.119.964,00</b>	<b>13.452.867.004,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.511.548.588,00	9.168.001.470,00
b	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	499.181.800,00	473.419.475,00
c	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	128.850.701,00	78.167.585,00
d	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	643.913.898,00	596.951.982,00
e	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.350.000,00	16.158.450,00
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	12.201.000,00	11.735.335,00
g	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	24.649.865,00	23.245.700,00
h	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	119.158.407,00	115.525.582,00
i	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	23.987.500,00	22.625.000,00
j	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	41.899.425,00	41.761.125,00
k	Program Pengelolaan Persampahan	3.007.378.780,00	2.905.275.300,00
<b>12</b>	<b>Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	<b>6.798.484.844,00</b>	<b>6.272.751.942,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.415.303.844,00	5.905.137.634,00
b	Program Pendaftaran Penduduk	46.781.000,00	44.645.145,00
c	Program Pencatatan Sipil	139.600.000,00	135.657.971,00
d	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.300.000,00	155.011.192,00
e	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.500.000,00	32.300.000,00
<b>13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>2.093.380.593,00</b>	<b>1.854.530.865,00</b>
a	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.138.357.188,00	978.601.880,00
b	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	955.023.405,00	875.928.985,00
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	<b>2.637.605.230,00</b>	<b>1.789.127.894,00</b>
a	Program Pengendalian Penduduk	158.170.000,00	126.277.035,00
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.592.140.230,00	889.976.659,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
c	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	887.295.000,00	772.874.200,00
<b>15</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>16.483.997.998,00</b>	<b>15.820.913.657,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.737.484.172,00	6.512.602.627,00
b	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	8.879.943.826,00	8.445.427.030,00
c	Program Pengelolaan Pelayaran	866.570.000,00	862.884.000,00
<b>16</b>	<b>Komunikasi Dan Informatika</b>	<b>12.746.175.252,00</b>	<b>12.039.772.575,02</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.075.226.376,00	8.450.471.843,02
b	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.429.395.000,00	1.389.947.594,00
c	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.241.553.876,00	2.199.353.138,00
<b>17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>	<b>9.948.274.129,00</b>	<b>9.349.405.804,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.089.135.051,00	5.812.360.562,00
b	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	68.927.000,00	63.807.632,00
c	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	332.805.800,00	156.844.990,00
d	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	1.010.467.958,00	997.256.220,00
e	Program Pengembangan Ukm	2.446.938.320,00	2.319.136.400,00
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>5.852.176.052,00</b>	<b>5.437.403.221,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.352.845.802,00	4.990.631.366,00
b	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	90.000.000,00	90.000.000,00
c	Program Promosi Penanaman Modal	229.710.000,00	182.416.755,00
d	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.925.000,00	90.190.000,00
e	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	68.280.250,00	63.750.100,00
f	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20.415.000,00	20.415.000,00
<b>19</b>	<b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>	<b>26.411.461.686,00</b>	<b>24.897.058.686,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.290.922.146,00	6.643.164.134,00
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.945.442.500,00	1.866.994.885,00
c	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17.065.097.040,00	16.276.899.667,00
d	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	110.000.000,00	110.000.000,00
<b>20</b>	<b>Statistik</b>	<b>170.105.100,00</b>	<b>144.280.447,00</b>
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	170.105.100,00	144.280.447,00
<b>21</b>	<b>Persandian</b>	<b>37.997.500,00</b>	<b>15.436.095,00</b>
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	37.997.500,00	15.436.095,00
<b>22</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>4.412.805.842,00</b>	<b>3.747.614.710,00</b>
a	Program Pengembangan Kebudayaan	4.291.005.842,00	3.689.216.030,00
b	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	121.800.000,00	58.398.680,00
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>5.703.623.812,00</b>	<b>5.257.723.369,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.509.385.317,00	5.072.944.874,00
b	Program Pembinaan Perpustakaan	194.238.495,00	184.778.495,00
<b>24</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>125.040.020,00</b>	<b>118.913.640,00</b>
a	Program Pengelolaan Arsip	125.040.020,00	118.913.640,00
<b>25</b>	<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>19.873.244.865,00</b>	<b>19.331.126.726,99</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.778.288.901,00	5.448.540.189,00
b	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.616.912.506,00	6.493.781.560,98
c	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.510.237.399,00	5.430.973.217,01
d	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.967.806.059,00	1.957.831.760,00
<b>26</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>4.352.879.061,00</b>	<b>4.279.840.454,00</b>
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.328.500.840,00	3.294.785.409,00
b	Program Pemasaran Pariwisata	886.078.196,00	863.541.495,00
c	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	138.300.025,00	121.513.550,00
<b>27</b>	<b>Pertanian</b>	<b>14.036.015.359,00</b>	<b>12.113.445.581,23</b>
a	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.736.787.201,00	8.167.485.283,23
b	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.346.008.633,00	3.095.176.391,00
c	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	284.210.163,00	272.892.899,00
d	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	208.065.000,00	184.937.000,00
e	Program Penyuluhan Pertanian	460.944.362,00	392.954.008,00
<b>28</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>2.958.774.635,00</b>	<b>2.062.740.158,00</b>
a	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	687.415.854,00	173.071.400,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
b	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	754.675.000,00	521.596.486,00
c	Program Pengembangan Ekspor	333.245.767,00	293.425.100,00
d	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	292.000.000,00	260.790.872,00
e	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	891.438.014,00	813.856.300,00
<b>29</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>833.919.000,00</b>	<b>693.358.384,53</b>
a	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	833.919.000,00	693.358.384,53
<b>30</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>5.746.687.950,00</b>	<b>5.687.741.444,00</b>
a	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	696.979.985,00	673.126.493,00
b	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	4.999.871.245,00	4.970.899.401,00
c	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49.836.720,00	43.715.550,00
<b>31</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>74.768.245.167,00</b>	<b>69.229.755.568,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.607.173.697,00	49.020.044.331,00
b	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.430.078.535,00	12.029.981.742,00
c	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.361.662.050,00	1.865.062.533,00
d	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.369.330.885,00	6.314.666.962,00
<b>32</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>10.251.910.372,00</b>	<b>9.356.347.492,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.440.994.727,00	7.840.763.923,00
b	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.418.963.725,00	1.340.986.909,00
c	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	391.951.920,00	174.596.660,00
<b>33</b>	<b>Keuangan</b>	<b>122.301.484.861,00</b>	<b>115.058.664.238,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.196.822.755,00	12.162.195.080,00
b	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	105.017.555.637,00	99.382.974.065,00
c	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.970.253.260,00	1.757.154.718,00
d	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.116.853.209,00	1.756.340.375,00
<b>34</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>9.492.621.718,00</b>	<b>7.921.699.318,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.855.760.018,00	6.382.491.100,00
b	Program Kepegawaian Daerah	2.636.861.700,00	1.539.208.218,00
<b>35</b>	<b>Pendidikan Dan Pelatihan</b>	<b>871.496.000,00</b>	<b>602.024.763,00</b>
a	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	871.496.000,00	602.024.763,00
<b>36</b>	<b>Penelitian Dan Pengembangan</b>	<b>1.206.245.005,00</b>	<b>683.232.755,00</b>
a	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.206.245.005,00	683.232.755,00
<b>37</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	<b>12.195.121.372,00</b>	<b>10.273.149.579,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.525.214.798,00	8.641.463.573,00
b	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.886.644.230,00	1.191.199.087,00
c	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	783.262.344,00	440.486.919,00
<b>38</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>24.043.507.043,00</b>	<b>21.900.055.859,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.254.066.815,00	19.271.415.914,00
b	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	923.573.378,00	895.377.995,00
c	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.458.985.850,00	1.348.121.950,00
d	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.180.000,00	11.410.000,00
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	353.131.000,00	343.792.500,00
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.570.000,00	29.937.500,00
<b>39</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	<b>24.943.437.458,00</b>	<b>23.812.181.100,00</b>
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.885.044.925,00	3.558.234.284,00
b	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.232.747.840,00	2.062.669.480,00
c	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	17.923.442.893,00	17.786.991.653,00
d	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	107.804.000,00	107.354.000,00
e	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	794.397.800,00	296.931.683,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukamara, Realisasi APBD Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2024 (Unaudited)

### **1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Permasalahan strategis yang ada di Kabupaten Sukamara dapat diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

##### **1. Urusan Pendidikan**

Urusan Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Sukamara dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Secara khusus, mengacu kepada gambaran daerah, permasalahan urusan pendidikan di Kabupaten Sukamara banyak terdapat pada level setingkat SMP/MTs anak usia 13-15 tahun. Selain itu, permasalahan pendidikan tinggi juga perlu menjadi perhatian.

Permasalahan Urusan Pendidikan termasuk di dalamnya permasalahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian SPM:

- 1) Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan
- 2) Anak usia sejak lahir s/d 6 tahun belum semuanya terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3) Partisipasi sekolah dan partisipasi murni anak-anak usia 13-15 tahun atau setingkat SMP/MTs yang masih rendah;
- 4) Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs, rata-rata lama sekolah sekitar 8,01 tahun (2020) dan termasuk kelompok yang terendah di Kalimantan Tengah;
- 5) Kualifikasi pendidikan dan kompetensi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan) perlu ditingkatkan;
- 6) Distribusi tenaga pendidik belum merata;
- 7) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu ditingkatkan;
- 8) Akurasi dan update data pendidikan dan kebudayaan perlu ditingkatkan;
- 9) Masih perlunya peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sukamara.

Secara lebih spesifik, Isu Strategis urusan pendidikan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi Merdeka Belajar (Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Guru Penggerak);
- 2) Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### **2. Urusan Kesehatan**

Pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Sukamara juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri. Jika dilihat dari hasil yang dicapai terhadap 12



indikator SPM yang harus dipenuhi oleh daerah, hanya 1 indikator yaitu pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang telah sesuai standar 100%, sedangkan indikator yang lain perlu untuk ditingkatkan.

Permasalahan lainnya adalah pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat adalah program yang dicanangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Dalam rangka memenuhi salah satu hak pelayanan dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk.

Permasalahan urusan Kesehatan:

- 1) Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Kompetensi;
- 2) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah, ditunjukkan dengan masih adanya kasus DBD dan TBC serta meningkatnya keluhan kesehatan selama 2017-2020;
- 3) Kasus balita gizi buruk masih ada sekitar masih sebanyak 3 persen;
- 4) Masih adanya angka kematian bayi;
- 5) Kualitas lingkungan rendah, cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat rendah;
- 6) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang sesuai ketentuan;
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin edar produk pangan olahan rumah tangga sebagai jaminan keamanan produk;
- 8) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai;
- 9) Perlunya peningkatan standar kompetensi melalui pelatihan fungsional tenaga kesehatan;
- 10) Masih kurangnya sinkronisasi program Pengembangan kemasyarakatan kesehatan dengan lintas sektor terutama desa.

Secara lebih spesifik, permasalahan kesehatan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan APD dan logistik pada pelayanan bayi baru lahir belum dipersiapkan dengan baik;
- 2) Terkait permasalahan Bencana Alam yang banyak menimbulkan kerugian materiil terutama terhadap masalah Kesehatan masyarakat. Bukan hanya fasilitas Kesehatan dan sarana prasarana yang rusak tetapi dapat menimbulkan masalah Kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Dampak bencana banjir misalnya membuat minimnya akses



terhadap fasilitas air bersih, binatang perantara bibit penyakit merajalela (tikus, lalat, nyamuk dan zoonosis lainnya) yang potensial menimbulkan epidemi penyakit (malaria, demam berdarah, filariasis, chikungunya, leptospirosis, kolera, diare, dan penyakit infeksi lainnya).

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung. Penataan ruang mengatur kepastian hukum tentang pemanfaatan ruang.

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) Laju kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dari laju pembangunan;
- 2) Masih tingginya proporsi jalan yang belum diaspal berupa jalan kerikil dan jalan tanah;
- 3) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi, dalam kondisi baik sekitar 57,76 persen;
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum perlu ditingkatkan;
- 5) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang;
- 6) Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Koordinasi dan kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan terutama daerah perbatasan;
- 8) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
- 9) Ketersediaan lahan untuk keperluan pembangunan semakin terbatas;
- 10) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sukamara;
- 11) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat;
- 12) Belum maksimalnya masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan akses sanitasi yang sudah dibangun.
- 13) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan, sarana dan prasarana lingkungan perumahan

seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, dan pemakaman.

Permasalahan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- 1) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih perlu ditingkatkan;
- 2) Rumah tidak layak huni sekitar 2.813 rumah tinggal (10,21 persen);
- 3) Pelaksanaan persetujuan bangunan gedung (PBG) belum optimal;
- 4) Belum memiliki dokumen RP2KP sebagai upaya penanganan kawasan kumuh.

#### 5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Permasalahan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

- 1) Perlu upaya konsisten dan serius meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban agar tidak semakin meningkat;
- 2) Penegakan Perda belum optimal;
- 3) Kualitas berdemokrasi perlu ditingkatkan;
- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada dikarenakan belum adanya pelatihan atau pendidikan dasar tentang ketenteraman dan Ketertiban Umum maupun tentang perlindungan masyarakat;
- 5) Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda/perkada);
- 6) Dukungan sarana dan prasarana yang belum standar (Peralatan dan Perlengkapan) berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019;
- 7) Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran belum terpenuhi;
- 8) Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil perhitungan termasuk pada kategori tinggi. (Buku IRBI 2021).

#### 6. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Permasalahan urusan Sosial:

- 1) Penduduk miskin di Sukamara pada Tahun 2021 sebesar 3,66 persen mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,72 persen pada tahun 2022

dengan jumlah penduduk sebesar 2,38 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 2,48 pada tahun 2022;

- 2) Perlunya peningkatan perlindungan wanita rawan sosial ekonomi;
- 3) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai;
- 4) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 5) Pemutakhiran DTKS yang belum optimal.

#### 7. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.

Permasalahan urusan Tenaga Kerja:

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Prosentase capaian penempatan tenaga kerja yang masih di bawah target capaian;
- 4) Masih kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas;
- 5) Sarana dan Prasarana yang ada di Balai Latihan Kerja belum memadai;
- 6) UPT Balai Latihan Kerja belum memiliki ASN instruktur yang bersertifikat;
- 7) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.

#### 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumber daya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun kesenjangan tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas.

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 1) Masih terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
- 3) Indeks pemberdayaan gender (IPG) masih di bawah provinsi dan nasional;
- 4) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- 5) Rendahnya bantuan dan advokasi hukum pada Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum;

- 6) Masih kurangnya perlindungan anak terhadap pengaruh negatif lingkungan.

#### 9. Urusan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan suatu wilayah sampai dengan perseorangan, tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri dari tiga subsistem yaitu ketersediaan jumlah, keamanan dan keterjangkauan harga, untuk dapat meningkatkan kualitas SDM.

Permasalahan urusan Pangan:

- 1) Diversifikasi dan ketersediaan pangan masih perlu ditingkatkan;
- 2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 3) Pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan belum optimal;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan lokal masih rendah;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan;
- 6) Pengelolaan lumbung dan cadangan pangan belum ada.

#### 10. Urusan Pertanahan

Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sukamara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program PTSL.

Permasalahan urusan Pertanahan:

- 1) Belum semua tanah bersertifikat dan belum semua tanah sertifikat sesuai dengan peruntukannya dan atau penggunaannya;
- 2) Sulitnya pengendalian penggunaan lahan, antara lain disebabkan karena persepsi masyarakat bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri;
- 3) Belum mengimplementasikan penentuan lahan sawah berkelanjutan dan mengukur ketersediaan lahan sawah berkelanjutan;
- 4) Data base pertanahan secara detail masih belum akurat;
- 5) Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memerlukan lahan clean and clear yang berdampak pada keperluan pengadaan tanah, sementara proses pengadaan tanah sangat memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar;

- 6) Pemerintah Kabupaten Sukamara yang masih belum memiliki sistem database pertanahan yang baik dan memadai, sehingga seringkali berpotensi terjadi sengketa tanah hak dan garapan;
- 7) Potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang bersumber dari ketidakjelasan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat.

#### 11. Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan di Kabupaten Sukamara secara umum masih cukup baik. Ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hampir semua parameter masih di bawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGMRI) dan stakeholder swasta lainnya dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Sukamara.

Permasalahan urusan Lingkungan Hidup:

- 1) Potensi kekeringan, lahan kritis, abrasi dan sedimentasi pada daerah tangkapan pantai dan sungai;
- 2) Potensi kerusakan ekosistem Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai;
- 3) Regulasi dan administrasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
- 4) Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan serta pelayanan persampahan belum memadai;
- 5) Potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi;
- 6) Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan;
- 7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA) masih perlu mendapatkan perhatian untuk menghindari tingginya tingkat pencemaran di Kabupaten Sukamara;

#### 12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukamara dipengaruhi oleh kelahiran/kematian dan migrasi dari daerah lain. Hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit.

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- 1) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
- 2) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.

#### 13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk

berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- 1) Rendahnya kompetensi SDM Perangkat Desa dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa;
- 2) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;
- 3) Belum optimalnya peran BUMDes dalam mendorong aktivitas ekonomi perdesaan;
- 4) Pemerintah desa belum mampu menggali potensi sumber daya yang ada di desa secara maksimal untuk meningkatkan PADES.

#### 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sukamara cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 3) Pengetahuan masyarakat terkait dengan Keluarga Berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas SDM masih belum optimal;
- 4) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha
- 5) Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal.

#### 15. Urusan Perhubungan

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Permasalahan urusan Perhubungan:

- 1) Sarana dan prasarana transportasi darat maupun air belum memadai;
- 2) Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;



- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan;
- 4) Belum terbenahinya muara laut sebagai sarana jalur lalu lintas laut dan angkutan;
- 5) Belum adanya kajian DLKr dan DLKp guna pengoperasionalan sebagai operator di Pelabuhan Jelai Pengumpuan Lokal;
- 6) Kurangnya kelengkapan fasilitas keselamatan transportasi darat.

#### 16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permasalahan urusan Komunikasi dan Informasi:

- 1) Integrasi sistem informasi pelayanan publik masih rendah;
- 2) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- 3) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka implementasi e-government;
- 4) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia IT masih belum memadai.

#### 17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Secara umum, permasalahan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah masih rendahnya jumlah koperasi di Kabupaten Sukamara dengan hanya 10 koperasi dan menjadi kabupaten dengan jumlah koperasi terendah nomor 2 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

- 1) Perlu peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian
- 2) Kabupaten Sukamara;
- 3) Daya saing produk UMKM masih perlu ditingkatkan;
- 4) Akses modal bagi UMKM masih terbatas

#### 18. Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi sebagian besar ditopang dengan besarnya kontribusi sektor kelapa sawit yang berkelanjutan karena tingginya ekspor Minyak CPO yang dihasilkan dari Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sukamara.

Permasalahan urusan Penanaman Modal:

- 1) Promosi potensi investasi belum optimal;

- 2) Kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha masih rendah yang berkaitan dengan laporan realisasi investasi.

#### 19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai oleh pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga:

- 1) Perlunya peningkatan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan khususnya di bidang kewirausahaan;
- 2) Pemuda masih rawan terpengaruh masalah sosial seperti narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
- 3) Sarana dan prasarana kepemudaan belum memadai yaitu belum memiliki pondok pemuda dan stadion dan hanya memiliki satu gelanggang serta lima buah gedung olahraga se-Kabupaten;
- 4) Pemberdayaan dan pengembangan karakter pemuda belum optimal;
- 5) Pengkaderan Olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi belum optimal.

#### 20. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah.

Permasalahan urusan Statistik:

- 1) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;
- 2) Kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan SDM pengelola data dan statistik masih belum memadai.

#### 21. Urusan Persandian

Persandian adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian, perumusan kebijakan teknis di bidang persandian, dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang persandian.

Permasalahan urusan Persandian:

- 1) Belum maksimalnya tata kelola pengamanan informasi serta manajemen keamanan komunikasi dan informasi lingkup Pemerintah Daerah;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terlatih dan tersertifikasi di bidang manajemen keamanan komunikasi serta informasi Pemerintah Daerah belum memadai;
- 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam hal mendukung manajemen Keamanan Komunikasi Dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 4) Belum terbentuknya *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) lingkup Pemerintah Daerah sebagai penunjang keamanan serta keandalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## 22. Urusan Kebudayaan

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, sebagai aset daerah yang bernilai tinggi.

Permasalahan urusan Kebudayaan:

- 1) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- 2) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- 3) Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan Seni Budaya Daerah;

Secara lebih spesifik, Isu Strategis urusan Kebudayaan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah Penyelenggaraan Festival dan Fasilitas Kebudayaan (Seni, Budaya, Potensi Budaya).

## 23. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan urusan Perpustakaan adalah dalam pengelolaan perpustakaan guna peningkatan IPM masih belum optimal.

## 24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. Permasalahan urusan Kearsipan adalah dalam pengelolaan kearsipan untuk menjawab tuntutan teknologi belum memadai.

## 25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Secara geografis Kabupaten Sukamara mempunyai wilayah perairan laut dan perairan sungai yang potensial untuk perkembangan sektor perikanan, akan tetapi pertumbuhan komoditas perikanan termasuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk produksinya masih belum optimal.

Permasalahan urusan Kelautan dan Perikanan:

- 1) Tata guna dan tata kelola perikanan yang berkelanjutan masih belum optimal;
- 2) Sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan belum optimal;
- 3) Peran kelembagaan petani pembudidaya belum optimal;
- 4) Akses permodalan pelaku usaha sektor perikanan masih kurang;
- 5) Diversifikasi dan inovasi produk olahan hasil perikanan masih perlu ditingkatkan.

- 6) Perlu adanya sistem pengolahan perikanan yang berkelanjutan.
- 7) Masih minimnya sarana prasarana untuk pelaku usaha sektor perikanan.
- 8) Potensi perikanan budidaya yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
- 9) Minimnya sarana dan prasarana Penanganan pasca panen baik untuk produksi tangkap maupun budidaya.

## 26. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sukamara menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan.

Permasalahan urusan Pariwisata:

- 1) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih perlu ditingkatkan;
- 2) Pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;
- 3) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

## 27. Urusan Pertanian

Permasalahan urusan Pertanian:

- 1) Produksi tanaman pangan utama menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun dikarenakan intensifikasi pertanian masih belum dilaksanakan dengan optimal;
- 2) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
- 3) Pemberdayaan kelembagaan pertanian masih perlu ditingkatkan;
- 4) Pengelolaan peternakan masyarakat masih secara semi intensif;
- 5) Produktivitas sawit rakyat yang menurun;
- 6) Kurangnya Hijauan Pakan Ternak (HMT) untuk mendukung Food Estate (protein);
- 7) Kuantitas dan kualitas SDM Peternakan masih belum memadai;

## 28. Urusan Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sukamara sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi guna menyelamatkan sumber air dan mencegah erosi serta sedimentasi. Permasalahan urusan Kehutanan adalah peranan kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal dan belum adanya rencana pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah.

## 29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan urusan bidang energi dan sumber daya mineral adalah belum adanya panas bumi yang langsung bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pemanfaat langsung panas bumi sehingga belum bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat.

Selain itu, belum semua desa di Kabupaten Sukamara tersedia jaringan listrik dari PLN, masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum teraliri listrik PLN. Di bidang sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Sukamara semua masuk kategori bahan galian golongan C (BGGC). Potensi yang paling besar adalah pasir kuarsa.

### 30. Urusan Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah.

Permasalahan urusan Perdagangan:

- 1) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- 2) Perlindungan konsumen belum optimal;
- 3) Tidak optimalnya pemantauan dan pengawasan harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis serta barang dalam pengawasan lainnya.

### 31. Urusan Perindustrian

Sebagai daerah penyangga bagi daerah lain, Pemerintah Kabupaten Sukamara mengeluarkan kebijakan untuk menarik industri besar yang secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Industri di Kabupaten Sukamara diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) tanpa mematikan industri kecil dan menengah. Permasalahan urusan Perindustrian adalah belum adanya dokumen perencanaan industri yang memadai (RIPIK).

### 32. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Sukamara selama ini berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya. Sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum.

Permasalahan urusan Transmigrasi:

- 1) Pengamanan lahan transmigrasi Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/258/2019 tentang Pencadangan Areal untuk Pengembangan Pembangunan Permukiman Transmigrasi yang terletak di wilayah Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara belum dapat terealisasi 100%, dikarenakan pada prosesnya melibatkan pihak ATR/BPN yang dibatasi oleh anggaran di instansi tersebut dan kesepakatan masyarakat;
- 2) Belum terselesaikannya status lahan eksisting 55 KK di UPT SP1 Pulau Nibung yaitu Lahan Usaha 1 (LU 1) dan Lahan Pekarangan (LP) dikarenakan terkendala kawasan HP. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian dimana Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) telah melakukan pendataan terkait penyelesaian 110 bidang lahan transmigrasi 55 KK di SP 1 Pulau Nibung.

### 33. Urusan Perencanaan

Permasalahan urusan Perencanaan Pembangunan:

- 1) Masih perlunya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
- 2) Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa daftar keinginan (wish list) dan belum menunjukkan daftar kebutuhan (need list);
- 3) Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;
- 4) Proses perencanaan teknokratik masih belum sepenuhnya didasarkan data primer dan sekunder yang memadai;
- 5) Belum tersedianya SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang mantap, sehingga masih kesulitan dalam proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasi yang berbasis IT;
- 6) SDM di bidang perencanaan pembangunan daerah belum memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

### 34. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan perangkat daerah yang menangani penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kelitbangan masih belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.
- 2) Pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengembangan yang masih belum bersifat mandatory (keharusan) dengan sejumlah persentase tertentu sehingga anggaran ini masih dalam kategori minim.
- 3) Perlunya peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penelitian dan pengembangan untuk dilaksanakan sehingga dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis bukti-bukti ilmiah.

### 35. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan terkait kinerja tingkat penerimaan daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah unggulan guna peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta perlu mempertimbangkan investasi sebagai PAD.

### 36. Urusan Kepegawaian

Permasalahan pada urusan kepegawaian adalah peningkatan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis/fungsional masih terbatas dan pengisian formasi di daerah sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.



### 37. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah, dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di daerah masih belum dapat dilaksanakan secara mandiri, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasana serta SDM bidang Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu belum tersusun dengan baik arah dan strategi pengembangan ASN.

### 38. Urusan Pengawasan

Dalam rangka peningkatan Indeks Inovasi Daerah, optimalisasi penerapan inovasi daerah, serta integrasi hasil riset dan inovasi daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah masih terkendala oleh permasalahan-permasalahan antara lain:

- 1) Pengawasan internal oleh APIP belum dilaksanakan secara optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan masih rendah.

### 39. Urusan Pemerintahan Umum

Permasalahan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah penanaman nilai-nilai ideologi bernegara karakter dan wawasan berkebangsaan, persatuan dan kesatuan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta kerukunan antar umat beragama masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Kabupaten Sukamara untuk dokumen RPD Tahun 2024-2026 merupakan sintesis dari isu strategis dalam berbagai level dan konsideran termasuk isu-isu internasional, isu nasional yang tertuang dalam RPJMN, isu di tingkat provinsi seperti yang tertuang di RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta masalah yang muncul dari setiap bidang urusan, permasalahan pada kondisi saat ini yang relevan dan telaah berbagai dokumen. Isu strategis Kabupaten Sukamara Tahun 2024- 2026 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur dan sarana prasarana ruang publik yang memadai dan berkualitas

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan faktor penting dalam mendorong konektivitas antar wilayah untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi dan kelistrikan secara merata menjadi kendala pembangunan Kabupaten Sukamara. Dari segi akses energi dan kelistrikan, masih terdapat 3 desa yang belum memiliki akses listrik PLN seperti Sungai Bundung, Sungai Baru, dan Pulau Nibung. Adapun belum memadainya akses penghubung antara Kabupaten

Sukamara menuju Kabupaten tetangga karena jarak, biaya, dan waktu tempuh yang tinggi serta kondisi jalan di beberapa wilayah masih rusak.

Selain itu, untuk mendukung arah pembangunan Kabupaten Sukamara bagian selatan sebagai water front city perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ruang publik yang memadai dan berkualitas, sebagai berikut:

a) Pemeliharaan dan perbaikan Jalan

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek terpenting dari perkembangan suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sukamara. Kondisi jalan yang menjadi prasarana untuk menuju ke Kabupaten Sukamara dari Pangkalan Bun dapat dikatakan memiliki kondisi yang buruk. Jalan yang buruk tersebut dapat menjadi lebih parah pada saat terjadinya hujan. Terlebih lagi jalan tersebut juga tidak jarang digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk perkebunan kelapa sawit.

Transportasi darat yang menjadi sarana utama yang digunakan masyarakat Kabupaten Sukamara untuk bepergian menjadikan infrastruktur jalan penting untuk diperhatikan. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Sukamara. Kemudahan aksesibilitas tersebut tentunya akan berdampak kepada peningkatan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sukamara. Akan tetapi kondisi fisik lingkungan yang sebagian besar merupakan kawasan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Diperlukan pertimbangan dan perhitungan yang tepat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sukamara.

b) Pembangunan dan perbaikan Jembatan

Jembatan Jelai merupakan salah satu infrastruktur yang menghubungkan 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan jembatan tersebut merupakan salah satu hal penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas yang akan menuju ke dua provinsi tersebut. Pembangunan jembatan jelai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian yang terdapat di Kabupaten Sukamara.

Pembangunan Jembatan Jelai pada saat ini masih terkendala pada akses yang terdapat di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan jembatan tersebut saat ini aksesnya terputus karena masih belum adanya jalan yang berada di Kabupaten Ketapang. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang agar kedua wilayah tersebut dapat terhubung. Dengan terhubungnya kedua wilayah tersebut dengan adanya Jembatan Jelai akan mengurangi waktu tempuh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk bepergian antara 2 kabupaten tersebut. Selain itu beberapa jembatan yang menghubungkan wilayah selatan maupun utara masih perlu mendapatkan perhatian serius karena kondisinya cukup memprihatinkan antara lain beberapa jembatan di ruas Sukamara-Lunci-Jelai dan Sukamara-Ajang melalui Lupu Peruca.

c) Pembangunan Pelabuhan

Guna mendukung kelancaran arus barang dan orang melalui jalur laut, Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana di daerah dengan mengoptimalkan pelabuhan pengumpan local yang sudah diserahkan oleh KSOP pada tahun 2022. Hal ini untuk mendukung potensi lalu lintas angkutan barang dan orang melalui laut berkaitan dengan semakin berkembangnya perekonomian daerah di wilayah selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, dengan berkembangnya daerah selatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kualitas transportasi melalui pemberian akses air tawar bersih, jaringan listrik, dan jalan penghubung menuju ke pelabuhan tersebut.

2) Daya saing perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Perekonomian daerah yang mandiri, maju, dan berdaya saing secara adil dan merata merupakan salah satu isu strategis yang terdapat di Kabupaten Sukamara. Sinergi kegiatan ekonomi di bagian utara Kabupaten Sukamara terkait dengan sektor perkebunan dan pada bagian selatan terkait dengan sektor pertambangan, pariwisata, dan perikanan. Potensi perekonomian yang terdapat di Kabupaten Sukamara sebagai wilayah peternakan sebagai penyangga pengembangan program Food Estate di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Kabupaten Sukamara berperan sebagai wilayah pendukung Food Estate untuk pengembangan peternakan sapi dan pengembangan kawasan tambak udang vaname di bagian selatan (JELUNCI).

Perekonomian daerah yang berdaya saing dapat dikembangkan dengan upaya peningkatan daya saing produk olahan lokal Kabupaten Sukamara di pasar nasional maupun global, distribusi bahan pokok/barang strategis. dan sarana prasarana pasar tradisional. Potensi olahan produk lokal Kabupaten Sukamara diantaranya produk olahan berbahan dasar ikan dan kerajinan Batu Kecubung.

Isu lain yang terkait dengan perekonomian daerah di Kabupaten Sukamara adalah konektivitas dan interaksi keruangan Kabupaten Sukamara dengan daerah lain di dalam konstelasi wilayah (region) Kalimantan Tengah bagian barat. Kabupaten Sukamara sendiri terletak pada daerah buntu (deadlock) yang tidak dilintasi akses jalan. Oleh sebab itu perlu menciptakan interaksi antar daerah yang mencakup Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Ketapang.

Dalam upaya peningkatan daya saing perekonomian Kabupaten Sukamara yang mandiri, terdapat beberapa program utama yang menjadi permasalahan dan potensi yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Pemerintah juga mendorong dan mengembangkan beberapa potensi daerah agar dapat bersaing dengan wilayah lain agar terbentuk pemerataan perekonomian. Maka dalam rangka mencapai daya

saing perekonomian yang mandiri, terdapat beberapa potensi pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah pada tahun 2024-2026 yaitu:

a) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Secara umum kondisi kapasitas produksi UMKM di Kabupaten Sukamara cenderung mengalami stagnasi. Perhatian khusus harus diberikan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam sektor industri kreatif maupun UMKM, karena merupakan salah satu contributor utama dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Keberadaan UMKM tersebut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM di Kabupaten Sukamara tidak begitu banyak, yaitu sentra industri rumah tangga pangan berbahan dasar ikan dan batu permata kecubung.

Industri rumah tangga pangan berbahan dasar ikan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat di Kota Sukamara. Bahan dasar pembuatan Industri rumah tangga pangan berbahan dasar ikan di Kabupaten Sukamara adalah ikan gabus, yang membedakan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan. Pengembangan usaha kerupuk basah hanya menargetkan pasar pada area sekitar Kabupaten Sukamara karena kendala pengemasan yang tidak dapat bertahan lama akibat bahan dasar ikan dan dalam kondisi basah. Pemasaran Industri rumah tangga pangan berbahan dasar ikan tidak mempunyai target tetap, karena pembuatan dan distribusi dilakukan sesuai dengan adanya pesanan. Hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sukamara untuk mendukung keberadaan UMKM maupun ekonomi kreatif yang memadai dan berkelanjutan, karena keberadaan UMKM menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dan daerah.

Keberadaan batu kecubung menjadi identitas Kabupaten Sukamara secara umum, karena dulunya dikenal sebagai sentra pembuatan batu permata di Kabupaten Sukamara. Keberadaan industri kreatif batu kecubung di Kabupaten Sukamara sudah terancam punah karena tidak adanya regenerasi penerus pembuatan batu permata tersebut. Saat ini pengrajin batu kecubung hanya tersisa satu orang yang berada di Kecamatan Permata Kecubung. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sukamara untuk menjaga identitas daerahnya agar tidak punah.

Keberadaan sentra ekonomi UMKM dan industri kreatif perlu didukung dengan pasar yang memadai baik secara offline maupun online. Melalui keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui unit kerja pada urusan UMKM dan pariwisata.

b) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname

Udang vaname merupakan komoditas perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Sukamara, pengembangan budidaya udang vaname tersebut masih menggunakan cara pembudidayaan

yang sederhana hingga teknologi intensif. Dalam pengembangan tambak udang vaname di Kabupaten Sukamara kepemilikannya masih banyak yang bersifat individu. Pengembangan budidaya tambak udang vaname saat ini menjadi diprioritaskan oleh pemerintah karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap ekonomi. Pemerintah berencana melakukan penataan kawasan tambak udang vaname di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci.

Keberadaan tambak udang vaname di Kabupaten Sukamara hanya berguna sebagai supplier untuk wilayah Jawa Tengah. Keterbatasan aksesibilitas penunjang kegiatan di dalam tambak udang vaname masih menjadi permasalahan utama, terutama dalam proses distribusi. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan tersebut masih sangat terbatas dalam pengolahannya karena rendahnya sumber daya manusia di Kabupaten Sukamara. Pemerintah perlu menentukan bagaimana strategi yang sesuai dengan potensi, daya dukung lingkungan dan kondisi wilayah pengembangan. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan tambak udang vaname masih stagnan dalam perencanaan belum mengoptimalkan potensi pengolahannya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan maupun penyuluhan.

c) **Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan Jeruk**

Tanaman komoditas hortikultura yang menjadi unggulan di Kabupaten Sukamara diantaranya pisang, durian, jeruk, dan cabe. Budidaya jeruk paling banyak ditemukan di Kecamatan Jelai, terutama di Desa Sungai Baru yang dijadikan salah satu mata pencaharian masyarakat. Pengembangan kawasan perkebunan jeruk di Desa Sungai Baru dimulai dengan inisiatif masyarakat petani padi yang beralih memanfaatkan lahan menjadi perkebunan jeruk.

Pengembangan kawasan perkebunan jeruk menjadi peluang dan investasi di Kabupaten Sukamara. Pemerintah mengupayakan potensi jeruk di Kabupaten Sukamara sebagai komoditi unggulan di Kalimantan Tengah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukamara dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga terciptanya perekonomian yang berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait dengan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan jeruk tersebut menjadi penting untuk dilakukan perencanaan dan penataan ruang terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana.

d) **Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Ekosistem mangrove di Kabupaten Sukamara selain digunakan sebagai pelindung garis pantai dan abrasi saat ini mulai kembangkan sebagai kawasan destinasi wisata. Salah satu potensi pemanfaatan ekosistem mangrove di Kabupaten Sukamara terdapat di

Kecamatan Jelai yang telah dikembangkan sebagai tujuan ekowisata mangrove.

Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan wisata mulai dikembangkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya masyarakat setempat sebagai pengelola dalam pembangunan dan pengembangannya. Potensi hutan mangrove di Kabupaten Sukamara saat ini menjadi salah satu proyek strategis pemerintah kabupaten yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Penetapan proyek strategis 1000 hektar di Kecamatan Jelai dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan mangrove dan tambak udang vaname.

Selain wisata mangrove yang dikembangkan pemerintah, Kabupaten Sukamara memiliki potensi pengembangan kawasan pantai. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan revitalisasi pantai agar menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kawasan pantai di Kabupaten Sukamara memiliki peluang untuk investasi.

Pengembangan kawasan pesisir Sukamara diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan penduduk setempat. Pemerintah daerah mengupayakan pengembangan usaha setempat melalui program bantuan dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena wilayah pesisir sukamara dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Pengembangan potensi ekonomi dilakukan dengan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang aktivitas pariwisata. Selain itu, peningkatan kualitas jalan perlu ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dan tentunya akan berdampak kepada peningkatan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sukamara.

e) Pengembangan Kawasan *Food Estate*

Kabupaten Sukamara menjadi salah satu kabupaten yang dimanfaatkan sebagai kawasan peternakan sapi (Sukamara Ranch) di Kalimantan tengah. Pengembangan peternakan sapi memanfaatkan lahan hutan produksi di Kecamatan Jelai dan Lunci dengan mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan luas 19.708 Hektar (Ha). Kawasan peternakan sapi tersebut diupayakan untuk mendukung program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah.

Potensi pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Sukamara sangat prospektif untuk dilanjutkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan potensi perekonomian dan pendapatan daerah. Upaya pemerintah dalam pengawasan dan pemeliharaan sapi tersebut mengajak kerjasama dan mengoptimalkan sumber daya manusia penduduk setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat dikerjasamakan baik dengan pengusaha lokal maupun nasional guna mempercepat pengembangan peternakan sapi.



f) Perencanaan dan Pembangunan Industri Pasir Kuarsa (Silika)

Kabupaten Sukamara mempunyai potensi tambang yang dapat mendorong laju perekonomian daerah dan regional dengan percepatan pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Sukamara. Keberadaan tambang pasir silika masih belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan kawasan industri pasir silika di Kabupaten Sukamara hanya saja masih terbatas dengan sarana prasarana penunjang.

Potensi tambang pasir silika di Kabupaten Sukamara mencapai 20.000 Hektar (Ha). Keberadaan pasir silika tersebut mempunyai banyak peluang investasi pertambangan. Tambang pasir silika paling banyak ditemukan di Kecamatan Pantai Lunci, dan sudah banyak industri yang sudah menjadi investor dan mempunyai izin mengelola pertambangan pasir. Keberadaan industri pasir silika memberikan peluang di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan industri pasir silika nantinya juga mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan peluang kerja untuk masyarakat sekitar.

3) Daya saing sumber daya manusia yang berkualitas

Isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berkualitas dan berdaya saing menjadi isu strategis di Kabupaten Sukamara yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sukamara berada pada peringkat 3 (tiga) terendah di Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dikarenakan masih rendahnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, perlu dukungan kompetensi tenaga pengajar yang berdaya saing dan berbasis IPTEK serta perlunya pembangunan perguruan tinggi rintisan yang akan menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan berdaya saing dalam lingkup regional, nasional maupun internasional (Sebagai contoh adanya kerjasama dengan Universitas Terbuka, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) dan kerjasama dengan mitra untuk pemberian beasiswa bagi siswa bibit unggul di Kabupaten Sukamara).

Pembangunan pada urusan kesehatan berkaitan dengan karakteristik Kabupaten Sukamara yang memiliki banyak kawasan rawa yang cenderung lembab, berdampak pada masih adanya ancaman penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oleh sebab itu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu, perlu adanya peningkatan pelayanan dasar kesehatan untuk penurunan angka stunting yang terdapat di Kabupaten Sukamara. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, dan berkualitas diperlukan adanya sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan terutama dokter spesialis, pelayanan kesehatan dan jaminan pemeliharaan untuk masyarakat.

Dari aspek ekonomi, kinerja pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor basis seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan perlu

dijaga dan terus digenjot terlebih secara umum saat ini pertumbuhan ekonomi tengah melesat setelah terhantam Pandemi COVID-19. Momentum pemulihan ekonomi yang ditandai dengan kembalinya pasar global yang didukung oleh kebijakan fiskal negara perlu disambut untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Adapun untuk mencapai daya saing sumber daya manusia yang berkualitas terdapat salah satu kegiatan berupa pelatihan budidaya jeruk yang dilakukan dengan kerjasama antara Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan Desa Sungai Baru, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan atau kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) kelembagaan pelaku perbenihan jeruk di Desa Sungai Baru, Kabupaten Sukamara. Kabupaten Sambas terkenal dengan keberhasilannya dalam budidaya tanaman jeruk, sehingga Kabupaten Sukamara khususnya Desa Sungai Baru yang juga memiliki potensi budidaya tanaman jeruk mampu mengadopsi teknik budidaya jeruk tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukamara dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga terciptanya perekonomian yang berkelanjutan atau *sustainable*.

4) Pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan

Isu pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan menjadi isu strategis di Kabupaten Sukamara terutama terkait dengan kebencanaan dan alih fungsi lahan. Kabupaten Sukamara memiliki potensi kebencanaan berupa kebakaran dan abrasi yang terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sukamara. Perlu adanya perhatian untuk proses mitigasi kebencanaan yang terdapat di Kabupaten Sukamara. Selain itu terjadinya alih fungsi lahan masih banyak terjadi di Kabupaten Sukamara yang merupakan dampak dari pembuatan perkebunan kelapa sawit. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sukamara juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan pencemaran air.

5) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan terbuka dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menjadi isu strategis bagi Kabupaten Sukamara. Tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan, kelembagaan pusat juga lembaga vertikal lainnya dimana diperlukan juga keharmonisan dengan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga ketahanan nasional di Kabupaten Sukamara. Dukungan konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan implementasi program dan kegiatan yang didukung oleh seluruh *stakeholder* dalam penegakan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintah berkaitan dalam upaya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tentunya akan mempermudah dalam upaya pelayanan publik. Dalam tata kelola

pemerintah diperlukan adanya keterbukaan birokrasi. Keakuan (ego) sektoral perangkat daerah dan tidak mudahnya koordinasi perhatian sumber daya aparatur pemerintah tidak seperti yang diharapkan, juga menjadi sebab penentuan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Selain itu juga, didukung dengan penetapan kebijakan anggaran yang tidak proporsional untuk masyarakat juga menjadi kendala besar dalam birokrasi saat ini, dimana anggaran untuk publik berbasis proyek bukan berbasis kebutuhan masyarakat.

b. Visi dan Misi Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Sukamara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode Tahun 2005 – 2025 adalah

1. Visi

**“KABUPATEN SUKAMARA SEBAGAI PINTU GERBANG BAGIAN BARAT KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.**

2. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Publik Kabupaten Sukamara yang Memadai dan Berkualitas Baik.
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sukamara yang Baik dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi dan Keterbukaan Informasi.
- 3) Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang Mandiri dalam Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam sebagai Basis Perekonomian Daerah dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Sejahtera dan Berdaya Saing.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini disebabkan karena RPJMD tahun sebelumnya yakni RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah berakhir. RPJMD tahun berikutnya akan disusun setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan mendasari Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Untuk melaksanakan pembangunan di tengah kekosongan Jabatan Kepala Daerah Definitif, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2025 sebagaimana Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**  
**2024 - 2026 Kabupaten Sukamara**

PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISDIKBUD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DISDIKBUD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DISDIKBUD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN dan RSUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN dan RSUD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN dan RSUD
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DPUPR PRKP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR PRKP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR PRKP
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR PRKP
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR PRKP
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR PRKP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DPUPR PRKP
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DPUPR PRKP
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPUPR PRKP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATPOLPP & DAMKAR dan BPBD
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOLPP & DAMKAR
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOLPP & DAMKAR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINSOS PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS PMD
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS PMD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS PMD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS PMD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS PMD
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS PMD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISNAKERTRANS
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISNAKERTRANS
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A PPKB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3A PPKB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3A PPKB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DP3A PPKB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DP3A PPKB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DP3A PPKB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISKEPTAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DISKEPTAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DISKEPTAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DISKEPTAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DISKEPTAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DPUPR PRKP

PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DPUPR PRKP
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DPUPR PRKP
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	DPUPR PRKP
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DPUPR PRKP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
PROGRAM PENATAAN DESA	DINSOS PMD
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINSOS PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINSOS PMD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP3A PPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3A PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3A PPKB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISHUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISKOMINFO
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISKOPDAG
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DISKOPDAG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DISKOPDAG
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOPDAG
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DISKOPDAG
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	DISPORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DISPORAPAR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFO
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFO
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISDIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DISDIKBUD
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISDIKBUD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPERPUSIP
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DISPERPUSIP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DISPERPUSIP

PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DISPERPUSIP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPORAPAR
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPORAPAR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISKEPTAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISKEPTAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISKEPTAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISKEPTAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISKEPTAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISKOPDAG
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DISKOPDAG
PENGEMBANGAN EKSPOR	DISKOPDAG
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DISKOPDAG
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DISKOPDAG
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISKOPDAG
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	SETDA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>PERENCANAAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPEDA
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
<b>KEUANGAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD
<b>KEPEGAWAIAN</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
<b>KECAMATAN</b>	
<b>KECAMATAN BALAI RIAM</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BALAI RIAM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BALAI RIAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BALAI RIAM
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BALAI RIAM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN BALAI RIAM



PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN BALAI RIAM
<b>KECAMATAN JELAI</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN JELAI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN JELAI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN JELAI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JELAI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN JELAI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN JELAI
<b>KECAMATAN PANTAI LUNCI</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PANTAI LUNCI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PANTAI LUNCI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PANTAI LUNCI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PANTAI LUNCI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PANTAI LUNCI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PANTAI LUNCI
<b>KECAMATAN PERMATA KECUBUNG</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
<b>KECAMATAN SUKAMARA</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SUKAMARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SUKAMARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKAMARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN SUKAMARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SUKAMARA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN SUKAMARA
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESBANGPOL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESBANGPOL

Sumber: BAPPEDA Kab. Sukamara, Rencana Pembangunan Daerah 9RPD) 2024-2026  
Kabupaten Sukamara

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD)**  
**Kabupaten Sukamara Tahun 2024**

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISDIKBUD
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan/Siswa	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
1	01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
1	01	02	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
1	01	02	2.03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/RuangKelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
1	01	02	2.04	40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
1	01	02	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
1	01	03			<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	DISDIKBUD
1	01	03	2.01		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
1	01	04			<b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	DISDIKBUD
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	
					<b>DINAS KESEHATAN</b>	
1	02	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>DINKES</b>
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	
1	02	01	2.10	02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	02	02	2.02	22	Pengembangan Rumah Sakit	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					<b>UPT PUSKESMAS SUKAMARA</b>	
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPT PUSKESMAS SUKAMARA
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPT PUSKESMAS SUKAMARA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	
					<b>UPT PUSKESMAS JELAI</b>	
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPT PUSKESMAS JELAI
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPT PUSKESMAS JELAI
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	
					<b>UPT PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG</b>	
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPT PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPT PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	
					<b>UPT PUSKESMAS BALAI RIAM</b>	
1	02	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>UPT PUSKESMAS BALAI RIAM</b>
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>UPT PUSKESMAS BALAI RIAM</b>
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					<b>UPT PUSKESMAS PANTAI LUNCI</b>	
1	02	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>UPT PUSKESMAS PANTAI LUNCI</b>
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1	02	02			<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>UPT PUSKESMAS PANTAI LUNCI</b>
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
					<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
1	03	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	03	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	03	02			<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	DPUPR PERKIM
1	03	02	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
1	03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	
				102	Pembangunan Breakwater	
				115	Pembangunan Tanggul Sungai	
				117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
				121	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	
				125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
1	03	02	2.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
1	03	03			<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	DPUPR PERKIM
1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
1	03	03	2.01	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
1	03	03	2.01	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
1	03	04			<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	DPUPR PERKIM
1	03	04	2.01		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	
1	03	05			<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	DPUPR PERKIM
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	05	2.01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
1	03	05	2.01	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
1	03	05	2.01	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
1	03	05	2.01	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
1	03	05	2.01	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
1	03	05	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
1	03	05	2.01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	03	06			<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
1	03	06	2.01	21	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	
				30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1	03	08			<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	
1	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
1	03	09			<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	09	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	09	2.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	03	09	2.01	10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
1	03	10			<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	
1	03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
1	03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
1	03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	
1	03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan	
1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	
1	03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	
1	03	10	2.01	39	Rehabilitasi Jembatan	
1	03	11			<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	
1	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
1	03	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	11	2.02	12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
1	03	11	2.04		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	
1	03	11	2.04	06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
1	03	12			<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	03	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	
1	03	12	2.01	06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
1	03	12	2.01	12	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	
1	03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	
1	03	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
					<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
1	04	02			<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	04	02	2.01		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	
1	04	02	2.01	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	04	04			<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>DPUPR PERKIM</b>
1	04	04	2.01		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	05				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
1	05	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1	05	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
1	05	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL & DAMKAR
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL & DAMKAR
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL & DAMKAR

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPBD
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1	05	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
1	05	03	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
1	06				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	
					<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS PMD
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
1	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
1	06	02			<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	DINSOS, PMD
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	06	04			<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	DINSOS, PMD
1	06	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	
1	06	05			<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	DINSOS, PMD
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
1	06	06			<b>Program Penanganan Bencana</b>	DINSOS, PMD
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	
1	06	07			<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	DINSOS, PMD



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
2	07				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	
2	07	01			<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
2	07	01	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2	07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2	07	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	07	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	07	02			<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	DISNAKERTRANS
2	07	02	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	
2	07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
2	07	03			<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	DISNAKERTRANS
2	07	03	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
2	07	04			<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.01		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	
2	07	05			<b>Program Hubungan Industrial</b>	DISNAKERTRANS
2	07	05	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
2	08				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
					<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	08				Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	DP3APPKB
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3APPKB
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	
					<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>	
2	09	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DISKETAPANG</b>
2	09	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2	09	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	09	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	09	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	09	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	09	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	09	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	09	02			<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</b>	<b>DISKETAPANG</b>
2	09	02	2.01		<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
2	09	03			<b>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>DISKETAPANG</b>
2	09	03	2.01		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
2	09	04			<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>DISKETAPANG</b>
2	09	04	2.02		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	
2	09	05			<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>DISKETAPANG</b>
2	09	05	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
2	10				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	
					<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
2	10	04			<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>PUPRPERKIM</b>
2	10	04	2.01		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	PUPRPERKIM
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH
2	11	01	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	11	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
2	11	04			<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>	DLH
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
2	11	05			<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</b>	DLH
2	11	05	2.01		<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	11	06			<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	DLH
2	11	06	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
2	11	07			<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</b>	DLH
2	11	07	2.02		<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
2	11	08			<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	DLH
2	11	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
2	11	09			<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	DLH
2	11	09	2.01		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropidalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2	11	10			<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	DLH
2	11	10	2.01		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	
2	11	11			<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	DLH
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
2	12				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
					<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL</b>	
2	12	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	12	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2	12	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	12	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	12	02			<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	DISDUKCAPIL
2	12	02	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-EI, Formulir, dan Buku terkait PendaftaranPenduduk sesuai dengan Kebutuhan	
2	12	02	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
2	12				<b>Program Pencatatan Sipil</b>	DISDUKCAPIL
2	12	03	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipilsesuai dengan Kebutuhan	
2	12	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
2	12	04			<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan</b>	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan	
2	12	04	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan</b>	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan dan Pendayagunaan DataKependudukan	
2	12	05			<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	DISDUKCAPIL
2	12	05	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan</b>	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan ProyeksiKependudukan serta Kebutuhan yang lain	
2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
					<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
2	13	04			<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	DINSOS, PMD
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	DINSOS, PMD
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
				09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	13	04			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	DINSOS, PMD
2	13	04	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS, PMD
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
2	13	04	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
2	13	04	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14				Program Pengendalian Penduduk	DP3APPKB
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	
2	14	02	2.02	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3APPKB
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
2	14	03	2.04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
2	14				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3APPKB
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
2	14	04	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
2	14	04	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
2	14	04	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
2	14	04	2.06	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
2	14	04	2.06	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
					<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
2	15	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DISHUB</b>
2	15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2	15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	15	02			<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>DISHUB</b>
2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan AngkutanUmum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	
2	16	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DISKOMINFO</b>
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	16	02			<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>DISKOMINFO</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	16	03	2.01	07	Layanan Hubungan Media	
2	16	03			<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>DISKOMINFO</b>
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
					<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>	
2	17	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DINAS KOP UMKM</b>
2	17	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	17	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	17	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	17	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	17	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	17	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	17	03			<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	DINAS KOP UMKM
2	17	03	2.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	17	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	DINAS KOP UMKM
2	17	05	2.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
2	17	07			<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	DINAS KOP UMKM
2	17	07	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
2	17	08			<b>Program Pengembangan UMKM</b>	DINAS KOP UMKM
2	17	08	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	
					<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
2	18	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	DPMPSTP
2	18	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	18	02			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	02	2.01		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
2	18	02	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
2	18	03			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
2	18	04			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
2	18	05			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	
2	18	06			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	
					<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>	
2	19	01	2.01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DISPORAPAR</b>
2	19	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	19	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2	19	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2	19	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	19	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	19	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	19	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	19	02			<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>DISPORAPAR</b>
2	19	02	2.01		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	
2	19	02	2.02		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	
2	19	03			<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>DISPORAPAR</b>
2	19	03	2.01		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	
2	19	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
2	19	03	2.03		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	
				05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	
2	19	03	2.04		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	
2	19	03	2.05		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
2	19	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>DISPORAPAR</b>
2	19	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	
					<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>DISKOMINFO</b>
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	
					<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>DISKOMINFO</b>
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	
					<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
2	22	02			<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>DISDIKBUD</b>
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
2	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	22	02	2.03	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan obyek pemajuan Lembaga Adat	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
2	22	02	2.03	03	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	
2	22	05			<b>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	DISDIKBUD
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
2	23				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	
2	23				<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
2	23	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	DISPUSIP
2	23	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2	23	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2	23	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	23	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	23	02			<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	DISPUSIP
2	23	02	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	23	02	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
2	24				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	
2	24				<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
2	24	02			<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	DISPUSIP
2	24	02	2.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
2	24	02	2.03		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
3	25				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3	25				<b>DINAS PERIKANAN</b>	
3	25	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	DISKAN
3	25	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
3	25	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
3	25	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	25	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3	25	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
3	25	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
3	25	03			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	DISKAN
3	25	03	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
3	25	04			<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	DISKAN
3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
3	25	06			<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	DISKAN
3	25	06	2.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
3	25	06	2.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
3	25	06	2.02	01	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	26				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	
3	26	02			<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>	
3	26	02			<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	DISPORAPAR
3	26	02	2.03		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	03			<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	DISPORAPAR
3	26	03	2.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	
					<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>	
3	27	02			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISKETAPANG
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
3	27	03			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISKETAPANG
2	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	
2	27	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
2	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISKETAPANG
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	27	04	2.01	05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
3	27	05			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DISKETAPANG
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	DISKETAPANG
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	
					<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>	
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISKOPUKMP
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DISKOPUKMP
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	
3	30	06			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
3	30	07			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DISKOPUKMP
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	31	02			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISKOPUKMP
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3	32	02			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	
3	32	03	2.01	08	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
4					URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SETDA
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
4	01	01	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4	01	01	2.12		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
4	01	02			<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>SETDA</b>
4	01	02	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
4	01	02	2.04		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
4	01	03			<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>SETDA</b>
4	01	03	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
4	01	03	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
4	02				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
4	02	01			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
4	02	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>SETWAN</b>
4	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
4	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
4	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
4	02	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
4	02	01	2.16		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
4	02				<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	<b>SETWAN</b>
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
4	02	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
4	02	02	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	
				8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
4	02	02	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	
4	02	02	2.05		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	
4	02	02	2.05	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
4	02	02	2.05	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
4	02	02	2.05	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
5					<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
5	01				<b>PERENCANAAN</b>	
					<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
5	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>BAPPEDA</b>
5	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
5	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
5	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
5	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
5	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
5	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5	01	02			<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>BAPPEDA</b>
5	01	02	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
5	01	02	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.04		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	01	03			<b>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>BAPPEDA</b>
5	01	03	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
5	01	03	2.03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
5	02				<b>KEUANGAN</b>	
5	02				<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	
5	02	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>BPKAD</b>
5	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
5	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
5	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5	02	02			<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BPKAD</b>
5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
5	02	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
5	02	02	2.04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	02	02	2.05		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	02	03			<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BPKAD</b>
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	02	04			<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>BPKAD</b>
5	02	04	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5	03				<b>KEPEGAWAIAN</b>	
					<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	
5	03	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>BKPSDM</b>
5	03	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
5	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
5	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5	03	02			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
					<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	
5	04	02			<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>BKPSDM</b>
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
					<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
5	05	02			<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>BAPPEDA</b>
5	05	02	2.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
5	05	02	2.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
6					<b>URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
					<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	
6	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
6	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
6	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	
6	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
6	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
6	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
6	01	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
6	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
6	01	03	2.01		<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
6	01	03	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
6	01	03	2.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
7					<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>	
7	01				<b>KECAMATAN</b>	
					<b>KECAMATAN SUKAMARA</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KEC SUKAMARA</b>
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kelengkapannya	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>KEC SUKAMARA</b>
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					<b>KELURAHAN MENDAWAI</b>	
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
					<b>KECAMATAN</b>	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					<b>KELURAHAN PADANG</b>	
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
					<b>KECAMATAN</b>	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					<b>KECAMATAN BALAI RIAM</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KEC BALAI RIAM</b>
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>KEC SUKAMARA</b>
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>KEC BALAI RIAM</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
				01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7	01	05			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>KEC BALAI RIAM</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KEC BALAI RIAM</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					<b>KECAMATAN JELAI</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KEC JELAI</b>
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>KEC JELAI</b>
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
7	01	05			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>KEC JELAI</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					<b>KELURAHAN KULA JELAI</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KEC JELAI</b>
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	KEC JELAI
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					<b>KECAMATAN PANTAI LUNCI</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	KEC. PANTAI LUNCI
			2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	KEC. PANTAI LUNCI
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	KEC. PANTAI LUNCI
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KEC. PANTAI LUNCI</b>
7	01	04	7.03		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
7	01	05			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>KEC. PANTAI LUNCI</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KEC. PANTAI LUNCI</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					<b>KECAMATAN PERMATA KECUBUNG</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KEC. PERMATA KECUBUNG</b>
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	01	01	2.09	10	meliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>KEC. PERMATA KECUBUNG</b>
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>KEC. PERMATA KECUBUNG</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	KEC. PERMATA KECUBUNG
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KEC. PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC. PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANG
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	KESBANG
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibra	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KESBANG
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	01	05			<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>KESBANG</b>
8	01	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8	01	06			<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>KESBANG</b>
8	01	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: BAPPEDA Kab. Sukamara, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRPKD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

SPM merupakan tolak ukur dalam pemberian pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM ini juga sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh masyarakat sehingga terwujudnya suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang



berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten/kota. Koordinasi tersebut menurut ketentuan pasal 17 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal adalah meliputi (1) *penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM*; dan (2) *penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM*.

Untuk melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sukamara, sampai dengan Tahun 2024 ini telah membentuk Tim Penerapan SPM sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tim Penerapan SPM Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 188.45/57/2024 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

Jenis Pelayanan Dasar dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal antara lain:

- 1) pendidikan anak usia dini;
- 2) pendidikan dasar;
- 3) pendidikan kesetaraan;
- 4) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 5) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 6) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 7) pelayanan kesehatan balita;
- 8) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 9) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 10) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 11) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 12) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 13) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 14) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 15) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- 16) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 17) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

- 18) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
- 19) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
- 20) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 21) pelayanan informasi rawan bencana;
- 22) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 23) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 24) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- 25) rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 26) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 27) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 28) Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 29) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Selain itu, draf Peraturan Kepala Daerah tersebut juga memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Pembiayaan;
- 4) Target dan Indikator Penerima Layanan;
- 5) Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 6) Pembinaan dan Pengawasan.

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar disesuaikan dengan Standar Teknis yang diatur oleh Kementerian teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **2.1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana terekam dalam PDRB per kapita, tetapi juga dilihat melalui capaian sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek Huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH).

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukamara 2024 masih menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2024, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sukamara yaitu 6.497,9 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sukamara, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,06 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah masing-masing 2.905,5 miliar rupiah pada tahun 2020, 3.043,1 miliar rupiah pada tahun 2021, 3.214,2 miliar rupiah pada tahun 2022, dan 3.395,6 miliar pada tahun 2023, dan .527,9 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2020- 2024 sebesar 1,98 persen pada tahun 2020, 4,74 persen pada tahun 2021, 5,62 persen pada tahun 2022, dan 5,64 persen pada tahun 2023, dan 3,89 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 terutama

didukung oleh pertumbuhan pada kategori Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,11 persen.

Berikut ini Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 yang diambil dari Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025:

**Tabel 17**  
**Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Sukamara 2023 - 2024**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,35	70,83	0,682
2.	Angka Kemiskinan	3,96	4,14	4,545
3.	Angka Pengangguran	5,23	4,95	(5,354)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,64	3,89	(31,028)
5.	Pertumbuhan Per Kapita	5.922.115.700.000	6.497.900.000.000	9,723
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,287	0,289	0,697

Sumber Data: BPS, Sukamara Dalam Angka 2025

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	a. Outcome: <b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>			
		1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Akreditasi A = 3 Unit Jumlah Akreditasi B = 40 Unit Jumlah Akreditasi C = 39 Unit Jumlah Tidak Terakreditasi = 3 Unit Jumlah Terakreditasi = 3 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 0 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 0 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 136 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 342 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah = 158 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7) Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Jumlah = 53 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		b. Outcome: <b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>			
		1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<b>SD</b> Jumlah Akreditasi A = 1 unit Jumlah Akreditasi B = 25 unit Jumlah Akreditasi C = 20 unit <b>SMP</b> Jumlah Akreditasi A = 2 unit Jumlah Akreditasi B = 7 unit Jumlah Akreditasi C = 4 unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 1250 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 980 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri	Jumlah = 6428 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
		5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 2665 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 576 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 259 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 639 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 251 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 245 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 96 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 130 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 41 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah = 634 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah = 251 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah = 32 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		17) Jumlah Kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala sekolah	Jumlah = 11 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 54 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah = 13 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		c. Outcome: <b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>			
		1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<b>SD</b> Jumlah Akreditasi A = 1 unit Jumlah Akreditasi B = 25 unit Jumlah Akreditasi C = 20 unit <b>SMP</b> Jumlah Akreditasi A = 2 unit Jumlah Akreditasi B = 7 unit Jumlah Akreditasi C = 4 unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 1250 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 980 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 6428 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah	Jumlah = 2665 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
		6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 576 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 259 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 639 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 251 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 245 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 96 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 130 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 41 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah = 634 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah = 251 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	Jumlah = 32 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah = 11 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah = 54 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah = 13 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		d. Outcome: <b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>			
		1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan = 4 unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 0 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 0 orang siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 34 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 28 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah = 24 orang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	-	Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, IKK ini tidak perlu diisi
		8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3 Kepala Sekolah	-	
2.	Kesehatan	a. Outcome: <b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>			
		1) Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana,	Jumlah RS = 1 unit	RSUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			
		b. Outcome: <b>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</b>			
		1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS = 1 unit	RSUD	
		c. Outcome: <b>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 1.243 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		d. Outcome: <b>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 1.238 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		e. Outcome: <b>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 1.212 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		f. Outcome: <b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 5.988 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		g. Outcome: <b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 9.535 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		h. Outcome: <b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 46.259 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		i. Outcome: <b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 4.971 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		j. Outcome: <b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 16.218 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		k. Outcome: <b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 613 orang	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		l. Outcome: <b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 102 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		m. Outcome: <b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 819	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
		n. Outcome: <b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 1.691 orang	Dinas Kesehatan	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah = 271 orang	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum	a. Outcome: <b>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</b>			
		1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan = 90,06 hektar	DPUPRPRKP	
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di	Panjang = 5.673 meter	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan = 151,365 hektar	DPUPRPRKP	
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang = 7.988 meter	DPUPRPRKP	
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	DPUPRPRKP	
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	DPUPRPRKP	
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1) Bangunan perkuatan tebing = 0 m 2) Tanggul sungai = 748 m 3) Kanal bajir = 0 m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir = 28 unit 5) Pompa banjir 0 Unit 0 Kapasitas 6) Polder/Kolam Retensi = 0 Unit 7) Breakwater = 1.858,80 m 8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya = 7,5 m	DPUPRPRKP	
		b. Outcome: <b>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota</b>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan = 151,365 hektar	DPUPRPRKP	
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang = 519,38 meter	DPUPRPRKP	
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan = 151,365 hektar	DPUPRPRKP	
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang = 7.988,00 meter	DPUPRPRKP	
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	DPUPRPRKP	
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	DPUPRPRKP	
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1) Bangunan perkuatan tebing 0 m 2) Tanggul sungai 748 m 3) Kanal banjir 0 m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir 15 unit 5) Pompa banjir 0 Unit 0 Kapasitas 6) Polder/Kolam Retensi 0 Unit 7) Breakwater 1.836,80 m	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya 7,5 m		
		c. Outcome: <b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>			
		1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{26.267}{104.974} \times 100\% = 25,02\%$ A = Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik = 26.267 meter B = Panjang jaringan irigasi primer = 104.974 meter	DPUPRPRKP	Dokumen RISPAM
		2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{52.621}{169.747} \times 100\% = 31,00\%$ A = Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik = 52.621 meter B = Panjang jaringan irigasi sekunder = 169.747 meter	DPUPRPRKP	
		3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{13.961}{30.946} \times 100\% = 45,00\%$ A = Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik = 13.961 meter B = Panjang jaringan irigasi tersier = 30.946 meter	DPUPRPRKP	
		d. Outcome: <b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</b>			
		1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DPUPRPRKP	
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	DPUPRPRKP	
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD = 1 Jumlah UPTD = 0	DPUPRPRKP	BUMD : PDAM Kabupaten Sukamara dibentuk dengan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah = 1 izin	DPUPRPRKP	
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Jumlah Perjanjian Kerjasama kumulatif yang masih berlaku sampai dengan tahun n = 1	DPUPRPRKP	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR Nomor: 5 TAHUN 2023 dan Nomor: 12/PK/CA/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Jelai Kabupaten Sukamara, berlaku s.d. 24 Mei 2027
		e. Outcome: <b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>			
		1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah = 1.586 unit rumah	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah = 1.292 unit rumah	DPUPRPRKP	
		3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk	Jumlah rumah yg terakses unit pengolahan setempat = 0 unit	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah yang terakses sambungan rumah untuk layanan SPALD-S dan SPALD-T = 2.878 unit		
		4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{0}{1.692} \times 100\% = 0,00\%$ <p>A = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik = 0 Unit  B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun &lt; 25 jiwa/ha= 1.692 Unit</p>	DPUPRPRKP	
		8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{0}{1.107} \times 100\% = 0,00\%$ <p>A = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT= 0 Unit  B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun &gt; 25 jiwa/ha= 1.107 Unit</p>	DPUPRPRKP	
		9) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{0}{1.186} \times 100\% = 0\%$	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>A = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 0 Unit</p> <p>B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT = 1.186 Unit</p>		
		10) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{0}{1.586} \times 100\% = 0\%$ <p>A = jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat = 0 Unit</p> <p>B = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S = 1.586 Unit</p>	DPUPRPRKP	
		11) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$ <p>A = jumlah sarana pengangkutan yang tersedia = 1 Unit</p> <p>B = jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan = 2 Unit</p>	DPUPRPRKP	
		12) Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{2.878}{15.764} \times 100\% = 18,26\%$ <p>A = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia = 2.878 Unit</p> <p>B = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan = 15.764 Unit</p>	DPUPRPRKP	
		13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{0}{1.292} \times 100\% = 0\%$ <p>A = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD = 0 Unit</p> <p>B = jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T = 1.292 Unit</p>	DPUPRPRKP	
		14) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{0}{1.586} \times 100\% = 0\%$ <p>A = jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot = 0 Unit</p>	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			B = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S = 1.586 Unit		
		f. Outcome: <b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>			
		1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{426}{514} = 82,88\%$ A = jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku = 426 Unit B = jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) = 514 Unit	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB terbit tahun n = 32 izin	DPUPRPRKP	
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	DPUPRPRKP	Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
		4) Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	DPUPRPRKP	
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah gedung = 0 unit	DPUPRPRKP	
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Jumlah gedung = 0 unit	DPUPRPRKP	
		7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Jumlah gedung = 514 unit	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Jumlah gedung = 426 unit	DPUPRPRKP	
		g. Outcome: <b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>			
		1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Panjang = 581,525 kilometer	DPUPRPRKP	Berdasarkan SK Bupati Sukamara Nomor 188.45/136/2018 tentang Fungsi dan Status Ruas Jalan di Kabupaten Sukamara
		2) Panjang jalan yang dibangun	Panjang = 1,423 kilometer	DPUPRPRKP (DD1)	
		3) Panjang jembatan yang dibangun	Panjang = 66,1 meter	DPUPRPRKP (DD2)	
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang = 29,116 kilometer	DPUPRPRKP (DD1)	
		5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang = 0 meter	DPUPRPRKP (DD1)	
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang = 2,702 kilometer	DPUPRPRKP (DD1)	
		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang = 88,2 meter	DPUPRPRKP (DD2)	
		8) Panjang jalan yang dipelihara	Panjang = 218 kilometer	DPUPRPRKP (DD1)	
		9) Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang = 0 meter	DPUPRPRKP (DD2)	
		h. Outcome: <b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 1 Kegiatan	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 359 orang	DPUPRPRKP	
		3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 281 orang	DPUPRPRKP	
		4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	DPUPRPRKP	
		5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	DPUPRPRKP	
		6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	DPUPRPRKP	
		7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	DPUPRPRKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	DPUPRPRKP	
		9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	DPUPRPRKP	
		10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	DPUPRPRKP	
		11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	DPUPRPRKP	
		12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	DPUPRPRKP	
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	DPUPRPRKP	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dihapuskan
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPUPRPRKP	
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPUPRPRKP	
		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPUPRPRKP	
		18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Jumlah unit usaha = 0	DPUPRPRKP	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Surat Ijin Usaha Jasa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Konstruksi (SIUJK) dihapuskan
		19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Jumlah unit usaha = 0	DPUPRPRKP	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dihapuskan
		20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah unit usaha = 0	DPUPRPRKP	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dihapuskan
		21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah unit usaha = 28	DPUPRPRKP	
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah = 0 izin	DPUPRPRKP	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dihapuskan
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah = 28 kasus	DPUPRPRKP	
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah = 0 kasus	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah = 28 kasus	DPUPRPRKP	
4.	Perumahan Rakyat	a. Outcome: <b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b>			
		1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah = 1.270 unit	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	DPUPRPRKP	
		4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah rumah = 0 unit Jumlah lokasi = 0	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	DPUPRPRKP	
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah luasan = 0 hektar Jumlah lokasi = 0	DPUPRPRKP	
		b. Outcome: <b>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</b>			
		1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	DPUPRPRKP	Selama tahun 2024 tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan relokasi rumah bagi masyarakat
		2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	DPUPRPRKP	Sda
		3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	DPUPRPRKP	Sda
		4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	DPUPRPRKP	Sda
		5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	DPUPRPRKP	Sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah = 0 hektar	DPUPRPRKP	
		c. Outcome: <b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</b>			
		1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh <10 Ha	Jumlah = 9,98 hektar	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit RTLH = 50 unit	DPUPRPRKP	
		3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah = 0 hektar	DPUPRPRKP	
		d. Outcome: <b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>			
		1) Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah = 15.167 unit	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah = 50 unit	DPUPRPRKP	
		3) Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah = 1.260 unit	DPUPRPRKP	
		4) Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		5) Rasio rumah dan KK	$\frac{0}{15.167} = 0,77$ A = jumlah KK = 0 KK B = jumlah unit rumah = 15.167 Unit	DPUPRPRKP dan Dinas Dukcapil	
		6) Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		e. Outcome: <b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>			
		1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah = 17	DPUPRPRKP	
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah = 0 unit	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah = 545 unit	DPUPRPRKP	
		4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Jumlah = 2.878 unit	DPUPRPRKP	
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah = 0	DPUPRPRKP	
		6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah = 0 unit	DPUPRPRKP	
		7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah = 3	DPUPRPRKP	
		8) Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah = 3	DPUPRPRKP	
		9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah = 3	DPUPRPRKP	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Outcome: <b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>			
		1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Jumlah = 0 kasus	Satpol PP dan Damkar	
		2) Jumlah Satlinmasyang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah = 350 orang	Satpol PP dan Damkar	
		3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda Kabupaten = 30 Jumlah Perbup/Perwali = 35	Satpol PP dan Damkar	
		4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah = 3 orang	Satpol PP dan Damkar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP dan Damkar	SOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukamara
		6) Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah = 324	Satpol PP dan Damkar	
		b. Outcome: <b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>			
		1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ A = kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen kajian B = jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen kajian	BPBD	
		2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{52.303}{52.303} \times 100\% = 100\%$ A = jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 52.303 jiwa B = jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 52.303 jiwa	BPBD	
		c. Outcome: <b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			
		1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 0 dokumen rencana	BPBD	Dokumen RPB sudah Selesai dibuat pada Tahun 2024, hanya saja secara regulasi masih dalam proses

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan} = 1 \text{ dokumen rencana}$		
		2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun} = 0 \text{ dokumen}</math>  <math>B = \text{jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan} = 1 \text{ dokumen}</math></p>	BPBD	Belum masuk di perencanaan Rencana Strategis Tahun 2026 sehingga belum mendapatkan Pagu Anggaran, APBD Tahun 2025
		3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{372}{55.546} \times 100\% = 0,67\%$ <p><math>A = \text{jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan} = 372 \text{ orang}</math>  <math>B = \text{jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana} = 55.546 \text{ orang}</math></p>	BPBD	
		4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{330}{55.546} \times 100\% = 0,59\%$ <p><math>A = \text{jumlah warga negara yang ikut pelatihan} = 330 \text{ orang}</math>  <math>B = \text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 55.546 \text{ orang}</math></p>	BPBD	
		5) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{0}{55.546} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops} = 0 \text{ orang}</math>  <math>B = \text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 55.546 \text{ orang}</math></p>	BPBD	
		6) Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{35.134}{55.546} \times 100\% = 63,25\%$ <p><math>A = \text{jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan} = 35.134 \text{ orang}</math></p>	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 55.546 \text{ orang}$		
		d. Outcome: <b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			
		1) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{jumlah kecepatan respon} < 24 \text{ jam untuk setiap penetapan KLB} = 0$ $B = \text{jumlah seluruh penetapan status KLB} = 0$	BPBD	
		2) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{jumlah kecepatan respon} < 24 \text{ jam untuk setiap penetapan darurat bencana} = 0$ $B = \text{jumlah seluruh penetapan status darurat bencana} = 0$	BPBD	
		3) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana} = 23 \text{ orang}$ $B = \text{jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana} = 23 \text{ orang}$	BPBD	
		4) Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{2.161}{2.961} \times 100\% = 72,98\%$ $A = \text{jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi} = 2.161 \text{ orang}$ $B = \text{perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana} = 2.961 \text{ orang}$	BPBD	
		e. Outcome: <b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			
		1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan = 83</li> <li>Jumlah Jenis layanan = 3</li> </ul>	Satpol PP dan Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak Ada	Satpol PP dan Damkar	
		3) Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak Ada	Satpol PP dan Damkar	
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Jumlah Pos Damkar = 0 unit	Satpol PP dan Damkar	
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah unit = 78 Unit Jumlah Jenis = 26 Jenis	Satpol PP dan Damkar	
		6) Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Damkar = 4 orang	Satpol PP dan Damkar	
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah relawan = 0 orang	Satpol PP dan Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Jumlah kegiatan = 4	Satpol PP dan Damkar	
6.	Sosial	a. Outcome: <b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)</b>			
		1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data = 3	Dinas Sosial dan PMD	
		2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data Penyandang disabilitas terlantar = 85</li> <li>Jumlah data anak terlantar = 28</li> <li>Jumlah data lanjut usia terlantar = 320</li> <li>Jumlah data gepeng terlantar = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah TRC = 0	Dinas Sosial dan PMD	
		4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data Penyandang disabilitas terlantar = 57</li> <li>Jumlah data anak terlantar = 28</li> <li>Jumlah data lanjut usia terlantar = 320</li> <li>Jumlah data gepeng terlantar = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan = 1 unit	Dinas Sosial dan PMD	
		6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data Penyandang disabilitas terlantar = 25</li> <li>Jumlah data anak terlantar = 8</li> <li>Jumlah data lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah data gepeng terlantar = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah = 1 unit	Dinas Sosial dan PMD	
		8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 1</li> <li>Jumlah anak terlantar = 12</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 25</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 12</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 6</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Jumlah alat bantu = 0 bh	Dinas Sosial dan PMD	
		11) Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Jumlah = 0 paket	Dinas Sosial dan PMD	
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah = 2 orang	Dinas Sosial dan PMD	
		14) Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah = 47 orang	Dinas Sosial dan PMD	
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 2</li> <li>Jumlah anak terlantar = 12</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
		16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah = 4 kegiatan	Dinas Sosial dan PMD	
		17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 1</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0</li> <li>Jumlah anak terlantar = 2</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 9</li> <li>Jumlah anak terlantar = 3</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 5</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	
		21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 16</li> <li>Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>Jumlah gepeng = 0</li> </ul>	Dinas Sosial dan PMD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		b. Outcome: <b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>			
		1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jumlah = 70 orang	Dinas Sosial dan PMD	
		2) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah = 70 orang	Dinas Sosial dan PMD	
		3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah = 2 unit	Dinas Sosial dan PMD	
		4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah = 70 paket	Dinas Sosial dan PMD	
		5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah = 0 orang	Dinas Sosial dan PMD	
		6) Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah = 0 orang	Dinas Sosial dan PMD	
7.	Tenaga Kerja	a. Outcome: <b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>			
		1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	95,04%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah = 4 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		b. Outcome: <b>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b>			
		1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{4}{15} \times 100\% = 26,67\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>A = Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n = 4 Program</p> <p>B = Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n = 15 Program</p>		
		2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{6}{15} \times 100\% = 40\%$ <p>A = Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n = 6 orang</p> <p>B = Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n = 15 orang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{19}{248} = 0,077$ <p>A = Jumlah instruktur pada tahun n = 19 orang</p> <p>B = Jumlah peserta pelatihan pada tahun n = 248 Orang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4) Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$ <p>A = Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n = 1</p> <p>B = Jumlah seluruh LPK pada tahun n = 4</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n = 4</p> <p>B = Jumlah LPK yang terdata pada tahun n = 4</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6) Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah = 248 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{248}{248} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n = 248 orang  B = Jumlah orang yang dilatih pada tahun n = 248 orang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		8) Persentase penyerapan lulusan	$\frac{128}{248} \times 100\% = 51,61\%$ <p>A = Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n = 128 orang  B = Jumlah lulusan pada tahun n = 248 orang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9) Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{32}{248} \times 100\% = 12,90\%$ <p>A = Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n = 32 orang  B = Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n = 248 orang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		10) Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah CPMI dilatih = 0 orang  B = Jumlah CPMI terdaftar = 0 orang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		11) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Jumlah = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		c. Outcome: <b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>			
		1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{0}{7} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n = 0</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{Jumlah perusahaan pada tahun } n = 7$		
		2) Data tingkat produktivitas total	$0 - (0 + 0) = 0\%$ $A = \text{Pertumbuhan Ekonomi} = 0$ $B = \text{Pertumbuhan Modal} = 0$ $C = \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja} = 0$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		d. Outcome: <b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>			
		1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n = 7$ $B = \text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih} = 7$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n = 0$ $B = \text{Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh} = 1$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	$\text{Jumlah Konfederasi SP/SB} = 0$ $\text{Jumlah Federasi SP/SB} = 0$ $\text{Jumlah SP/SB} = 0$ $\text{Jumlah SP/SB di luar perusahaan} = 0$ $\text{Jumlah Anggota SP/PB di Perusahaan} = 0$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah} = 0$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)} = 0$		
		5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan} = 7 \text{ Perusahaan}$ $B = \text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor} = 7 \text{ Perusahaan}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{0}{7} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang berselisih} = 0$ $B = \text{Jumlah perusahaan pada tahun } n = 7$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		7) Jumlah mogok kerja	Jumlah = 0 kasus mogok kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		8) Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah = 0 kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9) Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah = 0 kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah = 0 kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		11) Jumlah perselisihan PHK	Jumlah = 0 kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah = 0 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Jumlah = 1 kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah perjanjian bersama = 1 B = Jumlah kasus perselisihan = 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		e. Outcome: <b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</b>			
		1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 535	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah = 585 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah = 0 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah = 1 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah = 5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi = 2 B = Jumlah CPMI/CTKI = 2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah = 2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan = 0 B = Jumlah PMI yang pulang = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja = 0 B = Jumlah PMI/TKI = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan = 0 B = Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah LTSA yang terbentuk = 0 B = Jumlah daerah kantong PMI/TKI = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Outcome: <b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>			
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah = 0 Orang	Dinas PPPAPKB	Belum ada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG, kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Sukamara tentang PUG hanya sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG).
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program = 22 Kegiatan = 32	Dinas PPPAPKB	Program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten sukamara
		b. Outcome: <b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b>			
		1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah = 0	Dinas PPPAPKB	- Belum ada media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dan di tuangkan dalam MOU dengan Dinas P3APKB Kabupaten Sukamara dalam melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak, Media massa (cetak, elektronik) terlibat dan dilibatkan pada saat Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
					P3APPKB melakukan kegiatan tertentu. - KIE pencegahan kekerasan terhadap anak saat ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Komnfosandi Kabupaten Sukamara yang memang memiliki tugas dan fungsi dala penyebarluasan informasi daerah.
		2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah = 1	Dinas PPPAPPKB	
		3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{9}{11} \times 100\% = 82\%$ A = Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani = 9 orang B = Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten = 11 orang	Dinas PPPAPPKB	
		4) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah = 1	Dinas PPPAPPKB	
		5) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah = 0	Dinas PPPAPPKB	- Belum mendapatkan bantuan keuangan di tahun 2024/2025 karena lembaga layanan anak atau (UPPTD PPA) baru terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2024, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3APPKB Kabupaten Sukamara tanggal 13 November 2024.</p> <p>- Anggaran pelayanan anak korban kekerasan yang dilaksanakan bersumber dari APBD melalui DPA SKPD DP3APPKB Kabupaten Sukamara.</p>
		c. Outcome: <b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>			
		1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah = 0	Dinas PPPAPKB	<p>- Belum ada organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan spesifik terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk korban TPPO.</p> <p>- Kegiatan yang dilaksanakan sampai saat ini baru pada tahap sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak perempuan termasuk korban TPPO</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah = 0	Dinas PPPAPPKB	Belum ada kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih karena pelatihan yang dilaksanakan dan didapatkan selama ini masih diprioritaskan bagi pendamping korban kekerasan terhadap perempuan tingkat kabupaten.
		3) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah = 0	Dinas PPPAPPKB	
		4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah = 0	Dinas PPPAPPKB	
		5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah = 2	Dinas PPPAPPKB	
		6) Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah = 1	Dinas PPPAPPKB	
		7) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan = 1 orang  B = Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan = 1 orang</p>	Dinas PPPAPPKB	
9	Pangan	a. Outcome: <b>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</b>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2) Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		6) Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada daerah rawan pangan di Kabupaten Sukamara
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada daerah rawan pangan di Kabupaten Sukamara
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
10	Pertanahan	a. Outcome: <b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b>			
		1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{50}{54} \times 100\% = 92,59\%$ <p>A = Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi</p>	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) = 50 izin $B = \text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun} = 54 \text{ izin}$		
		2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$ $A = \text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee} = 0 \text{ penetapan}$ $B = \text{Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform} = 0 \text{ permohonan}$	DPUPRPRKP	Belum terdapat landasan hukum di Kabupaten Sukamara terkait penetapan tanah kelebihan maksimum/absentee dan belum terindikasinya lahan-lahan kelebihan maksimum dan absentee
		3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee} = 0 \text{ ha}$ $B = \text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah objek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subjek} = 0 \text{ ha}$	DPUPRPRKP	Tidak terdapat objek tanah yang menjadi output produk hukum tanah kelebihan maksimum/absentee sehingga tidak dapat dilakukan ganti kerugian terhadap sumber tanah kelebihan maksimum maupun absentee
		4) Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui} + \text{jumlah izin membuka tanah yang ditolak} = 0 \text{ dokumen}$ $B = \text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun} = 0 \text{ permohonan}$	DPUPRPRKP	Belum terdapat peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan izin membuka tanah negara
		5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah dokumen penerapan site lokasi pembangunan fisik} = 0 \text{ dokumen}$ $B = \text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun} = 1 \text{ dokumen}$	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Lingkungan Hidup	a. Outcome: <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota</b>			
		Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. Indeks Kualitas Air (IKA) = 57,69 b. Indeks Kualitas Udara (IKU) = 93,95 c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 47,59	DLH	
		b. Outcome: <b>Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota</b>			
		1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah = Ada  Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah : Ada  Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan : Ada	DLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Angkutan pengelola sampah = 7 truck</li> <li>– Data Timbulan Sampah = 4.098,33 ton/ tahun</li> <li>– Jumlah TPST = 0 Unit</li> <li>– Jumlah TPS3R = 6 unit</li> <li>– Jumlah sampah masing-masing lingkungan = 11,95 ton (Dokumen pendukung Jakstrada dalam neraca pengelolaan Sampah)</li> </ul>
		c. Outcome: <b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>			
		1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ A = Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah = 1 izin B = Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi = 1 usulan	DLH	
		2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{7}{1} \times 100\% = 700\%$ A = Jumlah PPLHD yang ada = 7 Orang B = Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah = 1 kegiatan	DLH	Pada tahun 2024 DLH Kab. Sukamara sudah memiliki jabatan fungsional PPLH sebanyak 7 orang, tetapi yang ada sertifikat PPLH Ada 1 orang.



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah MHA yang diakui dengan Peraturan Daerah = 0  B = Jumlah usulan MHA = 1</p>	DLH	1. Keputusan Bupati Sukamara tahun 2019 tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Sukamara terdiri dari 4 (Empat) MHA : a) MHA dayak Tomun Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung. b) MHA Dayak Jelai Ruku Mapam Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung. c) MHA Dayak Gambu Desa Kartamulya Kec. Sukamara. d) MHA Dayak Jelai Lari Desa Semantun Kec. Pemata Kecubung. 2. Pemetaan Identifikasi MHA di 4 titik lokasi MHA
		4) Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan = 4  B = Jumlah MHA yang ada = 4</p>	DLH	Pelatihan KEHATI untuk MHA di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
		5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan Diklat/rencana = 0 lembaga  B = Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat = 0 lembaga</p>	DLH	
		6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	DLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	A = Pengaduan masyarakat yang ditangani = 1 pengaduan B = Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi = 1		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Outcome: <b>Perekaman KTP Elektronik</b>			
		1) Penerbitan akta perkawinan	$\frac{20.378}{31.798} \times 100\% = 64,09\%$ A = Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan = 20.378 dokumen B = Peristiwa perkawinan yang dilaporkan = 31.798 perkawinan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2) Penerbitan akta perceraian	$\frac{663}{1.305} \times 100\% = 50,80\%$ A = Jumlah akta perceraian yang diterbitkan = 663 dokumen B = Peristiwa perceraian yang dilaporkan = 1.305 perceraian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3) Penerbitan akta kematian	$\frac{2.079}{2.079} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah akta kematian yang diterbitkan = 2.079 dokumen B = Peristiwa kematian yang dilaporkan = 2.079 kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4) Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun = 2 data B = 2 kali setahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Outcome: <b>Persentase pengentasan desa tertinggal</b>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah = 0 desa	Dinas Sosial dan PMD	
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	$0 - 0 = 0$ A = Jumlah Desa yang melakukan kerja sama antar desa pada tahun $n = 0$ B = Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun $n-1 = 0$	Dinas Sosial dan PMD	
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah = 0 Lembaga Masyarakat Jumlah = 0 Lembaga Adat	Dinas Sosial dan PMD	
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	$0 - 0 = 0$ A = Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun $n = 0$ B = Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun $n-1 = 0$	Dinas Sosial dan PMD	
		<b>b. Outcome: Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri</b>			
		1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah = 11 desa	Dinas Sosial dan PMD	
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	$11 - 10 = 1$ A = Jumlah Desa yang melakukan kerja sama antar desa pada tahun $n = 11$ B = Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun $n-1 = 10$	Dinas Sosial dan PMD	
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga	Jumlah = 2 Lembaga Masyarakat Jumlah = 1 Lembaga Adat	Dinas Sosial dan PMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	$0 - 0 = 0$ A = Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun $n = 0$ B = Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun $n-1 = 0$	Dinas Sosial dan PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Outcome: <b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>			
		1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas PPPAPKB	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sukamara baru ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/292/2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sukamara Tahun 2015 - 2035
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	MUKP = 20,7	Dinas PPPAPKB	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
					menentukan pola fertilitas di Indonesia.
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR = 27,87$ $ASFR_{15-19} = \frac{77}{2.684} \times 1000$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	Dinas PPPAPPKB	
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{13.099}{16.951} \times 100\% = 77,27\%$ A = Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) = 13.099 orang B = Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) = 16.951 orang	Dinas PPPAPPKB	
		5) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah = 11	Dinas PPPAPPKB	
		b. Outcome: <b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>			
		1) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{11}{12} \times 100\% = 91,66\%$ A = Jumlah fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP = 11 unit B = Jumlah fasilitas kesehatan = 12 unit	Dinas PPPAPPKB	
		2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{534}{13.618} \times 100\% = 3,92\%$ A = Jumlah peserta KB MKJP = 534 pasangan B = Jumlah Peserta KB Aktif = 13.618 pasangan	Dinas PPPAPPKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah = 2 KKBPK	Dinas PPPAPPKB	
		4) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{507}{1.104} \times 100\% = 45,92\%$ <p>A = Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern = 507 orang  B= Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan = 1.104 orang</p>	Dinas PPPAPPKB	
		c. Outcome: <b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>			
		1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Nilai = 40,32%	Dinas PPPAPPKB	
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{4.129}{5.626} \times 100\% = 73,39\%$ <p>A = Jumlah peserta KB pada Keluarga Berencana Penerima PBI = 4.129 orang  B = Jumlah Keluarga PBI = 5.626 orang</p>	Dinas PPPAPPKB	
15	Perhubungan	a. Outcome: <b>Rasio konektivitas Kabupaten/kota</b>			
		1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia = 0 unit  B = Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan = 0 unit</p>	Dinas Perhubungan	Belum ada terminal penumpang angkutan Jalan Tipe C

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{1.115}{3.572} \times 100\% = 31,21\%$ A = Jumlah kendaraan yang diuji per tahun = 1.115 unit B = Jumlah kendaraan wajib uji = 3.572 unit	Dinas Perhubungan	
		3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah penetapan tarif lintas penyebarangan = 0 B = Jumlah lintas penyebarangan dalam Kabupaten = 0	Dinas Perhubungan	
		4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{2.679}{3.399} \times 100\% = 78,81\%$ A = Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten = 2.679 B = Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten = 3.399	Dinas Perhubungan	
		b. Outcome: <b>V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota</b>			
		1) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten = 0 B = Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten = 0	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi Informatika dan	a. Outcome: <b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>			
		1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,67\%$ A = Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi = 26 unit B = Jumlah perangkat daerah keseluruhan = 30 unit	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,67\%$ <p>A = Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo = 26 unit  B = Jumlah perangkat daerah = 30 unit</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tidak Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		b. Outcome: <b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>			
		1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2015 = 0 kegiatan  B = Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah = 0</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{10}{30} \times 100\% = 33,33\%$ <p>A = Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar = 10 unit  B = Jumlah perangkat daerah keseluruhan = 30 unit</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

No	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{4}{30} \times 100\% = 30\%$ <p>A = Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan = 4 unit</p> <p>B = Jumlah perangkat daerah keseluruhan = 30 unit</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{6}{7} \times 100\% = 85,71\%$ <p>A = Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik = 6 layanan</p> <p>B = Jumlah layanan = 7 layanan</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$ <p>A = Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik = 2 layanan</p> <p>B = Jumlah layanan = 7</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan = 2</p> <p>B = Jumlah sistem elektronik = 2</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{7}{23} \times 100\% = 30,43\%$ <p>A = Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah = 7 layanan</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi} = 23 \text{ layanan}$		
		8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah} = 30 \text{ unit}$ $B = \text{Jumlah perangkat daerah keseluruhan} = 30 \text{ unit}$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,66\%$ $A = \text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data} = 26 \text{ unit}$ $B = \text{Jumlah perangkat daerah keseluruhan} = 30 \text{ unit}$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,66\%$ $A = \text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya} = 26 \text{ unit}$ $B = \text{Jumlah perangkat daerah keseluruhan} = 30 \text{ unit}$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{361}{361} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai (open source)} = 361 \text{ data}$ $B = \text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah} = 361 \text{ data}$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City} = 30 \text{ unit}$ $B = \text{Jumlah perangkat daerah} = 30 \text{ unit}$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{0}{8} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfosan = 0 orang B = Jumlah ASN pengelola TIK = 8 orang	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Master Plan = Ada Perda/Perkada = Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		c. Outcome: <b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pemerintahan Daerah = 8 komunitas/Media B = Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah = 8 komunitas/Media	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{133}{133} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) = 133 konten B = Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah = 133 konten	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP = 7 B = Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik = 7		
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Outcome: <b>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>			
		1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan = 0 ijin B = Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam = 0 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		2) Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun n = 0 ijin B = Jumlah permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun n = 0 permohonan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{10}{88} \times 100\% = 11,36\%$ A = Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi = 10 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{22} \times 100\% = 13\%$ A = Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya = 0 unit B = Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada = 22 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{26}{88} \times 100\% = 29\%$ A = Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan = 26 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		6) Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0,00\%$ A = Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian = 0 orang B = Jumlah anggota koperasi yang ada = 0 orang	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{88} \times 100\% = 0,00\%$ A = Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan = 0 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	-	Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota, IKK ini tidak perlu diisi
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{88} \times 100\% = 1,13\%$ A = Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) = 1 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{88} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan = 0 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{88} \times 100\% = 0,00\%$ A = Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 0 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{4}{88} \times 100\% = 4,54\%$ A = Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha = 4 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{88} \times 100\% = 0,00\%$ A = Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan = 0 unit B = Jumlah koperasi yang ada = 88 unit	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		b. Outcome: <b>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>			
		1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0,00\%$ A = Jumlah pertumbuhan wirausaha baru = 0 unit usaha B = Jumlah wirausaha yang ada = 0 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{0}{6.699} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data Online (ODS) = 0 unit usaha B = Jumlah usaha mikro yang ada = 6.699 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{0}{6.699} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usaha mikro yang bermitra = 0 unit usaha B = Jumlah usaha mikro yang ada = 6.699 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi = 0 unit usaha B = Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk = 0 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		5) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 0 unit usaha B = Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran = 0 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{40}{6.699} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan = 0 unit usaha B = Jumlah usaha mikro yang ada = 6.699 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{0}{6.699} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha = 0 unit usaha B = Jumlah usaha mikro yang ada = 6.699 unit usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
18.	Penanaman Modal	a. Outcome: <b>Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota</b>			
		1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah = 0 Perda	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah = 0 kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		5) Kegiatan pameran penanaman modal	Ada 4 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah = 46 kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah = 3.720 Izin	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah Nilai = Rp. 778.580.268.442,-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah = 23 orang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah = 4 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan yg diterima = 15 data Jumlah permintaan yg terpenuhi = 15 data	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	a. Outcome: <b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah = 0 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah = 0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		b. Outcome: <b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>			
		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah = 0 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah = 0 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		c. Outcome: <b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>			
		1) Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Jumlah = 0 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah = 0 kali	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
20.	Statistik	a. Outcome: <b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>			
		1) Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah = 361	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah = 0	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah = 361	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{361}{361} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral = 361 B = Jumlah kegiatan statistik sektoral = 361	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{361}{361} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah metadata indikator statistik sektoral = 361 B = Jumlah indikator statistik sektoral = 361	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
21	Persandian	a. Outcome: <b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>			
		1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah kegiatan strategis teramankan = 0 kegiatan B = Jumlah kegiatan strategis yang ada = 0 kegiatan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	A = Jumlah Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian = 0 SE B = Jumlah Sistem Elektronik yang ada = 0 SE		
		3) Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah Sistem Elektronik atau aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah = 0 SE B = Jumlah Sistem Elektronik yang ada = 0 SE	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah titik teramankan = 0 titik B = Jumlah titik pada PHKS = 0 titik	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
22.	Kebudayaan	a. Outcome: <b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>			
		1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) = 15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK = disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya = $0 + 0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan = 4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola = $0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan + Jumlah CB dihapuskan = $0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6) Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) = $0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7) Layanan perizinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		8) Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) = $0 + 0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		9) Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)= $0 + 0 + 0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	-	Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota, IKK ini tidak perlu diisi
		14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk = 0 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		15) Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		17) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum = $0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		18) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) = $0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		19) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) = $0 + 0 = 0$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		20) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat = 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	a. Outcome: <b>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</b>			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{53.211}{64.431} \times 100\% = 82,5\%$ <p>A = Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayah kabupaten = 53.211 eksemplar  B = Jumlah penduduk di kabupaten = 64.431 jiwa</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2) Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{15.794}{64.431} \times 100\% = 24,51\%$ <p>A = Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara Online maupun on site = 15.794 orang  B = Jumlah penduduk di kabupaten = 64.431 jiwa</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{154}{64.431} = 0,0023\%$ <p>A = Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayah kabupaten = 154 orang  B = Jumlah penduduk di kabupaten = 64.431 jiwa</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{13}{112} \times 100\% = 38,23\%$ <p>A = Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan = 13 unit  B = Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di kabupaten = 112 unit</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah = 5 kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		b. Outcome: <b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>			
		1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah = 0 item	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sampai dengan tahun 2024 belum ditemukan naskah kuno

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialih bahasa	Jumlah = 0 item	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sda
		3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah = 0 item	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sampai dengan tahun 2024 belum terdapat koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan
24.	Kearsipan	a. Outcome: <b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</b>			
		1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{109}{109} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 109 B = Jumlah seluruh arsip aktif = 109	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{35}{1.570} \times 100\% = 2,22\%$ A = Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 35 B = Jumlah seluruh arsip in-aktif = 1.570	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 0 B = Jumlah seluruh arsip statis = 0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 0 B = Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah daerah = 0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		b. Outcome: <b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>			
		1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25.	Kelautan dan Perikanan	a. Outcome: <b>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Kabupaten (sumber data: one data KKP)</b>			
		1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah = 0	Dinas Perikanan	Selama ini nelayan sebenarnya melakukan diversifikasi usaha untuk menunjang perekonomian pada saat tidak melaut karena faktor cuaca, namun Dinas Perikanan belum pernah melakukan pendataan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah TPI yang operasional = 0 unit  B = Jumlah seluruh TPI yang ada = 0 unit</p>	Dinas Perikanan	Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan TPI Kuala Jelai masuk dalam Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya ikut diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) Kabupaten Sukamara dari Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 Oktober 2016
		3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah = 19 izin	Dinas Perikanan	
		4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek	Jumlah = 0 Orang	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih = 299.000 ekor	Dinas Perikanan	
26.	Pariwisata	a. Outcome: <b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</b>			
		1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi = 3	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata = 105 unit	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota = 0	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah = 3	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri = 1  Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota = 0	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri = 0	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{0}{25} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi = 0 orang B = Jumlah tenaga kerja pariwisata = 25 orang	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9) Persentase SDM peserta pembekalan kepariwisataan sektor	$\frac{40}{120} \times 100\% = 33,33\%$ A = Jumlah peserta pembekalan kepariwisataan = 40 orang B = Jumlah sasaran pembekalan kepariwisataan = 120 orang	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah = 5 lokasi	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
27.	Pertanian	a. Outcome: <b>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</b>			
		1) Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Sarana dan Prasarana berupa peralatan dan perlengkapan pertanian = 551 Unit Prasarana berupa Jalan Usaha dll = 222.148 Meter Cetak Sawah = 1.184 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2) Prasarana pertanian yang digunakan	Sarana dan Prasarana berupa peralatan dan perlengkapan pertanian = 55 Unit Prasarana berupa Jalan Usaha dll = 222.148 Meter Cetak Sawah = 1.184 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian = 0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		4) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{551}{551} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah sarana yang aktif digunakan = 551 Unit B = Jumlah sarana yang dibangun = 551 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		5) Persentase jumlah usulan usaha pertanian Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah usulan yang difasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 0 usulan $B$ = Jumlah usulan usaha pertanian = 0 usulan		
		b. Outcome: <b>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</b>			
		1) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$ $A$ = Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 13 ha $B$ = Luas area terkena bencana = 13 ha Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
28.	Kehutanan				
		1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak Ada	-	Sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Sukamara belum memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi = 0	-	
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi = 0 hektar	-	
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun = 0	-	
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Outcome: <b>Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota</b>			
		1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah = 0 izin	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Bagian Perekonomian dan	Tidak ada panas bumi yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Sukamara



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
30.	Perdagangan	a. Outcome: <b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>			
		1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja = 0 izin B = Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar = 0 permohonan = 0 izin</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja = 0 izin B = Jumlah permohonan izin toko swalayan dokumennya sudah lengkap dan benar = 0 permohonan</p>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		2) Persentase penerbitan TDG	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja = 0 B = Jumlah permohonan penerbitan TDG = 0</p>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah penerbitan TDG = 0 B = Jumlah gudang yang ada = 0</p>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	<p>Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari</p>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<p>kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar = 0</p> <p><math>B = \text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri} = 0</math></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar} = 0</math></p> <p><math>B = \text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri} = 0</math></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar} = 0</math></p> <p><math>B = \text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri} = 0</math></p>		
		5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan}</math></p>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten = 0 B = Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer = 0		
		6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah SKA yang terbit $\leq 1$ hari kerja (1x24 jam) = 0 B = Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (0 + 0) \times 100\% = 0\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok = 5,02%	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		b. Outcome: <b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>			
		1) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{355,9}{(90\% \times 412,8)} \times 100\% = 95,79\%$ a = Jumlah pupuk yang disalurkan = 413,8 Ton b = Target Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kabupaten sebesar (90% dari RDKK) = 436,95 Ton c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) = 485,5 Ton	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah daerah = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		c. Outcome: <b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>			
		1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{42}{345} \times 100\% = 12,17\%$ A = Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun n = 42 B = Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten = 345	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku = 0 B = Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
31.	Perindustrian	a. Outcome: <b>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota</b>			
		1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan = 0 B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		b. Outcome: <b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</b>			
		1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK = 50%  Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) = Ada b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) = Ada	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Kabupaten (25%) = Tidak Ada d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Bupati (15%) = Tidak Ada e) Penetapan Perda RPIK (10%) = Tidak Ada  Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Jika Ya = 100%; jika tidak = 0%		
		c. Outcome: <b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>			
		1) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan untuk usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan = 0 B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		d. Outcome: <b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>			
		1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di wilayah Kabupaten di SIINas = 0 B = Total populasi perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di wilayah Kabupaten = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
		e. Outcome: <b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>			
		1) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	$\frac{0}{546} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$A = \text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di wilayah Kabupaten di SIINas} = 0$ $B = \text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di wilayah Kabupaten} = 546$		
32.	Transmigrasi				
		1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Jumlah = 1 Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah = 2 (dua) Satuan Pemukiman (SP1 Pulau Nibung dan SP1 Sungai Baru)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3) Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Jumlah = 1 (satu) UPT SP1 Pulau Nibung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{1.677}{2.474} \times 100\% = 67,78\%$ <p>A = Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1.677 orang  B = Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 2.474 Orang</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{6.951}{7.514} \times 100\% = 92,50\%$ <p>A = Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 6.951 orang  B = Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 7.514 orang</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{2.825}{3.629} \times 100\% = 77,63\%$ <p>A = Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 2.825 orang  B = Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 3.629 orang</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{116}{187} \times 100\% = 80,77\%$ <p>A = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 116 orang  B = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 187 orang</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.	Kesehatan	1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per 1.000 penduduk)	$\frac{104}{67.234} = 1,54$ A = Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 104 jiwa B = Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 67.234 jiwa	RSUD dan Dinas Dukcapil	
		2) Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1 unit B = Jumlah RS di Kabupaten/Kota = 1 Unit	RSUD	Terakreditasi Paripurna
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{1.139}{1.139} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 1.139 jiwa B = Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota = 1.139 jiwa	Dinas Kesehatan	
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{1.097}{1.097} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 1.097 jiwa B = Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota = 1.097 jiwa	Dinas Kesehatan	
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{1.094}{1.094} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.095 jiwa B = Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota = 1.094 jiwa	Dinas Kesehatan	
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{5.748}{5.748} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.748 jiwa B = Jumlah balita di Kabupaten/Kota = 5.748 jiwa	Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{9.301}{11.143} \times 100\% = 83,46\%$ <p>A = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 9.301 jiwa  B = Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota = 11.143 jiwa</p>	Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil	
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{29.152}{45.358} \times 100\% = 64,27\%$ <p>A = Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 31.392 jiwa  B = Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota = 43.399 jiwa</p>	Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil	
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{3.582}{4.087} \times 100\% = 87,64\%$ <p>A = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 3.582 jiwa  B = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota = 4.087 jiwa</p>	Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil	
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{7.218}{7.218} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 7.218 jiwa  B = Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota = 7.218 jiwa</p>	Dinas Kesehatan	
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{1000}{1000} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.000 jiwa  B = Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota = 1.000 jiwa</p>	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{104}{104} \times 100\% = 100\%$ A = jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 104 jiwa B = jumlah penderita ODGJ di Kabupaten = 104 jiwa	Dinas Kesehatan	
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{635}{635} \times 100\% = 100\%$ A = jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 635 jiwa B = jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota = 635 jiwa	Dinas Kesehatan	
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{2.195}{2.195} \times 100\% = 100\%$ A = jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 2.195 jiwa B = jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV pada Kabupaten/Kota = 2.195 jiwa	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{24,482}{30.268,66} \times 100\% = 0,08\%$ A = Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 24,482 ha B = Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 30.268,66 ha	DPUPRPRKP	Luasan Daerah Rawan Banjir Berdasarkan Perda RTRW
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	$\frac{24,482}{127,5} \times 100\% = 0\%$ A = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 24,482 m <sup>2</sup> B = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 127,5 m <sup>2</sup>		
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{1.811,1}{8.652} \times 100\% = 20,93\%$ A = Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 1.811,1 ha B = luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 8.652 ha	DPUPRPRKP	
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{6.884}{20.057} \times 100\% = 34,32\%$ A = Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota = 6.884 KK B = Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut = 20.057 KK	DPUPRPRKP	
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{2.969}{13.907} \times 100\% = 21,34\%$ A = Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 2.878 unit B = jumlah rumah di Kabupaten = 15.764 unit	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 32  B = Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 32</p>	DPUPRPRKP	
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{220,92}{581,525} \times 100\% = 37,98\%$ <p>A = Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 220,92 KM  B = Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 581,525 KM</p>	DPUPRPRKP	
		8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{281}{750} \times 100\% = 37,46\%$ <p>A = Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 281 orang  B = Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 750 orang</p>	DPUPRPRKP	
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{377}{377} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 377 paket  B = Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 377 paket</p>	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0 unit  B = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0 unit</p>	DPUPRPRKP	
		2) Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	$\frac{0}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 KK  B = Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0 KK</p>	DPUPRPRKP	
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{0}{41,89} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 0 ha  B = Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 41,89 ha</p>	DPUPRPRKP	
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{1.260}{15.167} \times 100\% = 8,30\%$ <p>A = Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1.260 unit  B = Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 15.167 unit</p>	DPUPRPRKP	
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{545}{545} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 545 unit</p>	DPUPRPRKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{Jumlah unit rumah kab/kota} = 545 \text{ unit}$		
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah pengaduan yang ditangani} = 0 \text{ pengaduan}$ $B = \text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} = 0 \text{ pengaduan}$	Satpol PP dan Damkar	
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{2}{65} \times 100\% = 3,07\%$ $A = \text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan} = 2 \text{ perda/perkada}$ $B = \text{Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi} = 65 \text{ perda/perkada}$	Satpol PP dan Damkar	
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{52.303}{55.546} \times 100\% = 94,16\%$ $A = \text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana} = 52.303 \text{ jiwa}$ $B = \text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan} = 55.546 \text{ jiwa}$	BPBD	
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{52.968}{55.546} \times 100\% = 95,35\%$ $A = \text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} = 52.968 \text{ jiwa}$ $B = \text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 55.546 \text{ jiwa}$	BPBD	
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{2.161}{2.161} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = 2.161 \text{ jiwa}$ $B = \text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana} = 2.161 \text{ jiwa}$	BPBD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Satuan Pol PP dan Damkar + jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Satpol PP dan Damkar = 6 kegiatan</p> <p>B = Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten = 6 kejadian</p>	Satpol PP dan Damkar	
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran = 7,84 menit	Satpol PP dan Damkar	Rata-rata waktu yang diperlukan dalam penanganan kebakaran, dihitung dari sejak laporan masuk, penyiapan peralatan/perengkapan, sampai tiba pada lokasi kebakaran
6.	Sosial	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{403}{433} \times 100\% = 93,07\%$ <p>A = Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 403 jiwa</p> <p>B = Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis = 433 jiwa</p>	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 70 jiwa</p>	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota} = 70 \text{ jiwa}$		
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD} = 2 \text{ kegiatan}$ $B = \text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota} = 2 \text{ kegiatan}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{657}{33.957} \times 100\% = 1,93\%$ $A = \text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} = 657 \text{ orang}$ $B = \text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan} = 33.957 \text{ orang}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPS	
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{3.527.900.000.000}{33.957} \times 100\% = 10.389.315.899,52$ $A = \text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)} = 3.527.900.000.000$ $B = \text{Jumlah tenaga kerja} = 33.957 \text{ orang}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPS	
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} = 7 \text{ perusahaan}$ $B = \text{Jumlah seluruh perusahaan} = 7 \text{ perusahaan}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan	$\frac{521}{558} \times 100\% = 93,36\%$ $A = \text{Jumlah pencari (Pencari Kerja) yang ditempatkan} = 521 \text{ orang}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	B = Jumlah pencari (Pencari Kerja) yang terdaftar = 558 orang		
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{89.313.135.537}{694.336.571.385} \times 100\% = 12,86\%$ A = Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD APBD = Rp. 89.313.135.537 B = Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = Rp. 694.336.571.385	Dinas PPPAPPKB dan BPKAD	
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 11 jiwa B = Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 11 Jiwa	Dinas PPPAPPKB dan Dukcapil	
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{3}{32.088} \times 100.000 = 9,34$ A = jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 3 orang B = jumlah penduduk (perempuan berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota) = 32.088 jiwa	Dinas PPPAPPKB dan Dukcapil	
9	Pangan	1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{6,94}{6,94} \times 100\% = 100\%$ A = jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota = 6,94 ton B = Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 6,94 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
10.	Pertanahan	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{23.903.359}{29.702.689,83} \times 100\% = 80,47\%$ <p>A = Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 23.903.359 ha  B = Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 29.702.689,83 ha</p>	DPUPRPRKP	
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{13.212,9}{13.212,9} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 13.212,9 ha  B = Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 13.212,9 ha</p>	DPUPRPRKP	
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{130.189}{29.702.689,83} \times 100\% = 0,43\%$ <p>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 130.189 ha  B = Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 29.702.689,83 ha</p>	DPUPRPRKP	
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima <math>\geq 0,5</math> ha = 0 subjek  B = Jumlah penerima tanah objek landreform = 0 subjek</p>	DPUPRPRKP	Penyebab tidak tercapainya kinerja: belum terdapat landasan hukum di Kabupaten Sukamara terkait penetapan tanah kelebihan maksimum/absentee. Terkait tanah kelebihan maksimum mengacu kepada peraturan perundang-undangan adalah batas 5 Ha untuk lahan garapan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 0 ha B = Luas izin membuka tanah yang diterbitkan = 1 ha	DPUPRPRKP	Kendala tidak tercapainya Indikator ini adalah sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan izin membuka tanah negara. Diindikasikan terdapat tumpang tindih dengan kewenangan di bidang urusan lain
		6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ A = Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 1 kasus B = Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1 kasus	DPUPRPRKP	
11.	Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	IKLH = 70,16	DLH	
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{15.663,85}{17.686,31} \times 100\% = 88,56\%$ A = Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 15.663,85 m <sup>3</sup> B = Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 17.686,31 m <sup>3</sup>	DLH	
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{0}{7} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0 B = usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 7	DLH	

No	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Perekaman KTP Elektronik	$\frac{46.235}{47.031} \times 100\% = 98,30\%$ <p>A = Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 46.235 jiwa  B = jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 47.031 jiwa</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{14.777}{20.194} \times 100\% = 73,17\%$ <p>A = Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 14.777 jiwa  B = Jumlah anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari = 20.194 jiwa</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3) Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{20.530}{21.386} \times 100\% = 95,99\%$ <p>A = Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 20.530 jiwa  B = Jumlah anak usia 0-18 tahun = 21.386 jiwa</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4) Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{5}{11} \times 100\% = 45,45\%$ <p>A = Jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama = 5 unit  B = Jumlah perangkat daerah berpotensi menggunakan data kependudukan = 11 unit</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per akhir tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun = 1 Desa  B = jumlah desa tertinggal per awal tahun = 1 desa</p>	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{4}{10} \times 100\% = 40\%$ <p>A = Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per akhir tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun = 4 desa  B = Jumlah desa berkembang pada awal tahun = 10 desa</p>	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = Angka Kelahiran Total= 2,06	Dinas PPPAPKB dan Dukcapil	
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{11.034}{13.618} \times 100\% = 91,02\%$ <p>A = Jumlah peserta KB aktif modern = 11.034 pasangan  B = Jumlah pasangan usia subur = 13.618 pasangan</p>	Dinas PPPAPKB	
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{2.031}{13.618} \times 100\% = 14,91\%$ <p>A = Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 2.301 pasangan  B = Jumlah pasangan usia subur = 13.618 pasangan</p>	Dinas PPPAPKB	
15.	Perhubungan	1) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	<p>Rasio Konektivitas = 0</p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut)</li> </ul>	Dinas Perhubungan	Sampai dengan Tahun 2024 belum ada penetapan Trakyek Angkutan Jalan maupun Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p>		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>		
		2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota = 0	Dinas Perhubungan	Dinas terkait belum pernah melakukan pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena kondisi lalu lintas jalan masih lengang sehingga belum perlu dilaksanakan pengukuran kinerja lalu lintas
16.	Komunikasi dan Informatika	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,66\%$ <p>A = Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosan = 26 unit</p>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{Jumlah perangkat daerah} = 30 \text{ unit}$	Bagian Organisasi Setda	
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{7}{23} \times 100\% = 30,43\%$ $A = \text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi} = 7$ $B = \text{Jumlah layanan publik} = 23$	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{4.815}{39.179} \times 100\% = 12,28\%$ $A = \text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah} = 59.339 \text{ jiwa}$ $B = \text{Jumlah penduduk} = 39.179 \text{ jiwa}$	Dinas Kominfosan dan Dinas Dukcapil	
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{17}{45} \times 100\% = 37,77\%$ $A = \text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset} = 17 \text{ unit}$ $B = \text{jumlah seluruh koperasi} = 45 \text{ unit}$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{2.758}{6.699} \times 100\% = 41,17\%$ $A = \text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha} = 2.758 \text{ Unit}$ $B = \text{Jumlah usaha mikro keseluruhan} = 6.699 \text{ Unit}$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
18.	Penanaman Modal	1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Rp.}361.999.788.772}{\text{Rp.}416.580.479.670} \times 100\% = 86,89\%$ $A = (\text{jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di Kabupaten/Kota} = \text{Rp. } 778.580.268.442 - \text{Rp. } 416.580.479.670 = \text{Rp. } 361.999.788.772$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$B = \text{Jumlah investasi tahun } n-1 = \text{Rp. } 416.580.479.670$		
19.	Kepemudaan dan olahraga	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{912}{17.488} \times 100\% = 5,21\%$ $A = \text{Jumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten/Kota} = 912 \text{ jiwa}$ $B = \text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten/Kota} = 17.488 \text{ jiwa}$	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{3.473}{17.488} \times 100\% = 19,85\%$ $A = \text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten} = 3.473 \text{ jiwa}$ $B = \text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kabupaten} = 17.488 \text{ jiwa}$	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 10 medali	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
20.	Statistik	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,66\%$ $A = \text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah} = 26 \text{ unit}$ $B = \text{Jumlah perangkat daerah} = 30 \text{ unit}$	Dinas Kominfo	
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{26}{30} \times 100\% = 86,66\%$ $A = \text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah} = 26 \text{ unit}$ $B = \text{Jumlah perangkat daerah} = 30 \text{ unit}$	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
21.	Persandian	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{259}{645} \times 100\% = 40,15\%$ <p>A = Jumlah nilai per area keamanan informasi = 259  B = Jumlah area penilaian = 645</p>	Dinas Kominfo	
22.	Kebudayaan	1) Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 0 situs  B = jumlah cagar budaya yang terdata = 0 situs</p>	Dinas Dikbud	Tidak ada capaian karena di Kabupaten Sukamara belum terdapat Cagar Budaya yang sudah ditetapkan
23.	Perpustakaan	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<p>Nilai = 61,39</p> <p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p>	Dinas Perpustakaan	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks = 89,61</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan aliterasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan  UPLM 2 = Ketercukupan koleksi  UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan  UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan  UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP  UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan  UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p>	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat: $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$		
24.	Kearsipan	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = 50$ $\text{Rumus : } T = (a + 100 + 100 + j)/4$ <p>           T = Tingkat ketersediaan arsip            a = Persentase arsip aktif yang telah di buatkan daftar arsip            i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip            s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik            j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN         </p>	Dinas Perpustakaan	
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = 16,6$ $\text{Rumus: } T = (m + b + g + 100 + c + i)/6$ <p>           T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban            m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK            b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK            g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK            a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK         </p>	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>		
25	Kelautan dan Perikanan	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dikabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	$\frac{6.892,302}{7.092,51} \times 100\% = 97,17\%$ <p>A = Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 6.892,302Ton</p> <p>B = Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 7.092,51Ton</p> <p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: satu data KKP)</p>	Dinas Perikanan	
26.	Pariwisata	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{3-2}{2} \times 100\% = 50\%$ <p>A = Jumlah wisatawan mancanegara tahun n – jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 = 3-2 = 1 jiwa</p> <p>B = Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 = 2 jiwa</p>	Dinas Porapar	
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{62.484 - 37.471}{37.471} \times 100\% = 66,75\%$ <p>A = Jumlah wisatawan nusantara tahun n – jumlah wisatawan nusantara n-1 = 62.484 – 37.471 = 25.013 jiwa</p> <p>B = Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1 = 37.471 jiwa</p>	Dinas Porapar	
		3) Tingkat hunian akomodasi	$\frac{1.032}{62.780} \times 100\% = 1,64\%$ <p>A = Jumlah kamar yang terjual = 1.032 kamar</p> <p>B = Jumlah kamar yang tersedia = 62.780 kamar</p>	Dinas Porapar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{74.600.000.000}{6.497.900.000.000} \times 100\% = 1,14\%$ <p>A = Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = Rp. 74.600.000.000  B = Total PDRB Berlaku = 6.497.900.000.000</p>	Dinas Porapar dan Buku Sukamara Dalam Angka Tahun 2024	
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{1.800.148.283}{46.340.723.172,7} \times 100\% = 3,88\%$ <p>A = Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = Rp. 1.800.148.283  B = Total realisasi PAD = Rp. 46.340.723.172,7</p>	Dinas Porapar dan BPKAD	
27.	Pertanian	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{41,8}{861,08} \times 100\% = 4,85\%$ <p>A = Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 41,8 Ton  B = luas panen = 861,08 ha</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{431-391}{391} \times 100\% = 10,23\%$ <p>A = Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun n – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun n-1 = 40 kasus  B = Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun n-1 = 391 kasus</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
28.	Kehutanan				
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin = 0 perusahaan  B = Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0 perusahaan</p>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Bagian Perekonomian dan Kesra Setda	Kabupaten Sukamara tidak memiliki panas bumi yang dapat dimanfaatkan
30.	Perdagangan	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	$\frac{14}{26} \times 100\% = 53,84\%$ <p>A = Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 14</p>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	$B = \text{Jumlah pelaku usaha di Kabupaten} = 26$		
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{355,9}{412,8} \times 100\% = 86,21\%$ $A = \text{Realisasi RDKK} = 355,9 \text{ Ton}$ $B = \text{RDKK} = 412,8 \text{ Ton}$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	
		3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{42}{345} \times 100\% = 12,17\%$ $A = \text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun } n = 42$ $B = \text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten} = 345$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
31.	Perindustrian	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{571-547}{547} \times 100\% = 4,38\%$ $A = \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1 = 24$ $B = \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1 = 547$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Nilai = 0	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Dokumen RPIK baru disusun pada akhir Tahun 2024, sehingga sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK tahun 2024 belum dapat dicapai dan diperhitungkan.
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan} = 0 \text{ izin}$ $B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 0 \text{ izin}$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Tidak ada Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 izin B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 0 izin	dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga tidak ada kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap IPUI
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 izin B = jumlah izin yang dikeluarkan = 0 izin	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tidak ada Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga tidak ada kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap IUKI dan IPKI
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai = 50% + 10% + 10% + 10% + 10% + 10% = 100%  1) Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) = Ya - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) = Tidak - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)  2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) = Ya - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) = Ya - Informasi bahan bakar/ energy (10%) = Tidak - Informasi tenaga kerja (10%) = Ya - Informasi Investasi (10%) = Ya	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
32.	Transmigrasi				Tidak Ada Kewenangan Daerah

### 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan Dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{249.493.342.963}{960.794.760.852,7} = 25,02\%$ <p>A = Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 249.493.342.963  B = jumlah belanja pada APBD = Rp. 960.794.760.852,7</p>	BPKAD	
		2) Rasio PAD	$\frac{46.340.723.172,7}{960.794.760.852,7} \times 100\% = 4,82\%$ <p>A = Jumlah PAD = Rp. 46.340.723.172,7  B = Jumlah Pendapatan pada APBD = 960.794.760.852,7</p>	BPKAD	Belum optimalnya penggunaan instrumen kebijakan untuk optimalisasi PAD, Pendapatan terbesar masih berasal dari Pendapatan Transfer
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{494.363.676.399,85}{73.244.179.165.718} \times 100\% = 61,60\%$ <p>A = Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 494.363.676.399,85  B = Jumlah belanja APBD = 73.244.179.165.718</p>	BPKAD	
		6) Opini Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD 10 Tahun terakhir: Tahun 2013 = WTP Tahun 2014 = WTP Tahun 2015 = WTP Tahun 2016 = WTP Tahun 2017 = WTP Tahun 2018 = WTP Tahun 2019 = WTP Tahun 2020 = WTP	BPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Tahun 2021 = WTP Tahun 2022 = WTP Tahun 2023 = WTP Tahun 2024 = Dalam Proses  WTP = 10 kali WDP = 0 kali Disclamer = 0 kali		
2.	Pengadaan	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ A = Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama pada tahun n = 0 paket B = jumlah kontrak keseluruhan pada tahun n = 1 paket	UKPBJ	
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{298}{2.015} \times 100\% = 14,78\%$ A = Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/lelang = 298 paket B = Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif/selain lelang = 2.015 paket	UKPBJ	
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{519.925.533.904}{901.153.788.069,46} \times 100\% = 57,69\%$ A = Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 519.925.533.904 B = Total belanja operasi dan modal = 901.153.788.069,46	UKPBJ	
		4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada	$\frac{(400.079.420.214 - 146.265.930.272)}{146.265.930.272} \times 100\% = 173,52\%$ A = Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha	UKPBJ	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n-1 = Rp. 400.079.420.214 – Rp. 146.265.930.272 = Rp. 253.813.489.942 B = Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n-1 = Rp. 146.265.930.272		
4.	Kepegawaian	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{745}{894} \times 100\% = 83,33\%$ A = Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas = 745 orang B = Jumlah seluruh pegawai = 894 orang	BKPSDM	
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{201}{894} \times 100\% = 22,48\%$ A = Jumlah PNS fungsional tertentu (di luar guru dan kesehatan) = 201 orang B = Jumlah seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 894 orang	BKPSDM	
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{41}{201} \times 100\% = 20,39\%$ A = Jumlah pegawai fungsional (tertentu) yang memiliki sertifikat kompetensi = 41 orang B = Jumlah PNS fungsional (tertentu) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan = 201 orang	BKPSDM	
5.	Manajemen Keuangan	1) Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[ \frac{996.905.458.011,46}{854.905.552.206,00} - 1 \right] \times 100\% = 16,61\%$ A = Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi = 996.905.458.011,46 B = Total belanja APBD (sebelum perubahan) = Rp. 854.905.552.206,00	BPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[ \frac{46.340.723.172,70}{40.455.527.184,00} - 1 \right] \times 100\% = 14,54\%$ <p>A = Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = 46.340.723.172,70  B = total PAD dalam APBD (sebelum perubahan) = Rp. 40.455.527.184,00</p>	BPKAD	
		3) Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)	BPKAD	
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{74.506.528.380,28}{705.097.669.371,00} \times 100\% = 10,56\%$ <p>A = Nilai realisasi SiLPA = Rp. 74.506.528.380,28  B = total belanja tahun sebelumnya (sebelum perubahan) = Rp. 705.097.669.371,00</p>	BPKAD	
6.	Transparansi dan Partisipasi Publik	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{2.103.436.763}{2.316.282.834} \times 100\% = 90,81\%$ <p>A = Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2.103.436.763  B = Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2.316.282.834</p>	Dinas Kominfo	
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda = 12 dokumen  B = Total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12 dokumen</p>	Dinas Kominfo	

## 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Sukamara Tahun 2024, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 58 (Lima puluh delapan) indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024**  
**Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	%	0,28
		1.1	Pelayanan publik yang sudah Terintegrasi	%	100
		1.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	35,85
		1.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	6
		1.4	Angka kecelakaan lalu lintas	%	5
		1.5	Indeks SPBE		2,5
		1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat		18,74
		1.7	Persentase kawasan pertanian yang menggunakan akses pengairan	Indeks	70
		1.8	Persentase penduduk berakses air minum/air bersih	%	22,44
		1.9	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,00
		1.10	Persentase air limbah yang dikelola sesuai standar	%	14,62
		1.11	Rasio rumah layak huni	%	37,00
		1.12	Persentase areal kawasan kumuh	%	7,00
		1.13	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	60
		1.14	Rasio Ruang Terbuka	%	6,30

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
			Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB		
2	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70
			PDRB Per Kapita	Juta Rupiah /Tahun	83,68
		2.1	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Juta/Tahun	27,14
		2.2	PDRB sektor Perdagangan	Juta/Tahun	794,7
		2.3	PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Juta/Tahun	62,8
		2.4	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	30,63
		2.5	Nilai Pola Pangan Harapan	Skor	88,5
		2.6	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	719.917.255.507
3	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	%	70,68
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50
			Angka Kemiskinan	%	3,20
		3.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,25
		3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18
		3.3	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,59
		3.4	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	8
		3.5	Jumlah Potensi Cagar Budaya yang diidentifikasi	Cagar Budaya	1
		3.6	Persentase wirausaha muda	%	0,12
		3.7	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabang	11
		3.8	Indeks pembangunan Gender	%	92
		3.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	95
		3.10	Persentase PPKS yang tertangani	%	51
		3.11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	%	35.00
		3.12	Rasio tenaga kerja yang menjalankan usaha/bekerja terhadap tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	%	50
4	Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,43
5	Meningkatkan Kualitas tata		Nilai Pelaksanaan	Point	65

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
	kelola pemerintah dalam menyelenggara pelayanan publik		Reformasi Birokrasi		
		5.1	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	%	100
		5.2	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi	%	100
		5.3	NILAI SAKIP	Predikat/ Nilai	B/>60
		5.4	NILAI LPPD	Nilai	2,97
		5.5	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	Indeks	0,817
		5.6	Indeks SPBE	Indeks	2,5
		5.7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	36,12
		5.8	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100
		5.9	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah	%	85
		5.10	Opini BPK		WTP
		5.11	Indeks Kemandirian keuangan	Indeks	0,12
		5.12	Indeks Pencegahan Korupsi	Indeks	3
		5.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50
6	Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman		Angka Kriminalitas	%	50
		6.1	Persentase penegakan perda	%	90,00
		6.2	Capaian Pembinaan terhadap ormas, LSM dan OKP aktif	Ormas	60
		6.3	Cakupan Pelayanan Bencana	%	100
		6.4	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100

**b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja**

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan		Indeks Gini	%	0,28	0,289	100%
		1.1	Pelayanan publik yang sudah Terintegrasi	%	100	N/a	0%



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024		
					Target	Realisasi	Capaian
	memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	1.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	35,85	37,99	105,97%
		1.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	6	17	283,33%
		1.4	Angka kecelakaan lalu lintas	%	5		
		1.5	Indeks SPBE		2,5	2,75	110%
		1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat		18,74	14,19	75,72%
		1.7	Persentase kawasan pertanian yang menggunakan akses pengairan	Indeks	70	56,02	80,03%
		1.8	Persentase penduduk berakses air minum/air bersih	%	22,44	21,82	97,24%
		1.9	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,00	18,82	21,39%
		1.10	Persentase air limbah yang dikelola sesuai standar	%	14,62	18,82	128,73%
		1.11	Rasio rumah layak huni	%	37,00	20,87	56,41%
		1.12	Persentase areal kawasan kumuh	%	7,00	1,09	15,57%
		1.13	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	60	52	86,67%
		1.14	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB	%	6,30	1,31	20,79%
2	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70	3,89	68,25%
			PDRB Per Kapita	Juta Rupiah /Tahun	83,68	95,83	114,52%
		2.1	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Juta/Tahun	27,14	N/a	0,00%
		2.2	PDRB sektor Perdagangan	Juta/Tahun	794,7	885,2	111,39%
		2.3	PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Juta/Tahun	62,8	74,6	118,79%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024		
					Target	Realisasi	Capaian
		2.4	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	30,63	30,64	100,03%
		2.5	Nilai Pola Pangan Harapan	Skor	88,5	90	101,69%
		2.6	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	719.917.255.507	778.580.268.442	108,15%
3	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	%	70,68	70,83	100,21%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50	4,95	70,71%
			Angka Kemiskinan	%	3,20	4,14	77,29%
		3.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,25	8,18	99,15%
		3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,17	99,92%
		3.3	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,59	74,37	102,45
		3.4	Penyelenggaraa n Festival seni dan budaya	Event	8	4,00	50,00%
		3.5	Jumlah Potensi Cagar Budaya yang diidentifikasi	Cagar Budaya	1	0	0,00%
		3.6	Persentase wirausaha muda	%	0,12	0,24	200,00%
		3.7	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabang	11	9,00	81,82%
		3.8	Indeks pembangunan Gender	%	92	N/a	0%
		3.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	95	100,00	105,26%
		3.10	Persentase PPKS yang tertangani	%	51	68,18	133,69%
		3.11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	%	35.00	66,67	133,69%
		3.12	Rasio tenaga kerja yang menjalankan usaha/bekerja terhadap tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	%	50	51,61	103,32

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024		
					Target	Realisasi	Capaian
4	Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,43	70,16	102,53%
5	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Point	65	68,49	105,37%
		5.1	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	%	100	93,43	93,43%
		5.2	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi	%	100	88,88	88,88%
		5.3	NILAI SAKIP	Predikat/ Nilai	B/>60	61,1	100,00%
		5.4	NILAI LPPD	Nilai	2,97	N/a	0%
		5.5	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	Indeks	0,817	0,7540	92,29%
		5.6	Indeks SPBE	Indeks	2,5	2,75	110,00%
		5.7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	36,12	38,60	106,87%
		5.8	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00%
		5.9	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah	%	85	85	100,00%
		5.10	Opini BPK		WTP	N/a	0%
		5.11	Indeks Kemandirian keuangan	Indeks	0,12	N/a	0%
		5.12	Indeks Pencegahan Korupsi	Indeks	3	2,868	95,60%
		5.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50	85,48	95,51%
6	Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman		Angka Kriminalitas	%	50	N/a	0%
		6.1	Persentase penegakan perda	%	90,00	100	111,1%
		6.2	Capaian Pembinaan terhadap ormas, LSM dan OKP	Ormas	60	0	0 %

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024		
					Target	Realisasi	Capaian
			aktif				
		6.3	Cakupan Pelayanan Bencana	%	100	100	100%
		6.4	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100	100	100%

### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Berikut perbandingan capaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJMD) Tahun 2018 – 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2025:

**Tabel 20**  
**Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2023 - 2024**

No	Tahun Sasaran	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Capaian 2024	Perubahan
1.	2023 (RPJMD)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	1.1	Opini BPK	WTP	N/a	-
			1.2	Nilai LkjlP	B(>60)	-	-
			1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,41	85,48	(5,453)%
			1.4	Tingkat Maturiti SPIP	Terdefinisi	-	-
			1.5	Nilai EKPPD	Rendah (2,58)	-	-
	2024 (RPD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	68,49	-
			5.1	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	-	93,43	-
			5.2	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi	-	88,8	-
			5.3	Nilai Sakip	-	61,1	-
			5.4	Nilai LPPD	N/a	N/a	-
			5.5	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	-	0,7540	-
			5.6	Indeks SPBE	-	2,75	-
			5.7	Indeks Inovasi Daerah	-	38,60	-
			5.8	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100	-
			5.9	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah	-	85	-
			5.11	Indeks Kemandirian keuangan	-	N/a	-
			5.12	Indeks Pencegahan Korupsi	-	2,868	-
2.	2023 (RPJMD)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	2.1	Harapan Lama Sekolah	12,16	12,17	0,082%
			2.2	Rata-rata lama sekolah	8,17	8,18	0,122%
			2.3	Angka Harapan Hidup	74,12	74,37	0,337%
			2.4	Persentase Balita Gizi buruk	0,45	-	-
	2024 (RPD)	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	2.5	Konsumsi per kapita	9494	-	-
				Indeks Pembangunan Manusia	70,35	70,83	0,682%
			3.4	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	-	4,00	-
			3.5	Jumlah Potensi Cagar Budaya yang di Identifikasi	-	0	-
			3.6	Persentase wirausaha muda	-	0,24	-
			3.7	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	-	9	-
			3.8	Indeks pembangunan Gender	-	N/a	-
			3.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	100	-
		3.10	Persentase PPKS yang tertangani	-	68,18	-	
		3.11	Indeks Pembangunan	-	66,67	-	

No	Tahun Sasaran	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Capaian 2024	Perubahan
			3.12	Keluarga (IBANGGA) Rasio tenaga kerja yang menjalankan usaha/bekerja terhadap tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	-	51,61	-
3.	2023 (RPJMD)	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	35,34	37,99	7,499%
			3.2	Persentase penduduk berakses air minum	32,32	21,82	(32,5)%
			3.3	Rasio jaringan irigasi	42,11	56,02	33,03%
			3.4	Cakupan layanan Telekomunikasi	94,00	-	-
			3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	18,26	18,82	3,1%
			3.6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a	-	-
4.	2024 (RPD)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	1.1	Indeks Gini Pelayanan publik yang sudah Terintegrasi	0,287 -	0,289 N/a	0,697% -
			1.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	-	17	-
			1.4	Angka kecelakaan lalu lintas	-	0	-
			1.5	Indeks SPBE	-	2,75	-
			1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat	-	14,19	-
			1.10	Persentase air limbah yang dikelola sesuai standar	-	18,82	-
			1.11	Rasio rumah layak huni	42	20,87	(50,31)%
			1.12	Persentase areal kawasan kumuh	-	1,09	-
			1.13	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	-	52	-
			1.14	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB	-	1,31	-
5.	2023 (RPJMD)	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	4.1	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)	42	20,87	(50,31)%
	2024 (RPD)		1.11	Rasio rumah layak huni	42	20,87	(50,31)%
6.	2023 (RPJMD)	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5.1	Tingkat pengangguran terbuka	5,23	4,95	(5,354)%
			5.2	Tingkat partisipasi kerja	72,39	-	-
			5.3	Angka kemiskinan	3,96	4,14	4,5%
			5.4	Tingkat inflasi	5,64	-	-
			5.5	PDRB Per Kapita ADHB	86,09	95,83	11,3%
7.	2024 (RKPD)	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat pengangguran terbuka	5,23	4,95	(5,354)%
				Angka kemiskinan PDRB Per Kapita ADHB	3,96 86,09	4,14 95,83	4,5% 11,3%
8.	2023	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6.1	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.814.467,2	30,64	-
			6.2	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	170.746,5	-	-
			6.3	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	100,90	74,6	-
			6.4	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	21,71	N/a	-
			6.5	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	351.335.155.152	778.580.268.442	121,606%
			6.6	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	93,10	90,00	(3,33)%
9.	2024	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	2.2	Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan	- -	3,89 885,2	- -
	2023		7.1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	65,36	57,69	(11,735)%
			7.2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	47,85	47,59	(0,543)%
10.	2024	Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,77	70,16	(3,587)%
	2023		8.1	Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	87,69	0	-
			8.2	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	6,25	3,07	(50,88)%
	2024	Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman	8.3	Indeks Pembangunan Gender	n/a	-	-
				Angka Kriminalitas	-	N/a	-
			6.1	Persentase Penegakan Perda	6,25	3,07	(50,88)%
		6.2	Capaian Pembinaan	-	0	-	

No	Tahun Sasaran	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Capaian 2024	Perubahan
			6.3	terhadap ormas, LSM dan OKP aktif	-	100	-
			6.4	Cakupan Pelayanan Bencana	-	100	-
				Persentase penurunan jumlah titik api	-	100	-

**d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah**

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan pembangunan daerah, tidak berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 telah berakhir pada tahun 2023.

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 – 2026 yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2023.

Untuk itu, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah daerah tidak dapat disajikan dalam subbab ini, namun untuk menggambarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target pembangunan selama tahun 2024, maka akan digunakan data berdasarkan target dalam RPD Kabupaten Sukamara Tahun 2024 – 2026 yang dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Dalam RPD**  
**Tahun 2024 – 2026**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kondisi Akhir (2026)
					Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	%	0,28	0,289	100%	0,26
		1.1	Pelayanan publik yang sudah Terintegrasi	%	100	N/a	0%	100
		1.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	35,85	37,99	105,97%	37,69
		1.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	6	17	283,33%	8
		1.4	Angka kecelakaan lalu lintas	%	5			5
		1.5	Indeks SPBE	Indeks	2,5	2,75	110%	3,5
		1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat	%	18,74	14,19	75,72%	23,31
		1.7	Persentase kawasan pertanian yang menggunakan akses pengairan	Indeks	70	56,02	80,03%	68
		1.8	Persentase penduduk berakses air minum/air bersih	%	22,44	21,82	97,24%	26,22
		1.9	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,00	18,82	21,39%	90,00
		1.10	Persentase air limbah yang dikelola sesuai standar	%	14,62	18,82	128,73%	29,23
		1.11	Rasio rumah layak	%	37,00	20,87	56,41%	47,00

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kondisi Akhir (2026)
					Target	Realisasi	Capaian	
			huni					
		1.12	Persentase areal kawasan kumuh	%	7,00	1,09	15,57%	7,00
		1.13	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	60	52	86,67%	60
		1.14	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB	%	6,30	1,31	20,79%	8,30
2	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70	3,89	68,25%	6,00
			PDRB Per Kapita	Juta Rupiah /Tahun	83,68	95,83	114,52%	87,68
		2.1	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Juta/Tahun	27,14	N/a	0,00%	28,15
		2.2	PDRB sektor Perdagangan	Juta/Tahun	794,7	885,2	111,39%	871,7
		2.3	PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Juta/Tahun	62,8	74,6	118,79%	68,8
		2.4	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	30,63	30,64	100,03%	32,51
		2.5	Nilai Pola Pangan Harapan	Skor	88,5	90	101,69%	90,5
		2.6	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	719.917.255.507	778.580.268.442	108,15%	80milyar
3	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	%	70,68	70,83	100,21%	72,42
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50	4,95	70,71%	3,00
			Angka Kemiskinan	%	3,20	4,14	77,29%	3,00
		3.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,25	8,18	99,15%	8,4
		3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,17	99,92%	12,41
		3.3	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,59	74,37	102,45	72,98
		3.4	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	8	4,00	50,00%	8
		3.5	Jumlah Potensi Cagar Budaya yang di identifikasi	Cagar Budaya	1	0	0,00%	1
		3.6	Persentase wirausaha muda	%	0,12	0,24	200,00%	0,25
		3.7	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabang	11	9,00	81,82%	16
		3.8	Indeks pembangunan Gender	%	92	N/a	0%	94
		3.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	95	100,00	105,26%	100
		3.10	Persentase PPKS yang tertangani	%	51	68,18	133,69%	52
		3.11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	%	35.00	66,67	133,69%	45,00
		3.12	Rasio tenaga kerja yang menjalankan usaha/bekerja terhadap tenaga kerja yang mengikuti	%	50	51,61	103,32	12,13

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kondisi Akhir (2026)
					Target	Realisasi	Capaian	
			pelatihan					
4	Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,43	70,16	102,53%	68,29
5	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Point	65	68,49	105,37%	70
		5.1	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	%	100	93,43	93,43%	65
		5.2	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi	%	100	88,88	88,88%	100
		5.3	NILAI SAKIP	Predikat/ Nilai	B/>60	61,1	100,00%	BB / >70
		5.4	NILAI LPPD	Nilai	2,97	N/a	0%	3
		5.5	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	Indeks	0,817	0,7540	92,29%	0,825
		5.6	Indeks SPBE	Indeks	2,5	2,75	110,00%	3,5
		5.7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	36,12	38,60	106,87%	49,86
		5.8	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00%	100
		5.9	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah	%	85	85	100,00%	85
		5.10	Opini BPK		WTP	N/a	0%	WTP
		5.11	Indeks Kemandirian keuangan	Indeks	0,12	N/a	0%	0,15
		5.12	Indeks Pencegahan Korupsi	Indeks	3	2,868	95,60%	3
		5.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50	85,48	95,51%	100
6	Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman		Angka Kriminalitas	%	50	N/a	0%	45
		6.1	Persentase penegakan perda	%	90,00	100	111,1%	100
		6.2	Capaian Pembinaan terhadap ormas, LSM dan OKP aktif	Ormas	60	0	0 %	60
		6.3	Cakupan Pelayanan Bencana	%	100	100	100%	100
		6.4	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100	100	100%	100

**e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 33 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 17 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



**Tabel 22**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>A. Isu Strategis 1</b>					
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	15	79,00%	96%	(17,00)%
<b>B. Isu Strategis 2</b>					
2	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	8	90,35%	93%	(2,65)%
<b>C. Isu Strategis 3</b>					
3	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	15	94,28 %	86%	8,28%
<b>D. Isu Strategis 4</b>					
4	Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1	102,53%	94,72%	7,81%
<b>E. Isu Strategis 5</b>					
5	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik	14	77,71%	88%	(10,29)%
6	Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman	5	62,22%	89%	(26,78)%

**f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

Program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 dapat dijelaskan melalui Tabel 23 berikut:

**Tabel 23**  
**Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Target kinerja**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Anggaran	Perangkat Daerah Penanggungjawab
<b>Isu Strategis 1</b>						
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	-	-	-
		1.1	Pelayanan publik yang sudah Terintegrasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.429.395.000	Dinas KominfoSandi
		1.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	120.221.272.366	Dinas PUPRPRKP
		1.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	6.426.920.000	Dinas PUPRPRKP
		1.4	Angka kecelakaan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	887.994.3826	Dinas Perhubungan
		1.5	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Pelayanan	866.570.000	Dinas KominfoSandi
		1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.241.553.876	Dinas KominfoSandi
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.188.740.000	Dinas PUPRPRKP

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Anggaran	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		1.7	Persentase kawasan pertanian yang menggunakan akses pengairan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.453.057.176	Dinas PUPRPRKP
		1.8	Persentase penduduk berakses air minum/air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.481.260.000	Dinas PUPRPRKP
		1.9	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.890.000.000	Dinas PUPRPRKP
		1.10	Persentase air limbah yang dikelola sesuai standar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.890.000.000	Dinas PUPRPRKP
		1.11	Rasio rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	109.600.000	Dinas PUPRPRKP
		1.12	Persentase areal kawasan kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	161.755.0000	Dinas PUPRPRKP
		1.13	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.459.218.000	Dinas PUPRPRKP
		1.14	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	643.913.898	DLH
Isu Strategis 2						
2	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-
			PDRB Per Kapita	-	-	-
		2.1	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	833.919.000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		2.2	PDRB sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	687.415.854	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	754.675.000	
				Program Pengembangan Ekspor	333.245.767	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	292.000.000	
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	891.438.014	
		2.3	PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.328.500.840	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	886.078.196	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	138.300.025	
		2.4	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	973.678.7201	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	334.600.8633	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	284.210.163	
				Program Pengendalian Dan Penganggulangan Bencana Pertanian	208.065.000	
				Program Penyuluhan Pertanian	460.944.362	
		2.5	Nilai Pola Pangan Harapan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian	6.464.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	877.431.134	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	28.909.020	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	18.796.500	
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	90.000.000	
		2.6	Nilai Realisasi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	229.710.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	90.925.000	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	68.280.250	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20.415.000	
		Isu Strategis 3				
3	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	-	-	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	40.346.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	540.435.788	
				Program Hubungan Industrial	202.557.752	
			Angka Kemiskinan	-	-	
		3.1	Rata-rata lama sekolah	-	-	
		3.2	Harapan Lama Sekolah	-	-	
		3.3	Umur Harapan Hidup	-	-	
		3.4	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	4.291.005.842	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.5	Jumlah Potensi Cagar Budaya yang diidentifikasi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	121.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.6	Persentase wirausaha muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.945.442.500	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
		3.7	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17,065,097,040	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
		3.8	Indeks pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	492.257.200	Dinas PPPAPPKB
		3.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Program Perlindungan Perempuan	63.650.600	Dinas PPPAPPKB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	136.186.400	
				Program Perlindungan Khusus Anak	76.795.250	
		3.10	Persentase PPKS yang tertangani	Program Pemberdayaan Sosial	125.000.000	Dinas Sosial dan PMD
				Program Rehabilitasi Sosial	3.778.602.350	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.916.920.500	
		3.11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	-	-	
		3.12	Rasio tenaga kerja yang menjalankan usaha/bekerja terhadap tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	578.866.541	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Isu Strategis 4				
4	Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.13	Indeks Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	499.181.800	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	128.850.701	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.350.000	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan	12.201.000	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Anggaran	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	119.158.407	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	23.987.500	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	41.899.425	
				Program Pengelolaan Persampahan	3.007.378.780	
<b>Isu Strategis 5</b>						
5	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	913.465.000	Sekretariat Daerah
		5.1	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Program Kepegawaian Daerah	2.636.861.700	BKPSDM
		5.2	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	871.496.000	BKPSDM
		5.3	NILAI SAKIP	-	-	Sekretariat Daerah
		5.4	NILAI LPPD	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	986.183.655	Sekretariat Daerah
		5.5	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.138.357.188	Dinas Sosial dan PMD
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	955.023.405	Dinas Sosial dan PMD
		5.6	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.241.553.876	Dinas Kominfo
		5.7	Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.206.245.005	BAPPEDA
		5.8	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.418.963.725	BAPPEDA
		5.9	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	391.951.920	BAPPEDA
		5.10	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	105.017.555.637	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.970.253.260	BPKAD
		5.11	Indeks Kemandirian keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	211.685.3209	BPKAD
		5.12	Indeks Pencegahan Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.886.644.230	Inspektorat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	783.262.344	Inspektorat Daerah
		5.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	
<b>Isu Strategis 6</b>						
6	Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman		Angka Kriminalitas	-	-	
		6.1	Persentase penegakan perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	36.030.000	Satpol PP dan Damkar
		6.2	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	107.804.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		6.3	Cakupan Pelayanan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	2.955.903.952	BPBD
		6.4	Persentase penurunan jumlah titik api	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.901.725.258	Satpol PP dan Damkar

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Daerah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga setingkat Kementerian kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Sementara itu, penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di daerah disediakan oleh yang menugasi. Sementara untuk laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan, disampaikan oleh Kepala Daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam dokumen yang terpisah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten**

Pada Tahun 2024 Kabupaten Sukamara tidak melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

##### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 24**  
**Target Capaian SPM Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

##### 4.1.3 Realisasi

**Tabel 25**  
**Capaian SPM Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	49,39	62,19
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	95,81%

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

**Tabel 26**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pendidikan Anak Usia Dini	10.272.833.780	10.066.519.693	97,99
2	Pendidikan Dasar	33.364.554.631	31.781.338.512	95,25
3	Pendidikan Kesetaraan	643.580.000	637.555.000	99,06
<b>Jumlah</b>		<b>44.280.968.411</b>	<b>42.485.413.205</b>	<b>95,95</b>

#### 4.1.5 Dukungan Personil

##### a. Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 27**  
**Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Status Kepegawaian)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	699
2.	PPPK	141

##### b. Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

**Tabel 28**  
**Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Pendidikan PNS)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	0
2.	Magister (S-2)	9
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	730
4.	Diploma III (D-3)	3
5.	Diploma II (D-2)	13
6.	Diploma I (D-1)	0
7.	SLTA/SMA/Sederajat	14
8.	SLTP	0
9.	SD	0

##### c. Personil Berdasarkan Pangkat dan Golongan (PNS)

**Tabel 29**  
**Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Pangkat dan Golongan)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	55
3.	Pembina (IV.a)	94
4.	Penata Tingkat I (III.d)	72
5.	Penata (III.c)	188
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	127
7.	Penata Muda (III.a)	182
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	2
9.	Pengatur (II.c)	7
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	4
11.	Pengatur Muda (II.a)	0

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
12.	Juru Tingkat I (I.d)	1
13.	Juru (I.c)	0
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	0
15.	Juru Muda (I.a)	0

d. Personil Berdasarkan Eselon

**Tabel 30**  
**Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Eselon)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	6

e. Personil Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Tabel 31**  
**Personil Pendukung SPM Pendidikan (Berdasarkan Jenis Jabatan)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	22
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	a) Guru	733
	b) Pamong Budaya	2
	c) Pengembang Teknologi Pendidikan	2

f. Struktur Organisasi

**Tabel 32**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Pendidikan**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Sekretariat	1
2.	Bidang	3
3.	Sub Bagian	2
4.	Sub. Bidang / Seksi	4

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

- Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan.
- Anak usia sejak lahir s/d 6 tahun belum semuanya terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Partisipasi sekolah dan partisipasi murni anak-anak usia 13-15 tahun atau setingkat SMP/MTs yang masih rendah;
- Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs, rata-rata lama sekolah sekitar 8,01 tahun (2020) dan termasuk kelompok yang terendah di Kalimantan Tengah;
- Kualifikasi pendidikan dan kompetensi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan) perlu ditingkatkan;
- Distribusi tenaga pendidik belum merata;
- Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu ditingkatkan;

- Akurasi dan update data pendidikan dan kebudayaan perlu ditingkatkan.
- Masih perlunya peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sukamara;
- Implementasi Merdeka Belajar (Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Guru Penggerak)
- Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

b) Solusi

- Pemerataan akses layanan pendidikan dengan strategi:
  - i. Pengaturan distribusi siswa dibarengi dengan pengaturan kapasitas penerimaan siswa baru sehingga tidak ada sekolah yang memiliki Rasio siswa per kelas (R-S/K) melebihi standar.
  - ii. Pemberian bantuan alat transportasi berupa armada bus sekolah bagi siswa yang berdomisili pada jarak yang melebihi SPM Pendidikan Dasar dari sekolah.
- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua jenjang Pendidikan.
- Pengaturan distribusi dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang Pendidikan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan tahun
- Pemberian bantuan perlengkapan siswa (seragam dan sepatu) bagi siswa baru
- Pemberian bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) di semua jenjang Pendidikan.

#### 4.1.7 Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Pendidikan

Program dan Kegiatan pendukung SPM Pendidikan dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut:

**Tabel 33**  
**Program dan Kegiatan pendukung SPM Pendidikan**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	744.622.560	739.490.000	99,31
			Pengadaan Mebel PAUD	50.835.000	50.742.000	99,82
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	847.718.500	830.894.000	98,02
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	774.702.720	676.704.160	87,35
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	289.560.000	251.898.300	86,99
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5.676.875.000	5.628.271.233	99,14
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.888.520.000	1.888.520.000	100,00



No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	785.600.000	760.850.000	96,85
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.852.194.950	3.784.449.290	98,24
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	567.723.840	566.200.000	99,78
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	775.328.740	773.608.000	99,78
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah	563.800.000	562.035.000	99,69
			Pengadaan mebel sekolah	574.240.000	521.631.522	90,84
			Pengadaan Perlengkapan siswa	1.431.137.063	1.419.441.000	99,18
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah	1.885.520.000	1.885.520.000	100,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	7.170.903.471	7.167.139.471	99,95
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	790.460.000	50.998.200	6,45
			Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah	802.715.680	800.066.718	99,67
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.685.946.240	1.605.762.400	95,24
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.791.653.527	1.375.522.250	76,77
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.569.501.120	1.492.925.280	95,12
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	145.095.000	105.946.249	73,02
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.676.875.000	5.628.271.233	99,14
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.295.860.000	3.280.971.899	99,55
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	190.000.000	189.650.000	99,82
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	413.930.000	413.930.000	100,00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	39.650.000	33.975.000	90,00
<b>Jumlah</b>				<b>44.280.968.411</b>	<b>42.485.413.205</b>	<b>95,95</b>

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;

- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

#### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 34**  
**Target Capaian SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi) (100 ORG)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

#### 4.2.3 Realisasi

**Tabel 35**  
**Capaian SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	91,63%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	88,61%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	90,26%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95,99%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97,55%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	63,02%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	72,06%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	44,51%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	77,53%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
	(Human Immunodeficiency Virus)			

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

**Tabel 36**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	685.878.244	383.397.000	55,90%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	338.549.344	179.522.000	53,03%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	133.626.267	34.560.000	25,86%
4.	Pelayanan kesehatan balita	1.279.645.750	1.007.572.750	78,74%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	565.195.000	333.802.500	59,06%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	284.031.000	279.565.000	98,43%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	273.872.876	152.563.500	55,71%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	96.096.100	80.296.100	83,56%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	89.870.500	81.070.500	90,21%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	164.805.000	129.580.000	78,63%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	131.860.000	95.520.000	72,44%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	110.329.850	97.061.000	87,97%
<b>Jumlah</b>		<b>2.935.203.783</b>	<b>1.911.549.500</b>	<b>65,12%</b>

#### 4.2.5 Dukungan Personil

##### a. Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 37**  
**Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Status Kepegawaian)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	271
2.	Non PNS	70

##### b. Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

**Tabel 38**  
**Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	1
2.	Magister (S-2)	2
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	86
4.	Diploma III (D-3)	177
5.	Diploma II (D-2)	-
6.	Diploma I (D-1)	-
7.	SLTA/SMA/Sederajat	6
8.	SLTP	-
9.	SD	-

##### c. Personil Berdasarkan Pangkat dan Golongan (PNS)

**Tabel 39**  
**Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Pangkat dan Golongan)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	-

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	2
3.	Pembina (IV.a)	5
4.	Penata Tingkat I (III.d)	25
5.	Penata (III.c)	38
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	60
7.	Penata Muda (III.a)	37
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	58
9.	Pengatur (II.c)	23
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	1
11.	Pengatur Muda (II.a)	-
12.	Juru Tingkat I (I.d)	-
13.	Juru (I.c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	-
15.	Juru Muda (I.a)	-

d. Personil Berdasarkan Eselon

**Tabel 40**  
**Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Eselon)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2

e. Personil Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Tabel 41**  
**Personil Pendukung SPM Kesehatan (Berdasarkan Jenis Jabatan)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	a) Dokter	8
	b) Dokter Gigi	2
	c) Apoteker	7
	d) Asisten Apoteker	5
	e) Pranata Labkes	9
	f) Epidemilog Kesehatan	-
	g) Santitarian	7
	h) Perawat Gigi	6
	i) Nutrisionis	11
	j) Bidan	63
	k) Perawat	87
	l) Radiografer	-
	m) Perekam Medik	6
	n) Kesehatan Masyarakat	5
	o) Analis Obat dan Makanan	1
	p) Administrator Kesehatan Ahli Muda	5
	q) Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	2
	r) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1
	s) Analis Kebijakan Ahli Muda	2

f. Struktur Organisasi

**Tabel 42**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Kesehatan**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Sekretariat	1
2.	Bidang	3
3.	Sub Bagian	2
4.	Sub. Bidang / Seksi	0

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) permasalahan

- Adanya adat sosial budaya di masyarakat (mis: persalinan oleh dukun)

##### b) Solusi

- Adanya kerja sama antara bidan dan dukun desa dalam persalinan serta tenaga kesehatan perlu meningkatkan promosi untuk pemanfaatan layanan kesehatan baik di Pustu, Poskesdes maupun Puskesmas.

#### 4.2.7 Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Kesehatan

Program dan Kegiatan pendukung SPM Kesehatan dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut:

**Tabel 43**  
**Program dan Kegiatan Pendukung SPM Kesehatan**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	685.878.244	383.397.000	55,90%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	338.549.344	179.522.000	53,03%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	133.626.267	34.560.000	25,86%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.279.645.750	1.007.572.750	78,74%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	565.195.000	333.802.500	59,06%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	284.031.000	279.565.000	98,43%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	273.872.876	152.563.500	55,71%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	96.096.100	80.296.100	83,56%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	89.870.500	81.070.500	90,21%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	164.805.000	129.580.000	78,63%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	131.860.000	95.520.000	72,44%

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	110.329.850	97.061.000	87,97%
Jumlah				2.935.203.783	1.911.549.500	65,12%

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 44**  
**Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

#### 4.3.3 Realisasi

**Tabel 45**  
**Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	34,16%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	18,81%

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

**Tabel 46**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	20.481.260.000	20.262.013.178	98,93%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.067.160.000	2.026.162.791	98,02%

#### 4.3.5 Dukungan Personil

##### a. Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 47**  
**Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum**  
**(Berdasarkan Status Kepegawaian)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15
2.	Non PNS	6

##### b. Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

**Tabel 48**  
**Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum**  
**(Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	-
2.	Magister (S-2)	1
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	10
4.	Diploma III (D-3)	3
5.	Diploma II (D-2)	-
6.	Diploma I (D-1)	-
7.	SLTA/SMA/Sederajat	-
8.	SLTP	-
9.	SD	-

##### c. Personil Berdasarkan Pangkat dan Golongan (PNS)

**Tabel 49**  
**Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum**  
**(Berdasarkan Pangkat dan Golongan)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	-
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	-
3.	Pembina (IV.a)	1
4.	Penata Tingkat I (III.d)	2
5.	Penata (III.c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	9
7.	Penata Muda (III.a)	1
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	1
9.	Pengatur (II.c)	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	-
11.	Pengatur Muda (II.a)	-
12.	Juru Tingkat I (I.d)	-
13.	Juru (I.c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	-
15.	Juru Muda (I.a)	-

##### d. Personil Berdasarkan Eselon

**Tabel 50**  
**Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum**  
**(Berdasarkan Eselon)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	0



e. Personil Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Tabel 51**  
**Personil Pendukung SPM Pekerjaan Umum**  
**(Berdasarkan Jenis Jabatan)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	11
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	a) JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2
	b) JFT Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1

f. Struktur Organisasi

**Tabel 52**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Sekretariat	-
2.	Bidang	-
3.	Sub Bagian	-
4.	Sub. Bidang / Seksi	-

**4.3.6 Permasalahan dan Solusi**

a) Permasalahan

- Kurangnya akses pelayanan air bersih jaringan peripaan (PDAM) ;
- Kualitas air baku yang tidak stabil;
- Infrastruktur instalasi pengolahan air yang belum optimal dan belum merata di setiap kecamatan;
- Keterbatasan anggaran dan Alokasi pendanaan untuk kebutuhan peningkatan terhadap pelayanan Air bersih;
- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi;
- Perubahan iklim dan Pencemaran air.
- Belum adanya Perbup Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Sukamara;
- Masih kurang armada penyedotan lumpur tinja;
- Secara Umum, cara pandang terhadap sanitasi masih belum dianggap menjadi permasalahan prioritas;
- Kurangnya Peran masyarakat dalam pemeliharaan bangunan sanitasi

b) Solusi

- Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih yang memadai;
- Membangun waduk embung sebagai alternatif sumver air baku ;
- Memelihara atau melakukan rehabilitasi konservasi lahan dan air
- Segera dibuatnya Perbup Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Sukamara;
- Penambahan unit penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja serta mengatur jadwal program Layanan Lumpur Tinja;
- Meningkatkan pengawasan terhadap KSM yang sudah dibentuk

**4.3.7 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan pendukung SPM Pekerjaan Umum dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut:

**Tabel 53**  
**Program dan Kegiatan Pendukung SPM Pekerjaan Umum**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16.462.460.000	16.275.853.178	98,87
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.700.000.000	3.668.860.000	99,16
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	318.800.000	317.300.000	99,53
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	200.000.000	198.609.000	99,30
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	350.000.000	342.454.800	97,84
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100.000.000	99.559.000	99,56
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	340.000.000	339.019.900	99,71
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	807.500.000	784.500.000	97,15
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7.500.000	7.483.000	99,77
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	85.000.000	82.372.940	96,91

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

##### 4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 54**  
**Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
	korban bencana kabupaten/kota					rumah layak huni yang akan dipenuhi)		dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

#### 4.4.3 Realisasi

**Tabel 55**  
**Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

**Tabel 56**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	109.600.000	109.300.000	99,73%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0	0	0

#### 4.4.5 Dukungan Personil

##### a. Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 57**  
**Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat**  
**(Berdasarkan Status Kepegawaian)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13
2.	Non PNS	8

##### b. Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

**Tabel 58**  
**Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat**  
**(Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	-
2.	Magister (S-2)	1
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	7
4.	Diploma III (D-3)	4
5.	Diploma II (D-2)	-
6.	Diploma I (D-1)	-
7.	SLTA/SMA/Sederajat	-
8.	SLTP	-
9.	SD	-

c. Personil Berdasarkan Pangkat dan Golongan (PNS)

**Tabel 59**  
**Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat**  
**(Berdasarkan Pangkat dan Golongan)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	-
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	-
3.	Pembina (IV.a)	2
4.	Penata Tingkat I (III.d)	1
5.	Penata (III.c)	-
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	3
7.	Penata Muda (III.a)	2
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	4
9.	Pengatur (II.c)	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	-
11.	Pengatur Muda (II.a)	-
12.	Juru Tingkat I (I.d)	-
13.	Juru (I.c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	-
15.	Juru Muda (I.a)	-

d. Personil Berdasarkan Eselon

**Tabel 60**  
**Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat**  
**(Berdasarkan Eselon)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	-

e. Personil Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Tabel 61**  
**Personil Pendukung SPM Perumahan Rakyat**  
**(Berdasarkan Jenis Jabatan)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	11
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2

f. Struktur Organisasi

**Tabel 62**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Sekretariat	-
2.	Bidang	1
3.	Sub Bagian	-
4.	Sub. Bidang / Seksi	2

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- a) Permasalahan
  - Untuk melaksanakan perbaikan rumah korban bencana harus ada SK Bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b) Solusi
  - Membuat SK Bencana jika terjadi Musibah sehingga ada Dasar dalam melaksanakan Rehabilitasi atau perbaikan pada rumah korban bencana

#### 4.4.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pendukung SPM Perumahan Rakyat dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut:

**Tabel 63**  
**Program dan Kegiatan Pendukung SPM Perumahan Rakyat**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	109.600.000	109.300.000	99,73

### 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Beberapa Jenis Pelayanan Dasar tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara untuk Pelayanan Dasar (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan (2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan untuk Pelayanan Dasar (1) Pelayanan informasi rawan bencana, (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan (3) Pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukamara.

#### 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 64**  
**Target Capaian SPM Bidang Tramtibum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### 4.5.3 Capaian

**Tabel 65**  
**Capaian SPM Bidang Tramtibum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	84,80%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	99,80%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	99,04%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	93,73%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	96,67%

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

**Tabel 66**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Tramtibum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	756.227.000,00	676.503.725,00	89,45%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	125.950.000,00	80.151.000,00	63,63%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.060.758.800,00	1.419.810.318,00	68,89%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	655.190.152,00	445.146.050,00	67,94%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.901.725.258,00	1.705.239.449,65	89,66%
Jumlah		5.499.851.210,00	4.326.850.542,65	78,67%

#### 4.5.5 Dukungan Personil

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**  
a. Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 67**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas**  
**(Berdasarkan Status Kepegawaian - Satpol PP dan Damkar)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (ASN)	30
2.	Non PNS	81

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara**

**Tabel 68**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas**  
**(Berdasarkan Status Kepegawaian – BPBD)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (ASN)	14
2.	Non PNS	32

b. Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**

**Tabel 69**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS - Satpol PP dan Damkar)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	-
2.	Magister (S-2)	1
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	8
4.	Diploma III (D-3)	-
5.	Diploma II (D-2)	-
6.	Diploma I (D-1)	-
7.	SLTA/SMA/Sederajat	21
8.	SLTP	-
9.	SD	1

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara**

**Tabel 70**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS – BPBD)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	-
2.	Magister (S-2)	1
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	4
4.	Diploma III (D-3)	3
5.	Diploma II (D-2)	-
6.	Diploma I (D-1)	-
7.	SLTA/SMA/Sederajat	6
8.	SLTP	-
9.	SD	-

c. Personil Berdasarkan Pangkat dan Golongan (PNS)

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**

**Tabel 71**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Pangkat dan Golongan - Satpol PP dan Damkar)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	1
3.	Pembina (IV.a)	2
4.	Penata Tingkat I (III.d)	5
5.	Penata (III.c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	2
7.	Penata Muda (III.a)	1
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	-
9.	Pengatur (II.c)	7
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	5
11.	Pengatur Muda (II.a)	5
12.	Juru Tingkat I (I.d)	1
13.	Juru (I.c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	-
15.	Juru Muda (I.a)	-

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara**

**Tabel 72**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Pangkat dan Golongan – BPBD)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	-
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	-
3.	Pembina (IV.a)	1
4.	Penata Tingkat I (III.d)	2
5.	Penata (III.c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	2
7.	Penata Muda (III.a)	1
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	3
9.	Pengatur (II.c)	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	2
11.	Pengatur Muda (II.a)	1
12.	Juru Tingkat I (I.d)	-
13.	Juru (I.c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	-



No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
15.	Juru Muda (I.a)	-

d. Personil Berdasarkan Eselon

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**

**Tabel 73**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Eselon - Satpol PP dan Damkar)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	4

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara**

**Tabel 74**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Eselon – BPBD)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	3

e. Personil Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**

**Tabel 75**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Jenis Jabatan – Satpol PP dan Damkar)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	6
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	a) Polisi Pamong Praja Terampil	8
	b) Polisi Pamong Praja Pemula	1

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara**

**Tabel 76**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum**  
**(Berdasarkan Jenis Jabatan – BPBD)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	10
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	-

f. Struktur Organisasi

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**

**Tabel 77**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Tramtibum**  
**(Satpol PP dan Damkar)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Sekretariat	1
2.	Bidang	2
3.	Sub Bagian	2

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
4.	Sub. Bidang / Seksi	2

**Tabel 78**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Tramtibum**  
**(BPBD)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Sekretariat	1
2.	Bidang	-
3.	Sub Bagian	-
4.	Sub. Bidang / Seksi	3

#### 4.5.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

##### **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara**

###### a. Kendala dan Permasalahan

- Kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara.
- Sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban dan Pemadam Kebakaran belum memadai.

###### b. Solusi

- Meningkatkan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikuti pendidikan/pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Untuk sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan diusulkan.

##### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara**

###### a. Kendala dan Permasalahan

- Kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Kurangnya koordinasi yang humanis dan sinergi pada saat perencanaan kegiatan.
- Belum pernah dilaksanakan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Sukamara.

###### b. Solusi

- Agar mengusulkan sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Diharapkan agar dilaksanakan rapat koordinasi Pra penyusunan program sebelum pelaksanaan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- Perlu diusulkan kegiatan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Sukamara.

#### 4.5.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pendukung SPM Perumahan Rakyat dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut:

**Tabel 79**  
**Program dan Kegiatan Pendukung SPM Tramtibum**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	32.620.000,00	23.470.280,00	71,95%
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	6.000.000,00	0,00	0,00%
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	630.000.000,00	610.408.015,00	96,89%
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	11.500.000,00	0,00	0,00%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.990.000,00	0,00	0,00%
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.040.000,00	2.549.470,00	50,58%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	40.077.000,00	40.075.960,00	100,00%
2.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	125.950.000,00	80.151.000,00	63,64%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.032.372.720,00	745.879.280,00	72,25%
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000,00	299.917.670,00	99,97%
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	13.559.000,00	13.559.000,00	100,00
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	38.695.000,00	77,39%
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	664.827.080,00	321.759.368,00	48,40%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	549.469.000,00	388.096.550,00	70,63%
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	11.580.000,00	23,16%
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	55.721.152,00	45.469.500,00	81,60%
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	6.100.000,00	3.728.000,00	61,11%
			Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	107.905.000,00	71.205.000,00	65,99%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.800.000,00	22.400.000,00	94,12%

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelamatan Non Kebakaran	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.300.000,00	50.670.000,00	93,31%
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	61.720.000,00	60.500.200,00	98,02%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.742.305.258,00	1.571.669.249,65	90,21%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.000.000,00	0,00	0,00%
4.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	14.600.000,00	0,00	0,00%
Jumlah				5.613.856.210,00	4.401.783.543,65	78,41%

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten.

### 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 80**  
**Target Capaian SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban Bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

### 4.6.3 Capaian

**Tabel 81**  
**Capaian SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	88,97%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban Bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%

### 4.6.4 Alokasi Anggaran

**Tabel 82**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.490.590.000	1.281.967.452	86,00%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	299.985.488	243.229.000	81,08%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	0	0	0%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0	0	0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	0	0	0%

### 4.6.5 Dukungan Personil

#### a. Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 83**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Sosial**  
**(Berdasarkan Status Kepegawaian)**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8
2.	Non PNS	0

#### b. Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

**Tabel 84**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Sosial**  
**(Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS)**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S-3)	-
2.	Magister (S-2)	-
3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-4)	5
4.	Diploma III (D-3)	1
5.	Diploma II (D-2)	-
6.	Diploma I (D-1)	-
7.	SLTA/SMA/Sederajat	2
8.	SLTP	-
9.	SD	-

c. Personil Berdasarkan Pangkat dan Golongan (PNS)

**Tabel 85**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Sosial**  
**(Berdasarkan Pangkat dan Golongan)**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	-
2.	Pembina Tingkat I (IV.b)	-
3.	Pembina (IV.a)	1
4.	Penata Tingkat I (III.d)	2
5.	Penata (III.c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III.b)	2
7.	Penata Muda (III.a)	1
8.	Pengatur Tingkat I (II.d)	1
9.	Pengatur (II.c)	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	-
11.	Pengatur Muda (II.a)	-
12.	Juru Tingkat I (I.d)	-
13.	Juru (I.c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I.b)	-
15.	Juru Muda (I.a)	-

d. Personil Berdasarkan Eselon

**Tabel 86**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Sosial**  
**(Berdasarkan Eselon)**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	-

e. Personil Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Tabel 87**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Sosial**  
**(Berdasarkan Jenis Jabatan)**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	3
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	a) Analis Kebijakan Ahli Muda	2
	b) Pekerja Sosial Ahli Muda	1
	c) Pekerja Sosial Ahli Pertama	1

f. Struktur Organisasi

**Tabel 88**  
**Struktur Organisasi Pengampu SPM Bidang Sosial**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Sekretariat	-
2.	Bidang	1
3.	Sub Bagian	-
4.	Sub. Bidang / Seksi	-

#### 4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

- Masih terdapat keperluan anggaran yang belum bisa terpenuhi guna menunjang implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

#### 4.6.7 Program dan Kegiatan Pendukung SPM Sosial

Program dan Kegiatan pendukung SPM Sosial dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut:

**Tabel 89**  
**Program dan Kegiatan Pendukung SPM Sosial**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	701.370.000	701.370.000	100,00
			Penyediaan Sandang	59.800.000	59.750.000	99,92
			Penyediaan Alat Bantu	58.201.000	58.201.000	100,00
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.806.400	14.433.000	97,48
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	32.309.000	31.273.300	96,79
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.208.550.000	1.199.445.000	99,25
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	550.000		0,00
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	5.000.000	100,00
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	9.950.000	9.750.000	97,99
			Pemberian Layanan Kedaruratan	1.526.767.350	1.362.000.000	89,21
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.200.000	0	0,00
			Pemberian Layanan Rujukan	160.098.600	158.150.376	98,78
			Penyediaan Makanan	251.160.000	67.469.790	26,86
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	1.050.000.000	883.850.000	84,18
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.000.000	25.000.000	100,00
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	55.000.000	44.017.200	80,03
			Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000	15.000.000	100,00
			<b>Jumlah</b>	<b>5.174.762.350</b>	<b>4.634.709.666</b>	<b>89,56</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024 ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan terhadap Kabupaten Sukamara di Tahun 2025.

Sekiranya masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024, maka kami sangat mengharapkan masukan baik dari masyarakat dalam hal untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Sekian dan terima kasih.

Sukamara, 27 Maret 2025

**BUPATI SUKAMARA,**  
  
**H. MASDUKI, S.T.**